SPG: KEMBALIKAN FUNGSI MPR

BERINDO

MAJALAH BERITA INDONESIA®

EDISI 85 TAHUN VII ★ DESEMBER 2012

Rp.16.000,-

JOKOWI MENGINSPIRASI DUNIA

Blusukan bagi Jokowi bukan hanya sekadar memetakan permasalahan, melainkan ia ingin berdialog, mendapat saran dan inspirasi serta menemukan solusi bersama rakyat secara langsung.

DAHLAN SERANG BALIK DPR

AHOK GENJOT TRANSPARANSI ANGGARAN

LENTERA DEMOKRASI, TOLERANSI DAN PERDAMAIAN | ISSN 1907-977X | BERINDO.COM | BERITAINDONESIA.CO.ID

TokohINDONESIA
THE EXCELLENT BIOGRAPHY

MOBILE VERSION
m.tokohindonesia.com

ENSIKLOPEDI ONLINE

Tokoh Indonesia DotCom, sebuah media informasi dan database online terlengkap dan terpadu perihal profil para tokoh di Indonesia yang tengah dibangun menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online. Diterbitkan sejak 20 Mei 2002 bertepatan Hari Kebangkitan Nasional.

MENU

ENSIKLOPEDI
DIREKTORI
WIKI TOKOH
BERITA
C-JOURNALISM
KOMUNITAS

TOKOHINDONESIA.COM
THE JOURNALISTIC BIOGRAPHY

DAFTAR ISI

Edisi.85/Th.VII/
Desember 2012

Disain Sampul: *Esero*
Foto: *Hotsan*

SALAM REDAKSI
Salam Perubahan 4
VISI BERITA
Permanenkan KPK 5
VISI TOKOH
Laksamana TNI Agus Suhartono 6
BERITA TERDEPAN
Dahlan Serang Balik DPR 7

NEWSMAKER
- Jokowi Menginspirasi Dunia 8
- Ahok Genjot Transparansi Birokrasi 11

SURAT TERBUKA
Polri, Tegakkan Kepala 13

BERITA WAWANCARA
- Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono: Tujuh Syarat Pemimpin Nasional 20

BERITA POLITIK
- Mudahkan Syarat Capres 2014 24

OPINI HUKUM
- Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Arah Politik Penegakan Hukum 26

BERITA UTAMA

PERKUAT DAN AWASI KPK | 14-19

Pemerintah dan DPR sepakat mengagendakan (Prolegnas) revisi UU KPK. KPK dan publik bereaksi menenggarai revisi tersebut sebagai bagian dari upaya sistematis membonsai KPK: corruptors fight back. 14

Superbody Koq Cengeng? 17
Presiden: Lima Solusi Atasi Kisruh KPK-Polri 17
Kisah Fungsi Kordinasi KPK 19

BERITA TOKOH
- SDA, Pemimpin Islam Kebangsaan • Pemimpin Tanpa Menghukum • Rieke Gregetan 28
- Mengingatkan Janji Abraham Samad • Merdeka, Si Peduli Anak 29

BERITA BUDAYA
- Dunia Terpikat Pesona Batik 39

BERITA WISATA
- Geliat Wisata Minat Khusus 40

BERITA HIBURAN
- Petualangan Terakhir Divisi Fringe 42

BERITA EKUIN
- Tarif Listrik Naik 1 Januari 2013 43
- Prototipe Mobnas Selesai 2013 44
- BUMN-DKI Kerjasama Bangun Underpass 44

BERITA LINGKUNGAN
- Ancaman di Kutub Utara • Ekosistem Pasifik Bergeser • Laju Oksidasi Samudera 45

BERITA KOTA
- Parkir, Ganti Sesuai Harga Mobil 46
- Parkir Tercanggih di Dunia 46
- Pantai Ancol Digugat Jadi Ruang Publik 47
- Pilkada Kota Bekasi 47

BERITA DAERAH
- Sinergi Selamatkan Danau Toba 48
- Petani Kemenyan Tak Berdaya • Provinsi Kaltara Terbentuk 2013 • Hindari Calo Anggaran 49
- Kukar, Perencanaan Propublik 50
- Rumah untuk Warga Miskin 51
- Pelajar Kebumen yang Membanggakan 51

BERITA IPTEK
- Mempertanyakan Komputasi Awan 52
- Apple Kalahkan Semuanya 53

BERITA HUMANIORA
- Demi Kebaikan Guru 54
- Ketika Pelajar Menghunus Pisau 55

CORRUPTION WATCH
- ICW: DPR Lumpuhkan KPK 56
- Kajian Pengadaan Simulator SIM 57
- Lomba Blog Melawan Korupsi 58
- Tata Kelola Dana Pendidikan 58

HIGHLIGHT BERITA
- Korupsi di KPU Batam • Gaji Penyidik Timpang • Ada BUMN Jadi Mayat 59

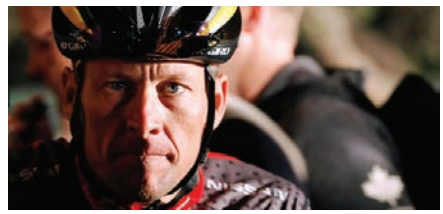

BERITA OLAHRAGA
- Skandal Doping Terbesar 60
- Perenang Akbar Nasution Pensiun 60
- Usain Bolt Naikkan Citra Dunia Atletik 61

BERITA BUKU
- Rahasia Bakat Pesebak Bola Brasil 62

BERITA PEREMPUAN
- Tiga Peneliti Perempuan dari ITB • KRL Khusus Perempuan 63

BERITA KESEHATAN
- Mengajak Bayi Belajar Makan 64
- Minuman Kesehatan Jantung 65
- Jadi Jahat Bila Berlebihan 66

LENTERA | 30-38

Syaykh Panji Gumilang: Kembalikan Fungsi MPR Setelah UUD mengalami perubahan, kini peranan MPR dalam praktiknya tidak menetapkan GBHN, sehingga penyelenggara negara tidak dapat menentukan arah yang jelas dalam melaksanakan UUD 30

Kisah Manusia Khalifah Tuhan

Tulisan ini selain mengupas barang sedikit tentang pengenalan diri tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia dan alam, tujuan manusia, struktur manusia, keterjerumusan manusia dalam dosa, manusia dan fitrahnya, juga berupaya mengenali Bapak-Bapak Leluhur manusia dari periode ke periode, sejak diproklamirkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mencipta manusia sebagai khalifahNya 32

Negara Mestinya Netral 36
Menuju Ketahanan Pangan 37
Kurban Diantar Langsung 38
Presiden Serukan Antipenistaan Agama 38

MAJALAH BERITA INDONESIA

Lentera, Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

PEMIMPIN UMUM:
Syaykh Dr. AS Rasyidi Panji Gumilang

PEMIMPIN REDAKSI:
Ch. Robin Simanullang

REDAKTUR SENIOR:
Agung Sidayu
Imam Prawoto
Sudirman Leonard Pohan
Samsuri

REDAKTUR EKSEKUTIF:
Mangatur Lorielcide Paniroy

REDAKTUR:
Marjuka Situmorang
Dian Gina Rahayu
Ade Wiharyana

SEKRETARIS REDAKSI
Bantu Hotsan

STAF REDAKSI:
Nawawi, Ikhwan Triatmo, Sarjiman, Doan Adikara Pudan, Muliyanti Sahara

WARTAWAN FOTO:
Wilson Edward, Bantu Hotsan
& *Fieasta Image*

KARIKATUR:
Doan AP

KONTRIBUTOR:
Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Retno Handayani, Chusnato, Tumpal Siburian, J. Pasaribu, Hator Sianipar

BIRO REDAKSI:
Sumut: Edward Tahi Purba (Medan), Parasian Manalu (Tapanuli), Batam: Ridwan Marbun, Sumsel: Sri Windayani, Jawa Barat: Ade Wiharyana, Prana Citra (Bandung), Marjuka Situmorang (Bekasi), Bernard Sihite (Purwakarta)
Kalimantan Timur: Sudirman Leonard Pohan (Tarakan), Leo Situmeang (Balikpapan)
Amerika Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland), Rukyal Basri (Philadelphia)

DESAIN GRAFIS:
***ESERO** Design*

PENERBIT:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan PT Asasira dan Yayasan Pesantren Indonesia

IKLAN DAN PROMOSI:
Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:
Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:
Jl. Buni 02/02 No. 36, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telp. (021) 3219 5353
Fax. (021) 8690 1951

E-MAIL:
redaksi@berindo.com
iklan@berindo.com

WEBSITE:
www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X
MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

PENCETAK:
PT GRAMEDIA
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

HARGA:
Rp.16.000,-

***PANGLIMA TNI:** Wawancara dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono*

Semangat Nan Tak Kunjung Padam

Pembaca! Setelah beberapa saat majalah ini 'beristirahat', kini tampil dengan semangat baru. Semangat baru tersebut semakin memantapkan peran media ini sebagai pembawa suara (lentera) demokrasi, toleransi dan perdamaian, yang telah menjadi misi utamanya sejak awal.

Semangat baru itu antara lain tercermin dari tampilan sampul yang terlihat lebih dinamis dan enerjik. Nama Berita Indonesia disingkat BERINDO ditampilkan dalam format baru yang disemangati nyala api nan tak kunjung padam. Hal itu mencerminkan semangat yang selalu menyala dan berkembang sesuai dinamika zamannya, tetapi tetap kukuh dalam jati diri, visi dan misinya dengan tetap mencantumkan nama Majalah Berita Indonesia.

Selain itu, dalam bagian isi juga ada perubahan. Antara lain, menampilkan kolom pakar dan tokoh yang memiliki kompetensi di bidangnya. Juga menampilkan rubrik baru *Corruption Watch* dalam rangka menyemangati para penggiat antikorupsi serta mendorong publik untuk melawan korupsi. Berita penegakan hukum tindak pidana korupsi juga diangkat. Namun, demi keseimbangan, direncanakan juga akan adanya rubrik Pledoi. Ada juga rubrik Newsmaker, Visi Tokoh, dan Wawancara.

Juga dimunculkan rubrik Berita Kota, yang menyoroti dinamika kehidupan perkotaan. Serta rubrik-rubrik lain yang sebelumnya sudah ada, namun lebih didinamisasi. Terutama rubrik LENTERA yang telah menjadi salah satu ciri khas dan kekuatan tersendiri (roh) dari majalah ini, lebih didinamisasi, diperkaya dan lebih beraneka ragam namun tetap dalam benang merah demokrasi, toleransi dan perdamaian.

Pembaca, pada edisi ini, kami menyajikan laporan tentang pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki yang menginspirasi dunia dalam rubrik Newsmaker. Juga menampilkan keberadaan KPK dan dinamika yang melingkupinya (pelemahan KPK yang terindikasi dari kisruh Polri versus KPK dan rencana pemerintah dan DPR merevisi UU KPK), dengan tema utama 'Perkuat dan Awasi KPK' sebagai Berita Utama. Dilengkapi surat terbuka buat Kapolri: Polri, Tegakkan Kepala! Serta Visi Berita: Permanenkan KPK.

Dalam rubrik LENTERA, kami menyuguhkan 'kegelisahan pikiran' Syaykh Panji Gumilang tentang kurang berfungsinya MPR. Dia berharap kiranya bangsa ini kembali teguh dalam jati dirinya. Selain itu, dalam rubrik LENTERA, kami juga menyajikan uraian Syaykh al-Zaytun tentang 'Kisah Manusia Khalifah Tuhan'. Ada juga pandangan beberapa tokoh tentang pluralisme (kemajemukan) dalam kehidupan beragama.

Kami juga mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta terpilih Jokowi, serta menghargai mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebagai seorang demokrat dalam rubrik Newsmaker. Kami juga menampilkan kolom dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita tentang politik hukum. Juga visi Laksamana TNI Agus Suhartono tentang negara agraris dan maritim, serta petikan wawancara dengan beliau. Dan sejumlah berita lainnya.

Selamat membaca.

Redaksi

Permanenkan KPK

CH. ROBIN SIMANULLANG

Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksanakan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan reformasi untuk secara total memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.

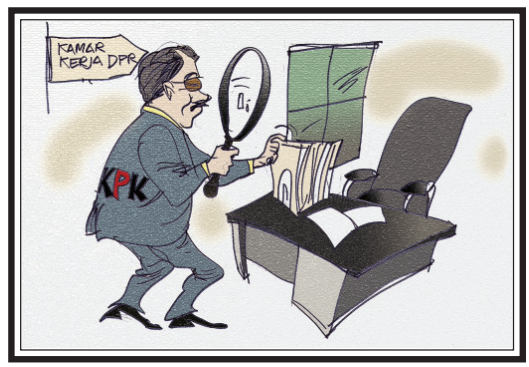

Tetapi Rancangan UU KPK tersebut menghadapi perlawanan sengit dalam pembahasan di DPR, terutama dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Akhirnya disepakati, kepolisian dan kejaksaan juga tetap berwenang menangani tindak pidana korupsi tersebut. Tetapi kepada KPK diberi kewenangan koordinasi, supervisi bahkan jika kedua institusi itu tidak mau dan tidak mampu, maka KPK memiliki kewajiban untuk mengambil-alih. Juga disepakati, jika kepolisian dan kejaksaan memulai penyidikan atas suatu tindak pidana korupsi, mereka wajib memberitahu kepada KPK. Tetapi jika KPK memulai, mereka harus berhenti melakukan penyidikan, tidak boleh lagi dilakukan.

Kemudian dalam rangka tugas koordinasi dan supervisi tersebut dalam penjelasan umum dicantumkan fungsi KPK sebagai *trigger mechanism*, mendorong kedua institusi (Kepolisian dan Kejaksaan) bisa bekerja lebih efektif, untuk meningkatkan kinerja dengan lebih baik. Dengan fungsi *trigger mechanism* itu semula diharapkan hubungan koordinasi dan sinkronisasi akan berjalan lebih baik.

Tetapi ternyata dalam implementasinya, tampaknya muncul hambatan psikologis antara KPK dengan kedua institusi tersebut, antara lain dipengaruhi stigma negatif masyarakat luas terhadap dua institusi itu, di lain pihak dukungan dan ekspektasi luar biasa terhadap KPK. Hal ini akhirnya mengakibatkan kontraproduktif, yang menimbulkan persaingan tidak sehat antara ketiga institusi itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi.

Di tengah kondisi itu, dukungan dan tekanan masyarakat luas, terutama LSM pun semakin mendorong KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Sehingga KPK lupa kepada fungsi koordinasi dan supervisi, serta fungsi sebagai *trigger mechanism*, untuk mendorong Kepolisian dan Kejaksaan agar bisa bekerja lebih efektif dalam meningkatkan kinerjanya.

Di lain pihak, fungsi *trigger mechanism* tersebut juga dimaknai (dimaksudkan) bahwa KPK hanyalah sebuah lembaga independen ad-hoc, yang jika kepolisian dan kejaksaan sudah dapat diandalkan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, maka KPK sudah tidak diperlukan lagi.

Lalu, setiap kali ada kekisruhan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan, publik semakin mendukung, mendorong dan menekan KPK harus lebih fokus sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, dan menolak KPK disebut sebagai lembaga ad-hoc. Begitu pula ketika DPR berniat merevisi UU KPK, ditolak dengan keras karena dianggap akan melemahkan KPK.

Terakhir, Presiden SBY berpidato dengan poin menunda pembahasan revisi UU KPK, tetapi akan siap membuka pembahasan bila hal itu untuk memperkuat KPK. Dalam konteks ini, kita mengusulkan jika revisi UU KPK dilakukan supaya lebih ditegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga permanen bukan lembaga ad-hoc, tanpa mengurangi pula independensi dan kewenangan luar biasanya. Bahkan, mengingat keberadaan KPK yang amat penting dalam hal pemberantasan korupsi, sebaiknya keberadaannya diamanatkan (ditegaskan) dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi). Sebab kehadirannya secara permanen akan menjadi jaminan perannya tanpa batas waktu untuk memberantas korupsi, khususnya yang dilakukan oleh para penyelenggara negara (penguasa), baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. ■

"Kita mengusulkan jika revisi UU KPK dilakukan supaya lebih ditegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga permanen bukan lembaga ad-hoc, tanpa mengurangi pula independensi dan kewenangan luar biasanya. Bahkan, mengingat keberadaan KPK yang amat penting dalam hal pemberantasan korupsi, sebaiknya keberadaannya diamanatkan (ditegaskan) dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi). Sebab kehadirannya secara permanen akan menjadi jaminan perannya tanpa batas waktu untuk memberantas korupsi, khususnya yang dilakukan oleh para penyelenggara negara (penguasa), baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif."

Visi Indonesia

Agraris dan Maritim

LAKSAMANA TNI AGUS SUHARTONO*

Ditinjau catatan sejarah sosial budaya, masyarakat bangsa Indonesia lahir di dua sisi kehidupan sebagai masyarakat agraris dan masyarakat maritim.

Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau yang terbentang sepanjang 1/8 (satu per delapan) garis khatulistiwa dengan kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan komoditas strategis maupun komoditas ekspor.

Kondisi ini semestinya mampu menjadikan Indonesia sebagai "*supply side*" yang dapat memasok dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan hasil industri olahannya, sekaligus menjadi pasar yang besar atau "*demand side*" dalam rantai pasok global, karena jumlah penduduknya yang besar.

Di sisi lain, perjuangan panjang bangsa Indonesia telah ditempuh, guna meraih pengakuan internasional sebagai negara kepulauan, yang kemudian untuk pertama kalinya Deklarasi Djuanda 1957 diakui hingga akhirnya pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982), yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, selanjutnya konvensi tersebut diberlakukan sebagai hukum positif sejak 16 Nopember 1994, maka status Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) diakui oleh dunia.

Pengakuan dunia dalam hukum internasional tersebut mengesahkan "*a defined territory*" bahwa negara Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya.

Maka, dari tinjauan inilah sebenarnya visi RI harus berangkat dalam "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur" dengan mengombinasikan potensi agraris dan maritim, sekaligus untuk menjadikan Indonesia sebagai "*supply side*" dan "*demand side*".

Namun, kesuksesan tersebut harus disertai langkah-langkah kongkrit dalam mengimplementasikan legalitas tersebut untuk mewujudkan negara kepulauan yang jika ditinjau, baik dari aspek geopolitik, geostrategi maupun geoekonomi. Realitanya sampai dengan saat ini, Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

Ke depan yang perlu kita padukan adalah maritim dan agraris. Dua-duanya bisa berdampingan yang semuanya bisa menghasilkan sumber devisa bagi negara, bisa menyejahterakan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sebenarnya sudah mengakomodasi kedua-duanya, negara agraris dan maritim sudah mulai diangkat, tapi belum sama.

Maka, kita berharap, nanti ke depan bisa berjalan bersama-sama. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa negara kita negara kepulauan. Sumber daya alam kita yang di laut juga cukup banyak manakala dikelola dengan baik. Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik.

Kira-kira pada tahun berapa Indonesia bisa mencapai kesejajaran agraria dengan kekuatan maritimnya? Sebenarnya tinggal dengan komitmen kita saja mengelola sumber daya maritim itu. Sekarang sudah terlihat hanya pada potensi perikanan yang sudah dikelola meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Tetapi budidaya belum dan masih perlu diteruskan. Kemudian eksplorasi kekayaan yang di tengah laut (Migas) sekarang sudah mulai banyak tapi juga perlu terus dilakukan. Kalau prediksi saya, tinggal kebijakan yang dilakukan mengarah ke mana. Tapi kalau kebijakan menggenjot ini secepat mungkin pasti akan lebih baik. ■

** Panglima TNI*

``Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik.´´

Dahlan Serang Balik DPR

Momen yang sangat tepat untuk buka-bukaan

Komisi VIII DPR memanggil Dahlan Iskan, mantan Dirut PLN yang kini menjabat Menteri BUMN sehubungan dugaan salah urus PLN yang mengakibatkan inefisiensi Rp 37 triliun tahun 2009-2010. Dahlan berdalih mengelak panggilan itu, seraya menyerang balik DPR dengan menyebut sekitar sepuluh anggota parlemen itu memeras BUMN.

Beberapa anggota DPR meriang dituduh pemeras BUMN. Perseteruan DPR versus Dahlan ini pun menjadi bahan berita yang terus diburu para wartawan. Di tengah ramainya pemberitaan, beberapa orang yang tergabung dalam Forum Pemred datang pula menyambangi Dahlan, yang kebetulan mantan Pemred Jawa Pos dan kini memiliki sindikasi media. Sebuah preseden yang kurang pantas. Opini publik pun terbentuk. Dalam berbagai opini dan pemberitaan, DPR tersudut, dan Dahlan diuntungkan. Berkembang opini publik seolah-olah DPR *offensive* mencari-cari kesalahan Dahlan karena dituduh memeras BUMN.

Perseteruan ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011 yang menemukan adanya inefisiensi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada pengoperasian delapan pembangkit pada 2009 dan 2010. BPK di antaranya menemukan kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis *dual firing* tidak terpenuhi. Untuk itu, harus dioperasikan dengan high speed diesel (HSD) atau solar, yang jauh lebih mahal dari gas, sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010.

Delapan unit pembangkit tersebut hanya mendapatkan pasokan gas sebanyak 785 BBTUD atau 49,03 persen dari total kebutuhan 1.601 BBTUD pada 2009. Kemudian pada 2010 pasokan gas menurun menjadi 778 BBTUD atau 48,78 persen dari kebutuhan sebanyak 1.595 BBTUD. Inefisiensi PLN tersebut ditambah pula dengan kemampuan pemasok yang hanya dapat memenuhi 80,25 persen kewajibannya dari kontrak atau sekitar 630 BBTUD pada 2009 dan 84,58 persen atau 658 BBTUD pada 2010. Hal ini mengakibatkan pembangkit-pembangkit harus dioperasikan dengan HSD yang harganya lebih mahal dari gas, sehingga PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010.

Sehubungan dengan itu, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain membidangi energi mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut PLN, untuk memberikan penjelasan. Tapi dua kali Dahlan mengelak panggilan DPR

Foto: Ist

Menteri BUMN Dahlan Iskan

tersebut dengan berbagai dalih. Di antaranya, Dahlan beralasan, ketidakhadirannya di DPR karena memiliki kegiatan lain yang sudah lebih dulu dijadwalkan.

Dalam catatan DPR, sudah empat kali Menteri BUMN Dahlan Iskan mangkir berturut-turut dari panggilan DPR untuk membahas PT Telkom yang pailit, Privatisasi Wijaya Karya dan RUU Usaha Perasuransian, serta temuan BPK atas inefisiensi PLN. Pertama, pada Kamis 18 Oktober 2012, RDP di komisi VI DPR mengenai PT Telkomsel yang dinyatakan pailit. Kedua, Dahlan mangkir saat dipanggil Komisi XI untuk membahas privatisasi PT Wijaya Karya dan penjelasan pemerintah tentang RUU Usaha Perasuransian. Ketiga, pada Senin 22 Oktober 2012, Dahlan kembali absen untuk Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII terkait temuan BPK. Keempat, pada Rabu 24 Oktober 2012, Dahlan kembali absen dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII, juga mengenai temuan BPK inefisiensi PLN sebesar Rp 37 triliun.

Namun, kepada pers Dahlan menyatakan siap mempertanggungjawabkan dugaan pemborosannya saat menjabat Direktur Utama Pembangkit Listrik Negara (PLN). "Kalau itu salah, saya harus berani menanggung risikonya, masuk penjara pun saya jalani dengan seikhlas-ikhlasnya, karena jadi pemimpin tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi juga mau dengan risikonya. Risiko itu akan saya tanggung, masuk penjara pun saya ikhlas," kata Dahlan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012). Dahlan sendiri tidak membantah adanya inefisiensi anggaran. Bahkan, menurutnya, Rp 37 triliun itu kurang besar. Dia mengatakan BPK tidak menyalahkan PLN.

Sementara Dahlan mengelak panggilan DPR itu, dia pun menyerang balik DPR dengan menghembuskan kepada publik bahwa dia mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Hembusan 10 nama anggota DPR pemeras BUMN tersebut sontak ramai dalam perbincangan publik. DPR dibuat gerah dan tersudut. Hembusan itu disusul pula beredarnya sms yang berisi inisial beberapa anggota DPR RI yang diduga memeras BUMN, yakni, AK, IM, SN, NW, BS (Golkar); PM, EV, CK (PDIP); AR, IR, SUR (PKS); FA (Hanura); ALM, NAS, (PAN); JA, SG, MJ (PD); dan MUZ (Gerindra). Sms itu disebut-sebut berasal dari Humas kementerian BUMN. Namun, kemudian Humas BUMN membantah.

Badan Kehormatan DPR pun meminta klarifikasi dengan memanggil Dahlan, 5 November 2012. Dia pun hanya menyebut dua nama tanpa didukung bukti. Didesak mengungkap delapan nama lainnya, Dahlan kemudian mengirim nama tambahan pada 7 November 2012. Kemudian karena ada anggota yang DPR yang mengancam somasi, Dahlan pun kemudian mengirim surat merevisi nama yang sudah disebutnya.

Setelah itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi panggilan Komisi VII DPR, Selasa (13/11/2012), memberi klarifikasi terkait temuan BPK perihal inefisiensi di PLN senilai Rp 37 triliun ketika dia menjabat Direktur Utama PLN periode 2009-2010. Hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan para pejabat terkait. Dahlan mengakui pemborosan tersebut, tapi dia mengatakan bahwa BPK tidak menyebut ada indikasi korupsi dalam kasus itu.

ICW melihat komitmen pembersihan BUMN dapat dimulai dan ditunjukkan melalui pengungkapan inefisiensi PLN tersebut. "Jadi di samping DPR yang dibersihkan, BUMN juga harus mulai menunjukkan komitmennya. Momen ini, sangat tepat untuk saling buka-bukaan. Jadi kalau ada penyimpangan, ada pemerasan, momennya sudah tepat saat ini. Siapapun yang memiliki data tentang itu sekarang ini lebih baik dikemukakan. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat berjalan di jalur yang sama beriringan tanpa harus condong ke satu instansi/lembaga. Jadi harus seimbang. Di satu sisi pembersihan di DPR, di sisi lainnya harus ada penataan di BUMN juga," jelasnya. ■ **mbi/bhs**

Jokowi Menginspirasi Dunia

Delapan bulan lebih Ir. Joko Widodo (Jokowi) menghiasi pemberitaan media nasional bahkan mancanegara. Terutama sejak namanya disebut-sebut sebagai kandidat cagub, hingga terpilih dan dilantik pada 15 Oktober 2012 menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Dia didampingi Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Basuki - Ahok) sebagai Wakil Gubernur. Sejak hari pertama menjabat gubernur, Jokowi blusukan ke berbagai tempat, terutama kampung-kampung kumuh dan sarat persoalan. Sementara wakilnya, Ahok, menggenjot transparansi birokrasi demi melayani rakyat. Duet Jokowi dan Basuki telah menginspirasi dunia tentang kepemimpinan pro rakyat kecil.

Bukan karena pernyataan-pernyataannya yang meluncur dengan tata bahasa dan retorika hebat, tetapi karena daya tarik aksi kepemimpinannya yang bersahaja, tulus, jujur, bersih dan merakyat (berorientasi pelayanan keepada rakyat kecil), telah menempatkannya menjadi pembuat berita terhebat sepanjang tahun 2012 ini dan menginspirasi kepemimpinan dunia tentang kehebatan pemimpin yang melayani.

Harian The New York Times, yang belum tentu memberitakan kunjungan Presiden RI ke AS, tak mau ketinggalan menyoroti pencalonan hingga kemenangan Jokowi di bawah judul: *"Outsider Breathing New Ideas Into Jakarta Election"*. Media ini menulis (19/9/2012) keterkejutan publik atas kemenangan Jokowi "di negara di mana politikus sering kali berasal dari elite yang terkait atau memiliki hubungan dengan mendiang Presiden Soeharto dan militer, Jokowi muncul untuk mewakili generasi baru politikus." NYT menyoroti kiprah Jokowi, seorang eksportir furnitur yang masuk politik untuk pertama kali tahun 2005 dan berhasil menata kota Solo, yang secara luas dianggap bersih dan mampu memimpin ibu kota di negara yang kental aroma korupsinya. Walaupun NYT juga mempertanyakan apakah Jokowi bisa menerapkan keberhasilan di Surakarta, sebuah kota dengan 520 ribu penduduk, jika menang dan memimpin Jakarta, kota berpenduduk 10 juta.

Begitu pula The New Straits Times (Malaysia) memuat kolom Mustapha Mohamed, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, yang mengulas Jokowi, Gubernur DKI Jakarta terpilih. Bahkan Mustapha memuji Jokowi sebagai salah satu sosok yang menjadi inspirasinya. "Di antara sekian banyak kepribadian menarik yang saya temui di seluruh dunia, Joko Widodo adalah salah satu kepribadian yang menginspirasi saya," tulis Mustapha di New Straits Times edisi Selasa, 2 Oktober 2012 bertajuk *Jokowi's work ethic is an inspiration.*

Mustapha menulis perkenalannya pertama kali saat Jokowi datang ke Kuala Lumpur untuk kunjungan singkat mempromosikan Solo sebagai tujuan wisata dan investasi pada bulan Februari tahun ini. "Sambil minum teh dan keropok tradisional di rumah saya, kami memiliki waktu yang baik berbagi pengalaman politik dan birokrasi sebagai pelayan publik," ungkap Mustapha. Dia menyebut etos kerja Jokowi telah menginspirasinya.

RAKYAT: Jokowi-Basuki berbaur dengan rakyat seusai upacara pelantikan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta, 15 Oktober 2012

Selain itu, Karim Raslan dan Pitan Daslani, pengamat dari Malaysia juga menyoroti fenomena kemenangan Jokowi. Karim Raslan, yang pernah tinggal di Indonesia, menulis ulasan tentang Jokowi di koran berbahasa Inggris, The Star, dan media berbahasa Melayu, Sinar Harian. Pitan Daslani mengupas fenomena kemenangan Jokowi di portal berita berpengaruh Malaysia, The Malaysian Insider, dengan tulisan berjudul "*Leadership Lessons in Jakarta Pave Way for 2014 Election*".

Situs berita The Australian, juga melansir berita berjudul *"Can-do outsider takes reins of must-fix city"*. Situs ini menyoroti Jokowi, sebagai orang luar yang bersemangat, mengalahkan calon incumbent, Fauzi Bowo dan akan memerintah salah satu kota besar di Asia yang paling disfungsional lima tahun ke depan. Tulisan itu diturunkan setelah mengetahui hasil *quick count* Pilkada putaran pertama. Tak ketinggalan situs berita Inggris, BBC pada 20 September 2012 juga memberitakan tentang kemenangan Jokowi dalam artikel berjudul, *"Joko Widodo leads Jakarta governor elections."* Jokowi disebut sebagai sosok yang merakyat.

Pakistan Observer, juga mengutip Reuters, memberitakan kemenangan Jokowi sebagai wujud kekecewaan publik pada pemerintah sebelumnya. Jokowi harus menyelesaikan sejumlah masalah perkotaan sesuai dengan janjinya. Dan sejumlah pemberitaan dan ulasan dunia lainnya yang berkaitan dengan fenomena kemenangan Jokowi-Basuki. Seperti The Sydney Morning Herald, Australia yang menurunkan ulasan atas kemenangan Jokowi, yang ditulis Hamish McDonald (Editor Asia-Pasifik) yang mengaitkannya dengan kepemimpinan nasional pasca Yudhoyono. Juga The Economist (29/9/2012) di bawah judul *'Political outsiders are challenging Asia's traditional elites'* menyoroti fenomena kemenangan Jokowi yang berpasangan dengan Basuki (Tionghoa-Kristen) di negara berpenduduk mayoritas Muslim, dengan menyebutnya sebagai kemenangan bagi toleransi dan nilai-nilai peradaban.

Apalagi pemberitaan dalam negeri, baik media cetak, elektronik (televisi dan radio) dan media online, selama berbulan-bulan menempatkan berita tentang Jokowi di halaman utama (muka). Hampir semua media nasional membuka rubrik khusus 'Gebrakan Jokowi-Basuki'. Sebagai gambaran, hasil riset yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta selama periode 1 Juni 2012-13 September 2012, Joko Widodo unggul dalam perolehan berita foto, dan peliputan kandidat secara tunggal. Demikian juga, tabulasi media berdasarkan riset AJI menempatkan pemberitaan yang positif untuk Jokowi mencapai 810 berita dan pemberitaan negatif 172 item. Sedangkan pesaingnya Fauzi Bowo memperoleh 666 berita positif dan 260 berita negatif.

Bahkan setelah hiruk-pikuk kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta usai, pemberitaan tentang Jokowi-Ahok selalu diburu pembaca, pemirsa dan pendengarnya. Apa saja kegiatan kedua pemimpin Jakarta ini dari subuh hingga larut malam selalu diendus para awak media, kendati mereka tidak mempunyai informasi tentang jadwalnya.

Penampilan Jokowi yang bersahaja dan dekat dengan rakyat, memang telah

menjadi daya tarik tersendiri yang menempatkannya menjadi pembuat berita terhebat sepanjang tahun 2012 ini. *Track record*-nya yang fenomenal memimpin Solo telah membuatnya 'cukup seksi' sebagai pembuat berita.

TokohIndonesia.com mengapresiasinya sebagai Walikota Solo (pemimpin) yang fenomenal dan 'Inspirasi Pemimpin Bijak'. Pemimpin bersahaja, arif, jujur dan selalu berpihak pada wong cilik. Apalagi di tengah kegalauan hati rakyat melihat kondisi kepemimpinan di negeri ini, publik mencari-cari figur yang pantas didaulat sebagai pemimpin (walikota/bupati, gubernur dan presiden) yang melayani rakyat. Salah satu figur yang mendapat sorotan mata publik adalah Joko Widodo (Jokowi). Kepemimpinan Jokowi tampaknya telah menjadi oase di tengah kegersangan dan kegalauan hati publik atas kondisi negeri yang auto pilot. Setidaknya, Jokowi telah menginspirasi publik tentang seorang pemimpin yang bijak dan tulus mengayomi rakyat, memimpin dengan hati.

Jokowi, memang bukan pemimpin yang pandai memaparkan visi-misi dengan bahasa saintifik, abstrak dan puitis penuh retorika. Sebagai Walikota Solo pilihan rakyat (91%) dan baru saja memenangkan Pilkada Gubernur DKI Jakarta (53.82%), dia hanya berpegang pada tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Blusukan, Social Approach

Seusai upacara pelantikan (Senin , Jokowi langsung turun mengunjungi warga, masuk kampung (blusukan: bahasa Jawa dari kata blusuk, blesek, artinya masuk). Dia langsung blusukan berkeliling di gang-gang sempit di RT 14 RW 01 Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara. Dia fokus mengamati selokan dan sanitasi lingkungan yang dipenuhi oleh sampah dan mengeluarkan bau tak sedap. Dia pun meminta aparat kelurahan dan pengurus RT/RW serta warga untuk membersihkan. "Saya beri waktu satu minggu. Nanti dari dinas PU (pekerjaan umum) akan bantu karung, truk, mungkin juga untuk mengeruknya. Ya masyarakat juga harus bantu. Tadi saya pesan ke Pak RT supaya ada kerja baktinya juga dari masyarakat," ucap Jokowi.

Setelah itu, dia meluncur ke Rumah Susun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Di kompleks Rusun yang terdiri dari tiga blok berlantai lima itu, Jokowi tampak begitu miris melihat betapa kumuhnya kondisi rusun. Bangunan yang terdiri dari batako berwarna abu-abu tampak lusuh. Kepada Jokowi, warga mengeluhkan kondisi bangunan yang sudah tidak layak. Bocor setiap hujan sehingga warga khawatir tersengat aliran listrik, fasilitas air tidak bisa dinikmati warga di lantai atas karena pompa tidak berfungsi optimal. Jokowi meminta dinas terkait untuk segera memperbaikinya.

CILIWUNG: Jokowi blusukan ke pinggir kali Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan

Kemudian, masih di hari pertama, Jokowi blusuk ke permukiman warga di pinggiran Kali Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Di sini Jokowi menyimak pemaparan soal rencana pembangunan kampung susun. Saat itu juga, dia memerintahkan dinas PU untuk segera mengukur lahan yang dibutuhkan dan akan segera memutuskan kebijakan yang diambil. "Kawasan pemukiman ini harus memenuhi konsep seperti memiliki ruang terbuka hijau, drainase yang baik, memiliki septic tank, dan ada ruang publiknya," jelasnya. Dia menyebut kawasan bantaran kali di Bukit Duri akan menjadi percontohan. Dia juga memastikan, warga di sekitar kawasan itu tidak akan direlokasi dengan adanya pembangunan kampung susun deret tersebut.

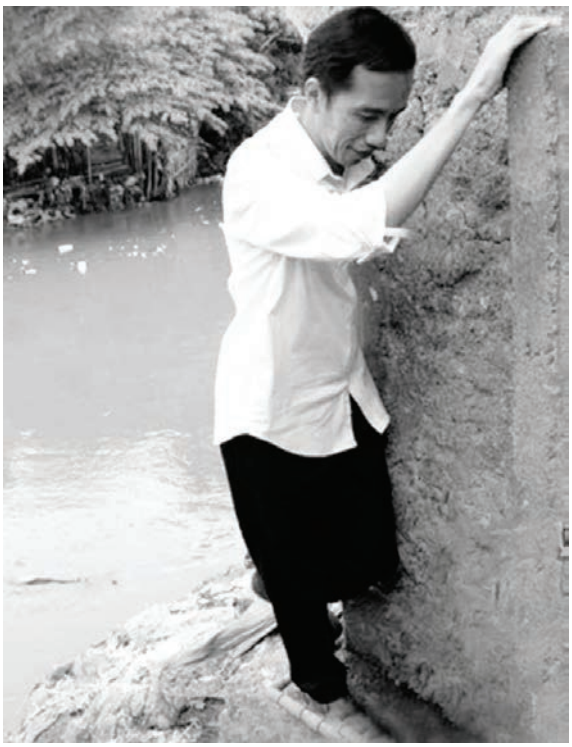

PINGGIR KALI: Jokowi menapaki tebing pinggir kali Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan

Setelah blusukan ke tiga tempat itu, barulah Jokowi menuju Balaikota, masuk ke ruang kerjanya dan melakukan pertemuan dengan para stafnya. Besoknya, 17 Oktober 2012, usai berkeliling Jakarta sejak pagi, Jokowi yang mengenakan kemeja putih, celana hitam dan sepatu kets, menemui Dahlan Iskan di kantor Kementerian BUMN. Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu mereka membicarakan kerjasama mengurai kemacetan di Jakarta. Lalu masuk ke Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, menyapa para penumpang di halte bus Transjakarta dan berbincang dengan sopir Kopaja. Jokowi menyatakan prihatin dengan kondisi sebagian besar armada yang berusia di atas 15 tahun dan tak laik jalan. Berdasarkan hasil tinjauannya, dia mengatakan banyak sekali yang harus dibenahi dari sistem transportasi bus kota.

Itulah sedikit gambaran, bagaimana Jokowi mengawali tugas kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Blusukan itu dilakukannya hampir saban hari. Sebagaimana ditegaskannya saat kampanye, dan sudah dipraktekkannya di Solo selama tujuh tahun, dia akan lebih banyak memimpin di lapangan. Hingga satu bulan lebih sudah berjalan, Jokowi terus blusukan tanpa kenal lelah. Dia membangunkan para stafnya

(satuan perangkat kerja daerah -SPKD) dari keleletan yang sudah lumutan selama ini, harus siaga penuh meningkatkan pelayanan. Dia mengajak semua stafnya untuk selalu sigap turun ke lapangan.

Bahkan bukan hanya SPKD Jakarta yang dia bangunkan, para wartawan berbagai media pun dia 'paksa' untuk siaga dan sigap sejak subuh hingga larut malam. Hampir semua media berita nasional dibuat sibuk dan harus ikut tancap gas mengikuti berbagai kegiatan Jokowi dan Basuki. Wartawan yang bertugas di Balaikota Jakarta, yang sebelum ini terlihat santai, dipaksa harus memiliki mobilitas, *speed* dan stamina tinggi jika tidak mau ketinggalan berita. Para wartawan 'dipaksa' beradaptasi dengan gebrakan Jokowi yang bekerja blusukan ke kampung-kampung tanpa memberitahukan agenda kegiatan yang pasti kepada wartawan, bahkan kepada Humasnya.

Suatu pagi, Jokowi pernah melakukan inspeksi mendadak ke Kelurahan Senen, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kecamatan Cempaka Putih, tanpa banyak media yang tahu. Kecolongan seperti ini, sudah dianggap sebagai kelalaian profesi yang tidak boleh terulang lagi. Hal ini membuat para awak media benar-benar harus sigap berburu berita layaknya sang pemburu di hutan belantara. Seperti disebut Dwifantya Aquina, wartawan Vivanews: "Blusukan bersama Jokowi merupakan suatu hal yang seru, tetapi juga menegangkan layaknya berada di dalam sebuah film *action*. Seperti juga pengalaman Bantu Hotsan, Wartawan Berita Indonesia, yang kadang kala ikut mengejar Jokowi. Dia sudah siaga jam 05.00 pagi di seputar rumah dinas gubernur. Lalu bersama wartawan lain dengan sepeda motor membuntuti Jokowi ke mana pergi. Setelah mengunjungi dua tempat, mereka kehilangan Jokowi karena mobilnya masuk tol, sementara arah tujuannya tidak tahu ke mana.

Para wartawan mengira kegiatan Jokowi blusukan paling beberapa hari awal tugasnya. Tapi ternyata, sudah lebih satu bulan, tak capek-capek, bahkan kejutannya setiap hari semakin menjadi.

Kini di kalangan Wartawan Balaikota DKI muncul istilah 'Mengejar Jokowi' karena memang setiap hari mereka harus mengejar tanpa tahu ke mana dia akan berkegiatan. Selama satu bulan 'Mengejar Jokowi' para wartawan menimba banyak kisah suka dan duka. Selain sukanya, yang sedemikian seru mengejar berita Jokowi, juga ada dukanya di mana sebagian dari mereka yang berjatuhan sakit karena harus menunggu dan berburu dari pagi hingga malam. Tetapi para wartawan itu pun amat puas, tatkala melihat semangat dan antusiasme para pembaca yang selalu menikmati laporan (tulisan) mereka. Sehingga kini mereka menikmati bagaimana rasanya sebagai awak pemburu berita.

KARTU SEHAT: Jokowi meluncurkan Kartu Sehat Jakarta

Dikritik, Blusukan Terus

Namun ada saja orang yang tidak senang melihat Jokowi blusukan atau merasa selama satu bulan itu sudah cukup. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10) mengatakan apa yang dilakukan Jokowi juga bisa memunculkan sisi-sisi negatif. Sebab, menurut

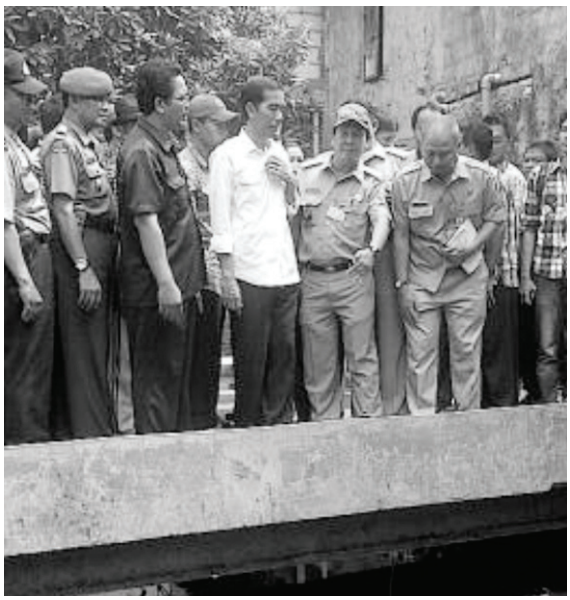

PADEMANGAN: Jokowi blusukan di Pademangan

Max, jika ada satu kampung yang tak disambanginya justru bakal menyerang kinerja Jokowi. "Akan lebih efektif mendelegasikan kepada walikota wilayah masing-masing," kritik politikus Demokrat itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menilai kegiatan Jokowi blusukan ke kantong-kantong permasalahan Ibu Kota sudah cukup untuk memetakan permasalahan yang ada. Menurut Sutiyoso, kini saatnya Jokowi kembali ke kantor mengenal dan menggerakkan para staf serta merumuskan permasalahan kemudian melakukan aksi. "Kita tunggu *action*," kata Sutiyoso.

Menanggapi kritik tersebut, Jokowi menegaskan tekadnya akan terus mengunjungi kampung-kampung warga selama ia menjabat gubernur. Meskipun ada yang menyarankan ia berhenti melakukan gaya blusukan seperti itu, ia tetap akan melakukan hal tersebut. "Pokoknya saya lima tahun blusukan terus, mau ke kampung terus, pokoknya selama lima tahun. Pokoknya ke bawah, ke kampung, banyak ke lapangan. Setiap gubernur itu punya gaya sendiri. Gaya saya, ya gaya blusukan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (19/11/2012) malam.

Gaya Jokowi memang berbeda dari gubernur-gubernur yang berkuasa sebelumnya. Jokowi terlihat sangat mengedepankan *social approach* (pendekatan sosial) dengan lebih suka terjun langsung ke lapangan, tanpa pengawalan ketat dan merakyat. Blusukan bagi Jokowi bukan hanya sekadar memetakan permasalahan, melainkan ia ingin berdialog dan menemukan solusi bersama rakyat secara langsung. Jokowi mengatakan, ia akan mendapat banyak aspirasi dan saran jika turun sendiri ke lapangan bertemu dengan masyarakat. Menurutnya, hal itu tidak akan didapatnya jika terlalu banyak duduk di belakang meja kantor. "Setiap hari setiap saat itu pasti ada aspirasi dari rakyat, dari bawah. Ada kebutuhan dari bawah, yang kalau kita hanya duduk di kantor enggak akan ketangkap seperti itu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, turun ke lapangan itu bukan berarti hanya turun menemui warga dan melihat perkampungan kumuh. "Melainkan kunjungan seperti itu juga dilakukan untuk mengontrol lapangan, memantau pelaksanaan proyek dan program kerja. Kita lihat apakah pelayanannya sudah baik atau belum. Ini semua, kan, bentuk sebuah manajemen. Kalau manajemen perencanaan tanpa manajemen kontrol ke bawah tidak baik, ya enggak akan bisa terwujud," tegas Jokowi. Jokowi pun tidak risau apabila kegiatan blusukan itu dianggap pencitraan. Dia dengan senang hati menerima segala kritik, namun blusukan akan terus dilakukannya sampai lima tahun ke depan.

Gaya kepemimpinan blusukan memang adalah habitat Jokowi. Sebagaimana penuturan Devid Ayunanto, anggota Kopassus yang sudah enam tahun bertugas sebagai Aspri Jokowi, sejak saat menjabat Walikota Solo. "Sejak dulu sewaktu menjabat Walikota Solo, stafnya sering datang pagi-pagi ke rumah dinas untuk tanda tangan surat. Sebab, Bapak lebih sering dari rumah dinas langsung melakukan tinjauan ke kampung daripada ke kantor. Kalau ke kantor paling cuma temui tamu itu pun paling maksimal 30 menit," ungkap Devid Ayunanto. ■ **bi-tsl**

Ahok Genjot Transparansi Birokrasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta: Kita kini berjuang melawan korupsi. Tapi itu belum sebanding dengan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Perjuangan kita lebih enteng, kita belum bercucuran darah.

Kedua pemimpin ibukota yang memiliki gaya kepemimpinan berbeda, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, setelah dilantik langsung tancap gas dengan *speed* tinggi dan mendapat liputan luas dari berbagai media sehingga menuai simpati tersendiri dari masyarakat. Memang, banyak hal yang mereka lakukan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Di antaranya, menggenjot transparansi birokrasi dalam hal penggunaan anggaran.

Sudah hampir dua bulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bertugas. Pasangan ini, dengan gayanya masing-masing, tampak sejalan dan saling mengisi dalam membagi tugas mengurus Jakarta. Jokowi lebih banyak blusukan menghampiri semua permasalahan di lapangan, Ahok lebih sering memimpin rapat di Balai Kota menerima dan membahas temuan-temuan lapangan Jokowi, terutama dalam hal pengetatan dan transparansi anggaran. Keduanya menjadi buruan para awak media.

WAGUB: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Basuki menjalankan tugas selalu (sebelum dan setelah) berkordinasi dengan Jokowi. Setiap hari, pagi atau malam mereka bertemu. Basuki mendapat tugas di dalam membenahi birokrasi dan anggaran. Jokowi menjelaskan kesepakatan mereka, dia sebagai gubernur lebih banyak berkegiatan di luar lingkungan kantor bertemu langsung dengan masyarakat. Sementara, Basuki sebagai wakil gubernur akan berada di kantor untuk membenahi birokrasi dan persoalan anggaran. "Jadi, saya di luar, Pak Wakil Gubernur di kantor," jelas Jokowi.

SAPA WARGA: Jokowi dan Basuki menyapa warga usai dilantik 15 Oktober 2012

Namun, Jokowi menambahkan, tidak menutup kemungkinan nantinya pembagian kerja antara dirinya dengan Basuki sewaktu-waktu berubah. "Ya, nanti kami bisa bergantian mengerjakan tugas," kata Jokowi kepada pers di Jakarta, Rabu, 14 November 2012. Menurut Jokowi, pembagian porsi kerja yang dilakulan semata-mata untuk bagian kerja saja. "Kami sama sekali tidak berpikir pembagian kekuasaan atau pembagian ekonomi. Sama sekali tidak berpikir ke arah sana," tegasnya.

Basuki mengungkapkan, dia mendapat arahan dari Gubernur Jokowi untuk melakukan penghematan dengan memotong semua anggaran sebesar 25%, untuk dapat disisihkan membeli tanah guna membangun rumah-rumah deret dan rumah susun untuk rakyat kurang mampu. Salah satu kegiatan Basuki yang mengundang perhatian publik adalah rapat dengan pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) pada dua pertemuan terpisah, Kamis (8/11/2012) membahas anggaran 2013. Dalam rangka transparansi anggaran yang menjadi salah satu tekad dan janji Jokowi-Basuki, rekaman video rapat tersebut diunggah di akun Pemprov DKI di Youtube sehingga bisa diakses dan diunduh publik. Hanya dalam tempo 10 hari, video tersebut telah ditonton lebih sejuta orang.

Dalam rekaman video tersebut, Wakil Gubernur tampak memperlihatkan sikap tegas terhadap dinas-dinas yang tidak dapat memangkas anggarannya pada tahun depan. Basuki bahkan menantang para pejabat dinas untuk melakukan perbaikan anggaran. Pada pertemuan dengan Dishub pada Kamis pagi, Basuki meminta agar Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono beserta aparat lain di dinas tersebut mencari cara untuk menghemat anggaran. Basuki mengatakan, pemangkasan anggaran ini dilakukan karena Pemprov DKI akan menggunakan banyak anggaran untuk membeli tanah di kawasan-kawasan kumuh.

Sore harinya, dalam rapat dengan aparat Dinas PU, Basuki meminta untuk memaparkan langsung anggaran yang diajukan. Lalu, Wakil Kepala Dinas PU Tarjuki berbicara mengawali pembahasan anggaran. Namun, baru beberapa detik Tarjuki menyampaikan kata-kata pembuka, Basuki langsung menyela pembicaraan dan menanyakan apakah semua pagu anggaran yang diajukan oleh Dinas PU telah dipotong sebesar 25 persen sebagaimana telah diminta oleh Gubernur Jokowi. "Tugas saya ini motong anggaran. Tadi waktu di (Dinas) Perhubungan, punya biaya jembatan semua mahal, itu karena hitungan-hitungan dari PU, satuan-satuannya," kata Basuki.

Lalu Basuki mengajukan dua alternatif pembiayaan proyek. Pertama, dia menawarkan agar Dinas PU memotong sendiri semua anggaran yang diajukan sebesar 25 persen. Kedua, dia mengancam akan menghapus proyek-proyek di

VIDEO: Wagub Jakarta Basuki memimpin rapat dengan Dinas PU, diunggah di Youtube

Dinas PU dan akan mengerjakannya dengan anggaran dari biaya operasional Wakil Gubernur. "Yang kedua saya hapus proyek itu, saya pakai uang operasional saya untuk membangun itu. Kasih saya spek (spesifikasi) untuk membangun itu," kata Basuki sebagaimana terekam dalam video tersebut.

Tidak berhenti di situ, Basuki juga mengancam akan mencopot semua pejabat eselon III jika terbukti pihaknya dapat menjalankan proyek-proyek tersebut dengan biaya lebih murah. Basuki menegaskan bahwa semua anggaran itu akan ditayangkan di *website* pribadinya. Ia juga menyatakan bahwa pertemuan itu direkam dan ditayangkan pula di Youtube.

"Paling penting itu PU, PU ini proyeknya banyak. Sekarang saya minta DKI, kita ingin bahwa perbaikan (anggaran) dipotong 25 persen. Kalau Bapak yang minta, Bapak tidak bisa (memotong anggaran), mari kita berdebat, kita ambil contoh, saya yang bangunkan. Tapi kalau saya yang bangunkan, saya akan periksa semua pekerjaan yang lalu, saya akan proses di KPK atau jaksa, saya akan buka koreng lama. Ini kedengarannya tidak enak karena kerjaan saya memang tidak enak," kata Basuki yang sangat yakin bahwa anggaran itu bisa dipotong, bahkan hingga 40 persen.

Kemudian menanggapi permintaan itu, Tarjuki menyatakan bahwa Dinas PU setuju dengan rencana pemotongan anggaran tersebut. Lalu, rapat dilanjutkan dan Basuki mengomentari setiap anggaran yang dianggapnya tidak perlu dilakukan atau terlalu besar.

Mestinya Ditiru Nasional

Berbagai respon dan kritik muncul dengan ketegasan Basuki dalam memimpin rapat tersebut. Sebagian besar publik setuju dan senang atas pengunggahan video rapat tersebut. Namun sebagian menyatakan kurang setuju. Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai gaya kepemimpinan Jokowi-Ahok, khususnya sikap tegas Ahok dalam setiap rapat yang umumnya selalu dengan nada tinggi, memang dibutuhkan. Sebab, menurut Andrinof dalam perbincangan di salah satu siaran televisi pagi 14/11/2012, jika menginginkan birokrasi yang lebih sehat dan lebih baik, kita harus bersusah dahulu.

Dalam dialog tersebut, birokrat senior Siti Nurbaya Bakar juga berpendapat tak ada masalah jika hasil rapat dipublikasi kepada masyarakat karena ini merupakan salah satu cara mewujudkan transparansi yang dilakukan birokrasi terhadap publik. Menurut Siti Nurbaya, hal ini perlu agar masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana perkembangan birokrat dengan dipublikasi kepada masyarakat. "Biarkan masyarakat yang menilai," kata Siti.

Penilaian berbeda dikemukakan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Sutiyoso menilai, sikap Basuki yang emosional saat memberikan arahan tak layak dipertontonkan kepada masyarakat luas melalui pengunggahan rekaman video di Youtube. Dia mencontohkan kepemimpinan dalam militer, seorang panglima tidak akan memenangkan peperangan tanpa ada anak buah di garis depan. Dia menyebut para kepala dinas itu selevel kolonel, di mana seorang perwira menengah tidak boleh dipermalukan di depan anggota, apalagi kepada publik. Menurut Sutiyoso, tidak perlu semua situasi rapat dipublikasi untuk menunjukkan transparansi. Dia menyebut, transparansi bisa dilakukan dengan menggelar konferensi pers.

Sementara, Jokowi sendiri menegaskan Pemprov DKI ingin menciptakan transparansi dalam berbagai aspek pemerintahan, salah satunya rapat-rapat dinas yang digelar diunggah di Youtube. Jokowi menyebut alasan dan tujuan pengunggahan video rapat tersebut karena dia ingin masyarakat tahu bagaimana pemerintahan berjalan. "Masyarakat biar ngerti situasi rapat dengan berbagai pihak," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (14/11/2012). Jokowi menegaskan, tak ada alasan lain dalam mengunggah video di youtube itu. Dia pastikan hal itu bukan karena alasan pencitraan. "Biar masyarakat ngerti, itu saja," tutur Jokowi.

Sedangkan pandangan publik tampaknya disuarakan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia dan Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan. Yuna mengatakan, model transparansi gaya Basuki ini dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain, kementerian, ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lain. Menurutnya, hal itu jadi preseden yang baik untuk *role model* di daerah-daerah lain, termasuk di negara kita untuk pembahasan anggaran. "Sebab pembahasan anggaran ini hanya sedikit saja yang tahu dan ini jadi betul-betul terbuka," ujar Yuna seusai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurutnya, sangat baik bila kementerian dan DPR dapat meniru hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Joko Widodo dan Basuki itu. "Tak hanya pembahasan awal anggaran yang dibeberkan kepada publik, tetapi juga saat terjadi perubahan anggaran atau ingin menaikkan anggaran. Hal itu dapat diunduh dalam website kementerian masing-masing," kata Yuna. Menurutnya, transparansi anggaran ke hadapan publik ini dapat mencegah terjadinya kongkalikong antara pejabat pemerintah.

Itulah gebrakan Basuki. Dia memang terkenal dengan prinsip Bersih, Transparan dan Profesional dengan akronim BTP, sesuai akronim namanya Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Baik ketika menjabat Bupati Belitung Timur, maupun saat menjadi anggota DPR, BTP membuka anggarannya di situs pribadinya (ahok.org). Dia bertekad menerapkan tranparansi itu di Pemprov DKI Jakarta. Basuki menyadari bahwa gerakan transparansi anggaran yang diusungnya itu akan mendapat perlawanan. Namun dia terus menyalakan nyalinya.

Barangkali sangat baik dikutip ucapannya ketika memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (12/11/2012). Dia menilai perjuangan masyarakat saat ini masih relatif enteng, setidaknya bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan para pahlawan saat berjuang memperebutkan kemerdekaan. "Kita belum bercucuran darah, perjuangan kita relatif enteng," kata Basuki kepada pers. Dia menyebut, saat ini tantangan terbesar masyarakat adalah berperang melawan bangsa sendiri, berperang melawan dirinya masing-masing, sebagaimana pernah dikemukakan Presiden pertama Indonesia Soekarno.

Menurut Basuki, semua perjuangan masyarakat di era saat ini belum sebanding dengan apa yang telah dilakukan para pahlawan. "Itulah mengapa Hari Pahlawan Nasional harus terus diperingati setiap tahunnya sebagai ungkapan hormat kepada para pahlawan," jelasnya. Dia menegaskan sekarang kita hanya berjuang agar tidak korup dan harus adil melayani masyarakat. Itu, menurutnya, sesuatu yang belum sebanding dengan perjuangan pahlawan. "Kita belum bercucuran darah," katanya. ■ **bi-tsl**

Polri, Tegakkan Kepala!

Surat Terbuka Buat Kapolri

Kisruh antara Kepolisian RI (Polri) versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mereda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima poin solusi untuk mengatasinya. Kelima poin pidato Presiden di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam tersebut lebih menekankan agar Polri berlapang dada 'mengalah'.

Bahkan pidato Presiden tersebut juga bermakna arahan dan perintah buat Polri, utamanya Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Terutama tiga poin (1,2 dan 3), yakni: Pertama, penanganan hukum dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo agar ditangani KPK dan tidak pecah. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung; Kedua, keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kombes Novel Baswedan, Presiden memandang tidak tepat baik dari segi timing maupun caranya; Ketiga, perselisihan yang menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK perlu diatur kembali dan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Bisa dimaklumi jika Kapolri dan jajarannya merasa sangat terpukul atas pidato Presiden selaku pimpinan tertinggi tersebut. Dari raut wajah dan bahasa tubuh Kapolri saat mendampingi Presiden menyampaikan pidato tersebut, terpancar bagaimana suasana kebatinan jajaran Polri. Sebagaimana dikemukakan seorang Inspektur Jenderal Purnawirawan Polri, untuk menggambarkan suasana kebatinan Polri, jika diizinkan akan mengibarkan bendera setengah tiang. Berkabung!

Tapi, sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan, Polri tidak perlu larut dalam suasana batin yang dilemahkan. Mari, tegakkan kepala. Sebab, diyakini Presiden pun tidak berniat untuk melemahkan semangat pengabdian Polri. Hal itu bisa kita lihat dari kalimat penutup pidatonya. Presiden mengatakan: "Polri juga mencatat prestasi di sejumlah bidang misalnya pemberantasan terorisme, kejahatan narkotika dan kejahatan jalanan. Juga prestasi pengamanan dan pengaturan kegiatan nasional mudik Lebaran dan peringatan hari-hari besar yang lain. Semangat, energi dan kinerja seperti ini saya yakini dapat dijadikan modal untuk bersinergi dengan KPK untuk melaksanakan tugas memberantas korupsi."

Kapolri Jenderal Timur Pradopo

Memang harus diakui bahwa dalam pemberantasan korupsi, jajaran Polri belum menunjukkan integritasnya. Hal ini terlihat oleh publik dari kekurangikhlasan Polri menyerahkan pengusutan dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri, sebelum Presiden memerintahkannya. Di samping itu, masih banyak keluhan tentang cara-cara Polri menangani dugaan korupsi. Masih banyak oknum Polri di berbagai daerah yang 'memeras' pejabat daerah dengan ancaman mengusut kasus korupsi. Wartawan media ini beberapa kali menerima keluhan seperti itu.

Padahal dari segi sumber daya manusia, Polri jauh lebih hebat dari KPK. Polri memiliki jajaran penyidik yang terdidik dan terlatih. Terbukti bahwa para penyidik Polri yang bertugas di KPK-lah yang membesarkan KPK. Pertanyaan, kenapa para aparat penyidik Polri yang bertugas di KPK bisa menjadi penyidik handal memberantas korupsi, sementara di institusi induknya sendiri tidak bisa handal?

Sebenarnya pertanyaan ini sudah harus dijawab oleh Polri sejak berdirinya KPK. Memang, KPK diperlukan karena Polri dan Kejaksaan belum berfungsi optimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, semestinya Polri sudah sejak dini bercermin dan berkemas membenahi jajarannya.

Memang, membenahi integritas moral empat ratusan ribu jajaran Polri untuk teguh dalam pengabdian pemberantasan korupsi, bukanlah hal yang mudah. Tapi bukan berarti hal itu menjadi alasan pembenaran langkah pembenahan menjadi tidak dilakukan.

Tidak ada kata terlambat. Maka, kepada Kapolri kita sampaikan surat terbuka ini supaya belajar dari pengalaman para penyidik Polri di KPK. Mungkin membenahi integritas moral antikorupsi semua penyidik Polri sekaligus tidak mudah. Tetapi jika dilakukan dengan membentuk tim khusus, semacam Densus 88 Antiteror, dengan menyeleksi penyidik Polri secara ketat yang bisa bergabung dengan Tim Khusus Antikorupsi tersebut, pastilah akan lebih baik hasilnya.

Bahkan bila perlu, Polri membentuk Direktorat Khusus Antikorupsi, dengan memberinya kewenangan dan fasilitas-fasilitas khusus, serta dengan personil yang sudah terseleksi dan teruji. Termasuk jaminan independensi penyidik dan jajaran Direktorat Khusus Antikorupsi tersebut. Jangan lagi Tim Khusus Antikorupsi digabung dengan Bareskrim. Dengan demikian, Polri akan dapat menegakkan kepala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tidak mustahil akan lebih baik dan lebih perkasa dari KPK. Bukankah Polri telah membuktikan kehandalan penyidiknya di KPK? Sebagai pembanding, bukankah Polri telah membuktikan kehandalan Densus 88 dalam pemberantasan teroris yang tidak kalah dengan Gultor 81 Kopassus? ■ **crs**

Perkuat dan Awasi KPK

Pemerintah dan DPR sepakat mengagendakan (Prolegnas) revisi UU KPK. KPK dan publik bereaksi menenggarai revisi tersebut sebagai bagian dari upaya sistematis membonsai KPK: corruptors fight back.

TENGAHI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengahi Ketua KPK Abraham Samad dengan Kapolri Timur Pradopo

Indikasi upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sangat nyata. Telah dirancang oleh DPR dan telah pula disepakati pemerintah masuk agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012 untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan memangkas beberapa kewenangan strategis KPK, antara lain dalam hal wewenang penuntutan (ditiadakan), penyadapan (dibatasi dan dipersulit) dan tidak adanya kewenangan SP3 - surat perintah penghentian penyidikan (diadakan) serta perlu dibentuk dewan pengawas KPK.

Dalam hal kewenangan penuntutan. Semua kata penuntutan dalam draf revisi RUU KPK itu dihilangkan dari seluruh pasal, mulai dari Pasal 1 ayat 3, Pasal 6-7-8-9. Khusus dalam pasal 6c dimana KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi; Dalam draf revisi, berubah menjadi KPK bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Tidak ada lagi tugas dan kewenangan penuntutan.

Draf penghilangan kewenangan penuntutan oleh KPK ini mengundang pertanyaan dari berbagai pihak, apakah para politisi di Komisi III DPR tak memahami maksud pembentukan KPK dahulu. KPK dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan belum optimal menangani kasus korupsi. Konsiderans (b) UU KPK berbunyi bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM selaku ketua tim perumus UU KPK mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa dulu banyak kasus korupsi yang terungkap tapi tidak sampai ke pengadilan. Telah dilakukan penyidikan tapi penuntutan mandek bertahun-tahun. 'Sehingga tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diberikan satu atap di KPK," jelas Romli. Bahkan ketika itu, Prof. Romli sempat mengusulkan agar kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dikhususkan menjadi wewenang tunggal KPK; Polri dan kejaksaan tidak lagi bertugas menangani tindak pidana korupsi. Namun, usulan ini mendapat protes dari Polri dan kejaksaan, sehingga dirumuskan adanya kewenangan KPK dalam koordinasi dan supervisi.

Apa akibatnya jika tugas penuntutan KPK ditiadakan dan diserahkan kepada kejaksaan? Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, jika penuntutan dikembalikan kejaksaan, maka kerja KPK akan sia-sia. "Hasil penyidikan di KPK bisa tersendat di kejaksaan dengan berbagai alasan. Kondisi itu kerap terjadi dalam penyidikan di kepolisian," jelasnya.

Ray Rangkuti balik bertanya: "Bagaimana cara KPK memaksa kejaksaan? Bagaimana pula jika pihak kejaksaan sendiri yang tersangkut korupsi?" Menurutnya, hal ini akan sangat menyulitkan KPK bisa optimal memberantas korupsi. "KPK sudah sibuk tangkapi banyak orang, ditetapkan tersangka tapi tidak masuk ke pengadilan. Kejaksaan katakan ini belum memenuhi unsur, bisa macet semua," gerutu Ray.

Begitu pula dalam hal penyadapan (Pasal 12) yang selama ini telah terbukti sebagai kewenangan pamungkas bagi KPK untuk membongkar tindak pidana korupsi, dalam draf RUU, DPR menambahkan satu pasal baru yakni Pasal 12A, yang berisi persyaratan penyadapan. Antara lain harus meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri (ayat 2). Walaupun dalam ayat 3 disebut bahwa dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapat izin tertulis dari ketua pengadilan negeri. Tapi dalam ayat 4 ditegaskan pula, pimpinan KPK harus meminta izin tertulis dari

ketua pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 jam setelah dimulainya penyadapan. Pasal itu juga mengatur lamanya penyadapan tidak boleh lebih dari tiga bulan, walaupun bisa diperpanjang satu kali tapi dengan ijin kembali.

Pembatasan penyadapan ini mendapat protes keras dari berbagai pihak. Badan Legislasi (Baleg) DPR sendiri sebenarnya masih mengkaji Pasal 12A ini. Bahkan menurut Baleg DPR, bila pasal 12A itu diterapkan, akan membuka peluang terjadinya kebocoran informasi dari pihak KPK melalui pihak Ketua Pengadilan Negeri. Mereka juga mengkaji bahwa semakin panjang birokrasi penyadapan, maka dikhawatirkan akan memperlama proses penyadapan tersebut sehingga kemungkinan data atau bukti yang hilang akan semakin besar. Baleg juga mengkaji dapat terjadi *conflict of interest* jika kasus tersebut menyangkut instansi yang memberi ijin penyadapan, dalam hal ini pengadilan negeri.

Namun kecurigaan publik tentang adanya niat DPR dan Pemerintah mengebiri kewenangan KPK sudah tidak bisa dibendung. Kendati para anggota Komisi 3 DPR berbusa-busa menjelaskan bahwa hal itu masih draf mentah yang masih panjang proses pengkajiannya, termasuk uji publik dengan berbagai pihak, tapi adanya draf tersebut telah cukup bagi publik tentang adanya niat dan upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Publik pun bergerak memberi dukungan kepada KPK dan menentang setiap upaya memperlemah KPK.

Sebagaimana disuarakan Ray Rangkuti yang mengaku tak habis pikir mengapa para politisi Komisi III berani menantang risiko dikritik publik dengan merevisi UU KPK. Kendati berbagai argumen agar kewenangan KPK tak dikurangi telah disampaikan, namun DPR tetap ingin merevisinya. "Saya tidak paham kenapa anggota Dewan nekat mengebiri kewenangan KPK. Kecuali mereka bisa menjelaskan KPK tidak menguntungkan bagi bangsa ini," ujar Ray Rangkuti.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita

KPK-DPR: Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR

Kekuatiran adanya upaya sistematis memperlemah KPK semakin mengundang kecurigaan tatkala Polri 'melakukan perlawanan' (tidak ikhlas) ketika KPK menggrebek Mabes Korlantas Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Simulator SIM. Polisi bereaksi dengan dalih telah duluan mengusut kasus tersebut, apalagi penggrebekan itu dilakukan tanpa minta izin lebih dulu. Polri pun menarik puluhan penyidiknya dari KPK. Bahkan mendatangi KPK untuk menangkap seorang penyidik KPK yang berasal dari Polri tapi memilih menjadi penyidik tetap KPK serta sedang bertugas menyidik Simulator SIM Korlantas Polri.

Tindakan Polri ini mengundang reaksi berbagai kalangan. Malam ketika aparat Polri mendatang KPK (5/10/2012) berbagai kalangan berdatangan ke KPK memberi dukungan 'Selamatkan KPK'. Tidak tertutup kemungkinan kondisi itu juga bisa dimanfaatkan 'penumpang gelap' untuk memperkeruh situasi atau melampiaskan dendam kesumat yang terpendam sejak lama. Pimpinan KPK pun ikut bergabung dengan massa pendukung KPK dan bahkan ikut berteriak lewat mikrofon (meneriakkan KPK hendak dihabisi) layaknya sikap demonstran dan para aktivis lembaga swadaya masyarakat, disiarkan pula secara langsung oleh televisi.

Maka, atas kondisi dan tekanan publik tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato (keterangan pers) di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam. Presiden menegaskan lima poin sebagai solusi mengatasi perseteruan antara Kepolisian RI (Polri) dan KPK agar tidak berlarut-larut. Kendati dinilai sudah agak terlambat dan disampaikan atas desakan publik, sejumlah solusi yang disampaikan Presiden SBY tersebut mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, kendati masih ada saja orang yang mengkritisinya.

Lima poin solusi yang disampaikan Presiden tersebut, kendati mungkin masih akan menghadapi berbagai prosedur dan kesulitan dalam implementasinya, tapi 'suara' Presiden tersebut sudah dapat meredakan situasi, baik tentang revisi UU KPK (Pemerintah dan DPR versus KPK dan Publik) maupun perseteruan antara Polri versus KPK. Besoknya, para politisi di DPR ramai-ramai 'sembunyi tangan', Komisi 3 mengembalikan draf revisi UU KPK ke Baleg. Begitu pula Polri harus mematuhi solusi dari Presiden, kendati dalam suasana kebatinan "jika

diizinkan mereka akan mengibarkan bendera setengah tiang' sebagaimana disebut seorang inspektur jenderal purnawirawan.

Perihal rencana revisi UU KPK, Presiden mengatakan sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. "Tetapi saya pandang kurang tepat untuk dilakukan sekarang ini. Lebih baik kita tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi," kata Presiden.

Pernyataan Presiden ini mendapat sambutan dari berbagai pihak. Prof. Romli Atmasasmita sebagai orang paling berperan dalam membinani lahirnya UU KPK tersebut juga menyadari bahwa UU KPK itu tidaklah tabu untuk direvisi. Namun, sesuai dengan kondisi pemberantasan korupsi hingga saat ini adalah lebih baik untuk mengoptimalkan penerapan UU KPK itu secara tepat dan optimal.

Romli berpendapat kita butuh sebuah lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi yang masih merajalela. Prof Romli-lah yang pertama kali menyebut tindak pidana korupsi itu sebagai *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa) tatkala tengah merumuskan UU KPK itu bersama DPR. Dan, memang untuk itulah KPK dilahirkan guna menjalankan tugas memberantas korupsi yang telah mewabah, di segala rumpun dan level kekuasaan, sementara lembaga penegak hukum yang ada (Polri dan kejaksaan) dipandang tidak mampu menjalankan fungsinya. Sehingga didirikan KPK yang independen dan memiliki kewenangan-kewenangan luar biasa pula *(superbody, extra-ordinary measures)*.

Prof. Romli memberi catatan, usulan revisi UU KPK 2002 harus terkait dengan perubahan UU Antikorupsi 1999/2001 sebagai akibat ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi 2003 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Menurutnya, dalam perspektif masa depan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, perubahan harus bertitik tolak pada perbedaan kondisi praratifikasi dan pascaratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi 2003. *Pertama*, pada masa praratifikasi konvensi, Indonesia memiliki dua undang-undang yaitu UU Antikorupsi 1999/2001 dan UU KPK (2002). UU Indonesia tersebut beranjak pada adagium bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) sedangkan Konvensi PBB 2003 hanya mengenal korupsi sebagai kejahatan transnasional. Konvensi tidak mengenal kosakata "*extra-ordinary crimes*" dan "*extra-ordinary measures*".

Kedua, dalam kedua UU Antikorupsi diatur bahwa penanganan korupsi -

Ray Rangkuti

karena adalah kejahatan luar biasa - memerlukan cara-cara penanganan yang bersifat luar biasa pula *(extra-ordinary measures*) dan diperbolehkan menyimpang dari prinsip-prinsip *rule of law* dan *due process of law*. Sedangkan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 tidak memberikan mandat kepada negara peratifikasi untuk menggunakan cara-cara luar biasa tersebut kecuali dibolehkan menggunakan prosedur pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*). Cara tersebut hanya dimandatkan bersifat *non-mandatory obligation*. UU Antikorupsi Indonesia sejak tahun 1999 telah membolehkan prosedur pembuktian terbalik yang bersifat wajib kepada tersangka/terdakwa.

Ketiga, kedua UU Antikorupsi Indonesia mengutamakan pentingnya unsur kerugian negara dalam pembuktian korupsi. Sedangkan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 tidak memandang penting dan relevan kerugian negara dalam korupsi. Saat itu negara peratifikasi konvensi sepakat untuk menghapuskan unsur kerugian negara sebagai unsur konstitutif dalam tindak pidana korupsi.

Keempat, sebagai konsekuensi pengakuan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan memerlukan cara-cara luar biasa, kedua UU Antikorupsi Indonesia telah "menghalalkan" langkah penyadapan, pemblokiran, penggeledahan rumah atau penyitaan tanpa izin pengadilan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 secara tegas melarang tindakan-tindakan yang melanggar prinsip *due process of law; non-self incriminating evidence* dan *presumption of innocence* serta hak-hak dasar yang diatur dalam konstitusi negara pihak.

Kelima, Konvensi PBB 2003 telah menugaskan negara peratifikasi untuk memasukan strategi pencegahan dan pengembalian aset korupsi ke dalam perundang-undangan nasional di samping strategi kriminalisasi dan pemberantasannya. Kedua UU Indonesia tersebut tidak secara khusus mengatur strategi pencegahan dan pengembalian aset korupsi.

Perihal penting adanya pengawasan atas kewenangan-kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK tersebut, Prof. Romli menyadari hal itu memang sangat penting, terutama untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Maka, Romli sependapat perlu adanya pengawasan terhadap KPK. Apakah pengawasan itu perlu dibentuk secara formal dalam sebuah lembaga atau dewan pengawas? Romli menyebut hal itu memang perlu tetapi harus lebih dulu melalui kajian akademis yang mendalam.

Namun, menurut Prof. Romli tanpa adanya semacam Dewan Pengawas KPK formal pun, bukan berarti KPK bisa bertindak seenaknya. Sebab dalam alam demokrasi saat ini, publik, *civil society*, akademisi, aktivis dan berbagai elemen masyarakat bisa langsung mengawasinya. Maka, dia pun mengajak semua elemen bangsa untuk tidak hanya larut memberi dukungan kepada KPK, tetapi juga harus mengawasinya.

Prof. Romli mengingatkan, sebaik apa pun penyusunan UU, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik. Dia melihat hukum dalam realitas hanya ada dalam genggaman kekuasaan manusia sehingga karakter hukum bisa berubah-ubah, bergantung pada karakter manusia yang menggenggam dan menjalankannya. Menurutnya, kegagalan kita selama 60-an tahun merdeka dalam pembangunan hukum dan penegakan hukum adalah karena sering dilupakannya karakter dan moral para pemegang amanah penegakan hukum.

Jadi, menurutnya, sebaik apa pun UU KPK, penerapannya sangat ditentukan para aparatnya, baik penyidik maupun pimpinannya (*The man behind the gun*). Karena itulah pada saat penyusunan UU KPK, kata Romli, timbul istilah 'setengah malaikat' untuk menggambarkan siapa (syarat) yang layak menjadi pimpinan KPK. Dalam kaitan inilah Romli mengajak elemen masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi KPK. Sementara, para pimpinan KPK juga diharapkannya untuk berbesar hati menerima pengawasan dan kritik dari pihak mana pun. Sehingga bangsa ini bisa menemukan cita dan idealisme penegakan hukum yang berkeadilan dalam kenyataan oleh KPK dan penegak hukum lainnya. ■ **tsl**

Superbody Koq Cengeng?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pimpinan KPK yang sering membawa persoalan ke area publik. Sering curhatnya KPK malah mengundang pertanyaan: Superbody koq cengeng?

Presiden SBY dalam pidatonya menyikapi kisruh KPK dan Polri menyarankan agar KPK sebaiknya menyelesaikan masalah melalui kerja sama, komunikasi, dan koordinasi terlebih dahulu daripada kerap curhat dan membawa persoalan ke area publik, media dan LSM. Presiden juga berharap KPK - yang disebutnya sebagai motor dalam pemberantasan korupsi - untuk berkenan mendengar kritik. "Jika didengar itu akan meningkatkan kerja KPK yang sudah baik saat ini," kata Presiden.

Perihal adanya elemen KPK yang diduga terlibat pelanggaran hukum, Presiden juga menyatakan tidak boleh serta-merta dikatakan kriminalisasi KPK. "Kalau kita merujuk pada UUD 45 semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Sehingga bila terbukti ada kejahatan yang terbukti oleh WNI mestilah hukum itu ditegakkan, apakah itu dia presiden, anggota Polri, anggota DPR, anggota KPK, wartawan, TNI dan siapa pun. Kesamaan kedudukannya dalam hukum dengan pemahaman konstitusi maka jika ada anggota KPK melakukan pelanggaran hukum, tidak boleh dikatakan kriminilisasi KPK," kata Presiden.

Pernyataan Presiden SBY ini tidak mengada-ada. Ada beberapa kejadian yang membuktikan hal itu. Di antaranya, masih belum disetujuinya pembangunan gedung KPK yang lebih representatif, bahkan mengajak publik mengumpulkan koin. Kemudian berbagai pernyataan mengenai penarikan penyidik Polri yang bertugas di KPK. Terakhir, yang terbilang paling seru, ketika elemen Polri mendatangi KPK untuk 'berkoordinasi' menangkap Kompol Novel Baswedan yang tengah bertugas menyidik dugaan korupsi Simulator SIM. Novel disebut terlibat tindak pidana saat bertugas di Polda Lampung. Malam itu (5/10/2012) para pimpinan KPK membawa persoalan ke area publik, curhat ke media, aktivis antikorupsi dan lain-lain.

Rakyat menyaksikannya melalui layar televisi yang menyiarkannya secara langsung hingga dini hari. Berbagai pihak berbondong-bondong datang ke kantor KPK. Mereka memberi dukungan kepada KPK, lengkap dengan spanduk besar 'Selamatkan KPK'. Mereka pun berorasi dan menyampaikan 'Pernyataan Rakyat'. Spontanitas dukungan rakyat berbagai elemen rakyat tersebut tentulah sangat baik untuk menjaga keberadaan KPK dari gangguan (serangan balik) dari pihak-pihak yang ingin melemahkan bahkan membubarkan KPK. Sebab, memang tidak bisa dipungkiri adanya berbagai upaya sistematis untuk membonsai KPK, yang oleh mantan Ketua KPK Jilid I Taufiqurrahman Ruki menyebutnya *corruptors fight back*.

Tapi, menjadi kurang tepat, manakala para pimpinan KPK bersikap seperti demonstran dan sering curhat ke area publik. Ikut berteriak lewat mikrofon layaknya demonstran menyatakan: "saudara-saudara KPK hendak dilenyapkan". Lawan! Tidakkah lebih elok bila para pimpinan KPK sebagai lembaga super-

Presiden: Lima Solusi Atasi Kisruh KPK-Polri-DPR

Adapun kelima poin sebagai kesimpulan utama yang ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam, sebagai solusi dan langkah-langkah yang mesti dilaksanakan untuk mengatasi perseteruan Polri dan KPK (plus DPR) tersebut adalah:

1. Penanganan hukum dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo agar ditangani KPK dan tidak pecah. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.
2. Keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kombes Novel Baswedan saya pandang tidak tepat baik dari segi *timing* maupun caranya.
3. Perselisihan yang menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK perlu diatur kembali dan akan saya tuangkan dalam peraturan pemerintah, saya berharap nantinya teknis pelaksanaan juga diatur dalam MoU antara KPK dan Polri.
4. Rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. Tetapi saya pandang kurang tepat untuk dilakukan sekarang ini. Lebih baik kita tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi.
5. Saya berharap agar KPK dan Polri dapat memperbarui MoU-nya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan serta dilakukan sinergi sehingga peristiwa seperti ini tidak terus berulang di masa depan. Saya mencatat banyak peristiwa di masa lalu yang baik antara Polri dan KPK. Contohnya kerja sama mencari dan menemukan tersangka korupsi yang kabur ke luar negeri berhasil dengan baik sinerginya dan dan kerjasamanya.

Abraham Samad: KPK hendak dihabisi

body yang memiliki kewenangan-kewenangan luar biasa secara 'senyap' melakukan koordinasi dan tindakan-tindakan terukur sesuai kewenangannya? Kenapa harus jadi cengeng minta perlindungan ke area publik. Percayalah, tanpa diminta, publik pasti memberi dukungan kepada KPK atau lembaga manapun yang secara gesit memberantas korupsi.

Jika menyimak keberadaan dan kewenangan KPK, tampaknya sejak awal, penyusun UU KPK sudah menyadari betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi oleh KPK jika semakin gencar memberantas korupsi. Sudah dapat diduga akan semakin gencar pula serangan balik kepada KPK. Jadi, adanya gerakan *corruptors fight back*, baik sporadis maupun sistematis tersebut sudah tak mengherankan. Ibarat gerakan iblis yang selalu menyerang balik setiap perbuatan baik para nabi. Tidak perlu disikapi dengan cengeng dan demonstratif. Tetap saja teguh dalam tugas mulianya, apa pun serangan balik yang menghadangnya. Dengan demikian dukungan publik pun pasti mengalir tanpa diminta.

Tugas para pimpinan dan penyidik KPK adalah tetap fokus pada pelaksanaan tugas mulianya memberantas korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam UU KPK dan UU Pemberantasan Korupsi. Dan ingat, sebaik apa pun kinerja KPK, serangan balik akan selalu ada, bahkan mungkin upaya pembubaran KPK. Tapi, pemberantasan korupsi adalah roh utama reformasi yang berdiam di lubuk hati publik. Karena korupsi sudah sangat menyengsarakan rakyat. Maka tugas KPK adalah fokus memberantas korupsi, seperti mengusut tuntas kasus Bank Century, Hambalang dan lain-lain yang yang belum terungkap ke publik. Dengan kinerja tinggi, maka setiap upaya pelemahan apalagi pembubaran KPK, pasti dilawan oleh publik.

Sebagaimana dikemukakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LiMA) Ray Rangkuti, KPK seharusnya lebih fokus pada kinerjanya dalam memberantas korupsi, dibandingkan terus mengeluarkan pernyataan yang tidak terbukti dan memancing polemik. "Seharusnya pimpinan KPK tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang bisa memancing polemik di tengah masyarakat dalam menanggapi sebuah kasus dugaan korupsi," kata Ray.

Dia mengatakan KPK tidak perlu larut pada polemik pemangkasan kewenangan KPK dan sibuk menerima dukungan. Sebab, dalam pertemuan-pertemuan emosional seperti itu, seringkali pernyataan yang keluar tidak terukur. Ray juga menyayangkan pernyataan salah satu pimpinan KPK yang menyebut tidak memerlukan presiden dan DPR dalam memberantas korupsi. Menurutnya, sebaiknya KPK justru memperlihatkan kerjasama dengan lembaga lain untuk memberantas korupsi. Dia berharap, sebaiknya KPK lebih waspada dalam mengeluarkan pernyataan demi terus menjaga semangat pemberantasan korupsi yang saat ini cukup tinggi di tengah masyarakat.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman, Sabtu (6/10/2012). Dia menyebut KPK tidak dapat memberantas korupsi sendiri. KPK perlu bermitra dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lain, baik dalam hal sumber daya manusia, manajerial, pencegahan dan penindakan. ■ **tsl**

Publik yang menamakan diri Komite Penyelamat KPK, memberi dukungan kepada KPK 5/10/2012 malam

Sejak awal rencana mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menghadapi upaya pelemahan. Apalagi setelah KPK menunjukkan 'keberanian' dan independensinya terutama pada awal kepemimpinan KPK Jilid 2, upaya pelemahan KPK, bahkan kriminalisasi pimpinannya, semakin gencar, yang oleh Ketua KPK Jilid 1 Taufiqurrahman Ruki menyebutnya: corruptors fight back.

Tim perumus pembentukan KPK yang dipimpin Prof. Dr. Romli Atmasamita pada awal penyusunan draf UU KPK memulainya dengan landasan berpikir bahwa era reformasi menuntut segala perubahan yang sifatnya total, terhadap kondisi penegakan hukum, sosial ekonomi, sebagai akibat dari warisan Pemerintahan Orde Baru yang dipandang oleh masyarakat pada waktu itu sangat penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian ketika itu, sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.

Maka, dalam draft awal KPK, tim merumuskan, seluruh tugas wewenang Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani perkara korupsi dilepaskan dan dilimpahkan, bahkan dimonopoli oleh KPK. Jadi dalam draft awal ini, diusulkan agar KPK memonopoli fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Polri dan Kejaksaan tidak lagi melaksanakan fungsi tersebut. Draft RUU KPK dengan model ini diteruskan ke DPR oleh pemerintah sekalipun di dalam tim penyusun

Kisah Fungsi Koordinasi KPK

terjadi perbedaan sengit soal fungsi tersebut karena aspirasi rakyat ketika itu tidak ada kepercayaan terhadap Polri dan kejaksaan untuk menangani korupsi.

Draft awal ini dalam diskusi dengan DPR mendapatkan reaksi keras terutama dari Kejaksaan dan Kepolisian. Bahkan wakil kejaksaan dan kepolisian selalu mempersoalkan kegunaan keberadaan lembaga baru (KPK) dalam sistem peradilan pidana (SPP) dengan merujuk kepada KUHAP (UU nomor 8 Tahun 1981) yang hanya mengakui Polri dan Jaksa. Mereka berpandangan bahwa pembentukan KPK bertentangan dengan KUHAP.

Romli yang mewakili pemerintah dalam pembahasan di DPR tersebut berdalih, perintah pembentukan KPK dengan UU telah menjadi ketentuan UU nomor 31 Tahun 1999 khusus Pasal 43. Jika tidak dilaksanakan oleh pemerintah maka pemerintah telah melanggar UU alias ada alasan dilakukan "impeachment" terhadap presiden.

Akibat kuatnya lobi-lobi pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam pembahasan di DPR, maka draft tersebut hampir menemui jalan buntu. Sampai akhirnya Romli menemukan solusi dari kebuntuan tersebut dengan mengaitkannya pada prinsip komplementaritas dalam Statuta ICC (1998) dalam hal pelanggaran HAM berat. Prinsip ini menegaskan bahwa kompetensi ICC dalam hal terjadi pelanggaran HAM berat di suatu negara adalah sebagai sarana yang bersifat "ultimum remedium." Artinya, jika negara yang bersangkutan tidak mau dan tidak mampu melaksanakan peradilan atas pelanggaran HAM berat tersebut, maka ICC akan mengambil-alih persidangan perkara tersebut.

Berangkat dari prinsip komplementaritas itu, maka Romli memasukkan ketentuan KPK wajib koordinasi dan melakukan supervisi (dalam Pasal 6 huruf a dan b), namun jika Polri dan kejaksaan tidak mau atau tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya karena sesuatu hal maka KPK akan mengambil-alih (*take over*) perkara tersebut.

Dengan konsep rumusan baru yang didasarkan pada prinsip komplementaritas itu, maka terjadilah kompromi dan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan. Diterimanya konsep baru fungsi, tugas dan wewenang KPK dalam hubungan dengan Polri dan kejaksaan merupakan langkah strategis "mundur selangkah untuk maju dua langkah". Hal mana, dengan diterimanya rumusan baru itu maka tujuan awal "memonopoli" penyelidikan, penyidikan dan penuntuan, sesungguhnya telah tercapai. Sebab prinsip komplementaritas itu dibarengi dengan memberi perkuatan wewenang luar biasa (extra-ordinary measures) kepada KPK. Apalagi, kendati instansi Kepolisian dan Kejaksaan masih dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, akan tetapi jika kedua institusi itu tidak mau dan tidak mampu, maka KPK memiliki kewajiban untuk mengambil-alih.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita bersama tim persiapan pembentukan KPK studi banding ke LN

Kemudian, berlanjut perdebatan alot dalam penyusunan UU KPK sekitar hubungan KPK dengan Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana agar ada koordinasi dan sinkronisasi tugas dan wewenang sehingga dicegah tumpang tindih.

Sehingga muncullah pada Pasal 6, perihal tugas KPK: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lalu dengan fungsi supervisi (b) itu, setiap langkah Polisi dan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, diwajibkan memberitahukan kepada KPK, dan sebaliknya KPK diwajibkan mengawasi langkah-langkah itu. Jadi ada dua hal, dalam rangka pengawasan, yakni: 1) KPK bisa menilai apakah yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan itu berjalan atau tidak, efektif atau tidak; 2) sebaliknya Kepolisian dan Kejaksaan harus jujur dan berterus-terang bahwa yang dia sedang tangani tidak bisa dilanjutkan karena berbagai hal, intervensi dan sebagainya. Dalam hal itulah KPK dapat melakukan pengambilalihan sehingga muncullah Pasal 8, dan Pasal 9, alasan-alasan pengambilalihan begitu banyak, disusun sedemikian rupa dan disetujui waktu itu oleh DPR.

Bahkan Pasal 50 sudah menegaskan bagaimana koordinasi antara ketiga institusi ini dalam menangani pemberantasan korupsi. Di situ sudah disepakati jika Polisi memulai penyidikan atau Kejaksaan mereka wajib memberitahu kepada KPK. Tetapi jika KPK memulai, mereka harus berhenti melakukan penyidikan, tidak boleh dilakukan.

Tetapi sejak KPK jilid satu, satu-satunya fungsi yang sangat lemah dalam pemberantasan korupsi dalam hubungan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan adalah fungsi koordinasi dan supervisi. Bahkan berulangkali terjadi kekisruhan. ■ **crs**

Tujuh Syarat Pemimpin Nasional

Wawancara Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan mencermati kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial Indonesia, pemimpin nasional harus memenuhi tujuh syarat minimal.

WAWANCARA: Wartawan Berita Indonesia saat mewawancara Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

Agus Suhartono menjelaskan untuk menjadi Presiden RI yang merupakan negara besar dengan luas wilayahnya, jumlah penduduknya, keragaman sukunya, jumlah bahasa daerahnya, jumlah suku bangsanya, tingkat sosial masyarakat, kondisi geografinya, membutuhkan seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk benar-benar mencurahkan seluruh kemampuan intelektual, spiritual, emosional pada pengabdian kepada bangsa dan negara yang dilandasi dengan karakter kepemimpinan yang kuat, memiliki visi dan misi yang jelas, dilandasi dengan sifat-sifat negarawan yang sejati.

Kepemimpinan demikian sangat diharapkan oleh bangsa ini untuk menggapai kondisi masyarakat Indonesia yang lebih baik yang benar-benar mencerminkan kemerdekaan Indonesia yang sebenar-benarnya sesuai dengan Sila Kelima dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi, maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini, Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

Demikian Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjawab pertanyaan Wartawan TokohIndonesia.com dan Majalah Berita Indonesia Ch. Robin Simanullang dan Bantu Hotsan tentang visinya atas NKRI, dalam wawancara eksklusif di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur belum lama ini. Panglima TNI didampingi Kapuspen TNI Laksda Iskandar Sitompul dan Kadispenum Puspen TNI Kolonel Cpl. Minulyo Suprapto. Wawancara dipersiapkan dan difasilitasi Kasubdisgiatblik Dispenum Puspen TNI Letkol Arh Hari Mulyanto.

Simak jawaban Panglima TNI atas sejumlah pertanyaan yang menyangkut visi Indonesia dan kriteria yang harus dipenuhi pemimpin nasional. Apa jawabannya atas pertanyaan: Kira-kira pada tahun berapa Indonesia bisa mencapai kesejajaran agraria dengan kekuatan maritimnya?; Berarti sebaiknya dari Angkatan Laut jadi Presiden supaya visi maritimnya menyala?; Sebagai warga bangsa, putra bangsa yang terpilih menjadi Panglima TNI, kalau misalkan rakyat menghendaki Anda menjadi presiden?; Apa syarat utama yang harus dimiliki seseorang untuk layak jadi pemimpin nasional, khususnya Presiden RI? Semua pertanyaan itu dijawab dengan lugas, tanpa kepentingan sempit diri sendiri.

BI: Sebagai seorang Panglima TNI, bagaimana melihat Indonesia saat ini, apa kira-kira visi Anda tentang Indonesia?

AS: Kalau saya begini, sebelum saya di Angkatan Laut, kalau kita lagi beraktivitas itu memang ada daratan dan lautan. Lautan kita lebih mendominasi, di sisi lain negara kita terkenal dengan negara agraria. Kita mencoba untuk menjadi negara maritim juga tidak mudah. Menurut saya, ke depan ini yang perlu, kita padukan saja antara maritim dan agraris. Dua-duanya bisa berdampingan yang semuanya bisa menghasilkan sumber devisa bagi negara, bisa menyejahterakan masyarakatnya. Dan kalau itu dilakukan, saya kira itu hal yang baik.

Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sebenarnya sudah mengakomodasi kedua-duanya, negara agraris dan maritim sudah mulai diangkat, tapi belum sama. Nanti ke depan bisa berjalan bersama-sama. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa negara kita negara kepulauan. Sumber daya alam kita yang di laut juga cukup banyak manakala dikelola dengan baik. Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa.

BI: Bukankah maritim yang harus lebih diangkat karena potensinya yang demikian lebih besar?

AS: Jadi begini, tidak mudah mengelola kemaritiman kita, tidak mudah. Biaya tinggi, menggunakan teknologi yang tinggi dan memerlukan sumber daya manusia yang cukup. Di sisi lain dari sejarah, Indonesia negara agraris, kalau ditinggalkan pasti tidak akan jalan, semuanya harus dikembangkan. Memang dalam pandangan sekarang bahwa untuk masalah kemaritiman dinaikkan, betul, supaya mengimbangi agraria tadi. Persisnya contohnya seperti ini, maritim misalnya masih sebesar ini, agrarisnya seharusnya sudah sampai di sini, karena itu memang perlu untuk digenjot. Supaya selevel dengan agraris, baru maju.

BI: Kalau menurut Anda, kira-kira pada tahun berapa Indonesia bisa mencapai kesejajaran agraria de-

ngan kekuatan maritimnya?
AS: Sebenarnya tinggal dengan komitmen kita saja mengelola sumber daya maritim itu. Sekarang sudah terlihat hanya pada potensi perikanan yang sudah dikelola meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Tetapi budaya belum dan masih perlu diteruskan. Kemudian eksplorasi kekayaan yang di tengah laut (Migas) sekarang sudah mulai banyak tapi juga perlu terus dilakukan.

Kalau prediksi saya, tinggal kebijakan yang dilakukan mengarah ke mana. Tapi kalau kebijakan menggenjot ini secepat mungkin pasti akan lebih baik.

BI: Berarti sebaiknya dari Angkatan Laut jadi Presiden supaya visi maritimnya menyala?
AS: Ha-ha-ha. Banyak teknorat kita yang bervisi maritim, saya kira tidak harus TNI Angkatan Laut.

BI: Tapi penghayatan dan tantangan maritimnya pasti di Angkatan Laut, karena yang menggumuli laut itu secara sistematis dan mendalam masih di AL?
AS: Tapi tidak harus seperti itu, artinya orang bervisi ke sana itu cukup banyak.

BI: Tapi kita bisa menafsirkan seperti itu, kita bisa berpikir ke arah itu, supaya menempatkan orang itu pada posisi zaman dan kompetensinya. Supaya Indonesia maju harus mendayagunakan potensi lautnya, itu kira-kira?
AS: Iya, kita tidak mendikotomikan. Yang menguasai masalah kemaritiman adalah Angkatan Laut, juga belum pasti.

BI: ***(Ini pertanyaan sebagai Panglima, tidak bakalan mau kali Anda menjawab ini, ha-ha-ha).*** **Tapi sebagai warga bangsa, putra bangsa yang terpilih sebagai Panglima TNI, kalau misalkan rakyat menghendaki Anda menjadi presiden, misalnya gitu. Apa kira-kira?**
AS: Kalau nggak bisa dijawab nggak usah ditanyakan (ha-ha-ha). Nggak, jangan berangan-angan untuk itu.

BI: Kan boleh visinya bukan obsesinya?
AS: Setiap orang harus tahu batas kemampuannya. Jadi harus tahu juga batas kemampuan sehingga sampai di mana ia perlu berpikirnya, sampai di situ saja kali.

BI: Bukan obesesi ya, tapi visi. Kalau Tuhan memberi kesempatan melalui pilihan rakyat. Kalau mengikuti alur pikiran Anda, bukan dari alur obsesi jabatan itu. Tapi kalau itu dihantarkan pilihan rakyat atas kehendak Allah, apa kira-kira?
AS: Jadi begini, karena seseorang itu untuk menuju ke arah ke sana, dia harus menjadi politikus. Harus menjadi politikus dulu. Padahal sekarang TNI tidak boleh berpolitik, jadi jangan tanya itu (ha-ha-ha).

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

BI: Tapi visi politik TNI diyakini masih lebih tajam dari seorang politikus praktis. Kendati TNI tidak berpolitik praktis, bukan berarti visi politiknya malah lebih rendah, kan tidak. Bahkan politik negara yang pasti lebih tinggi dimiliki oleh orang-orang yang terdidik secara sistematis dalam lingkungan TNI?
AS: Jadi pertanyaannya jangan begitu....

BI: Oke. Menurut Anda, apa syarat utama yang harus dimiliki seseorang untuk layak jadi pemimpin nasional, khususnya Presiden RI?
AS: Untuk menjadi Presiden RI yang merupakan negara besar dengan luas wilayahnya, jumlah penduduknya, keragaman sukunya, jumlah bahasa daerahnya, jumlah suku bangsanya, tingkat sosial masyarakat, kondisi geografinya, membutuhkan seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk benar-benar mencurahkan seluruh kemampuan intelektual, spiritual, emosional pada pengabdian kepada bangsa dan negara yang dilandasi dengan karakter kepemimpinan yang kuat, memiliki visi dan misi yang jelas, dilandasi dengan sifat-sifat negarawan yang sejati.

Kepemimpinan demikian sangat diharapkan oleh bangsa ini untuk menggapai kondisi masyarakat Indonesia yang lebih baik yang benar-benar mencerminkan kemerdekaan Indonesia yang sebenar-benarnya sesuai dengan Sila Kelima dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mencermati kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial Indonesia tersebut, pemimpin nasional harus mempunyai syarat minimal sebagai berikut: *Pertama,* **Problem Solver.** Seorang pemimpin dituntut mampu membuat keputusan penting dan mencari jalan keluar dari permasalahan. Sebagai 'nakhoda' adalah yang berkewajiban mengemudikan 'kapal' ke arah yang besar dan benar;

Kedua, **Bersikap Positif.** Setiap

masalah dapat dipandang dari sisi positif dan negatif. Dalam memandang setiap masalah hendaknya lebih banyak dipandang dari sisi positifnya untuk menyelesaikan masalah;

Ketiga, **Komunikasi.** Sebaik apa pun masyarakat akan kehilangan arah bila dibiarkan jalan dalam 'gelap'. Sebagai pemimpin perlu menerangkan sejelas mungkin tentang tujuan bersama yang hendak diraih dan strategi mencapainya;

Keempat, **Menjadi Inspirasi.** Seorang pemimpin harus bisa menerapkan standar dan jadi contoh bagi semuanya; *Kelima*, **Tumbuhkan Motivasi.** Memberikan penghargaan terhadap prestasi sekecil apapun yang dilakukan oleh siapapun, akan menumbuhkan motivasi bagi masyarakat;

Keenam, **Hubungan Baik.** Jalin hubungan profesional dan interpersonal yang harmonis dengan semua kalangan; *Ketujuh*, **Turun Gunung.** Seorang pemimpin akan dihargai apabila ia bersedia turun ke lapangan untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

Evaluasi TNI

BI: Setelah 14 tahun gerakan reformasi, apa evaluasi TNI tentang kondisi bangsa dan negara RI, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Bisa diuraikan dalam setiap bidang?

AS: ***Pertama***, Bidang Ideologi. Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat kembali sesungguhnya Pancasila merupakan pandangan dan pedoman hidup bangsa yang memiliki kekuatan untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa yang tertera dalam lambang negara burung Garuda Pancasila perlu kita pupuk kembali untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara oleh segenap lapisan masyarakat.

Kedua, Bidang Ekonomi. Satu dekade terakhir semenjak digulirkannya era reformasi, bidang ekonomi telah mengalami peningkatan yang berarti, walaupun Indonesia tidak terlepas dari pusaran krisis global yang sebagian besar melanda Eropa dan Amerika, namun karena ketahanan ekonomi nasional yang berbasis pada kemampuan ekonomi kerakyatan yang handal, masih mampu bertahan di tengah pusaran krisis. Di samping itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkisar rata-rata 6,5% sebagai indikasi makin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia baik secara makro maupun mikro walaupun tidak menutup masih terdapatnya berbagai kekurangan yang membutuhkan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Ketiga, Bidang Sosial Budaya. Pengaruh perkembangan globalisasi cukup membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan paradigma dan cara pandang suatu bangsa. Indonesia sebagai bangsa yang hidup dalam pergaulan internasional juga tidak terlepas dari pengaruh tersebut, namun kita bangsa yang memiliki warisan budaya yang luhur hendaknya mampu untuk menangkal setiap budaya asing yang dapat menghancurkan sendi-sendi budaya bangsa, walaupun kita menyadari bahwa dunia saat ini seolah-olah tanpa batas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

Keempat, Bidang Pertahanan Keamanan. Sejak bergulirnya era reformasi TNI telah melakukan perubahan internal sesuai dengan amanat perubahan tentang undang-undang pertahanan negara dari orientasi peran Dwi Fungsi ABRI menuju tatanan baru yang lebih spesifik pada bidang pertahanan negara. Dinyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

BI: Dari apa yang dilakukan/terjadi selama era reformasi (1998-2012), hal-hal apa yang menurut Anda (TNI) yang justru bisa berpotensi mengganggu keutuhan atau memperlemah NKRI?

AS: Kita semua menyadari bahwa perubahan yang terjadi pada era awal reformasi telah memberi ruang yang cukup terhadap berbagai perubahan khususnya menyangkut aturan perundang-undangan yang implikasinya dapat kita rasakan saat ini. Banyak perubahan yang dirasakan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kebebasan dan keterbukaan dalam berbagai bidang khususnya kebebasan untuk mengemukakan pendapat namun menurut hemat saya kebebasan ini sering disalahgunakan secara berlebihan yang tentunya melewati batas-batas koridor aturan yang kita sepakati.

Kebebasan ini sering melukai dan mengganggu kebebasan pihak-pihak lain yang jika kita biarkan akan memunculkan permusuhan antargolongan yang berskala nasional. Tentunya hal ini akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan salah satu sendi utama keutuhan bangsa Indonesia.

Untuk itu, kesadaran dan kesantunan dalam menyampaikan pendapat dalam koridor kebebasan mengemukakan pendapat hendaknya juga memperhatikan

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono didampingi Kapuspen TNI Laksda Iskandar Sitompul saat diwawancara Wartawan Berita Indonesia

kepentingan negara yang lebih besar, apalagi kalau mengingat bahwa adat ketimuran kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi tata krama dan sopan-santun.

BI: Dari hasil evaluasi TNI tentang kondisi bangsa dan negara RI, selama era reformasi maupun sebelumnya, apa sebaiknya yang harus dilakukan agar kondisi bangsa dan negara RI lebih baik?

AS: Perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.

Sebagai dasar negara yang sah dan resmi yang tertuang dalam UUD 1945 saat ini sudah sangat ditinggalkan oleh sebagian besar dari kita semua, seolah-olah kita malu untuk mengatakannya apalagi untuk memelajarinya dan bahkan mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan benegara.

Menurut hemat saya, kita semua hendaknya kembali untuk mengingatnya, memelajarinya, memahaminya, dan selanjutnya melaksanakannya dalam wujud nilai-nilai praktis pada kehidupan sehari-hari yang dimulai dari lingkungan keluarga masing-masing. Saya memiliki keyakinan jika hal itu kita laksanakan dengan penuh kesadaran maka akan terjadi perubahan sikap mental dan perbaikan nasib bangsa yang cukup signifikan di masa yang akan datang.

BI: Bagaimana pandangan Anda tentang kesatuan waktu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tiga zona waktu sebelumnya dan apa dampaknya pada strategi pertahanan negara?

AS: Menurut hemat saya, kesatuan waktu yang direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Indonesia akan lebih banyak memberikan kontribusi yang positif pada berbagai bidang khususnya pada bidang ekonomi jika dihadapkan pada kegiatan perekonomian global. Sedangkan secara spesifik untuk penyelenggaraan pertahanan negara juga memberikan kontribusi yang posistif di antaranya, waktu kerja yang seragam di seluruh satuan TNI di seluruh Indonesia yang memudahkan dari aspek komando dan pengendalian sehingga diharapkan kinerja institusi TNI dapat meningkat.

BI: Sejauh ini bagaimana penilaian Anda tentang kesadaran bela negara dari warga negara RI?

AS: Membangun Kesadaran Bela Negara merupakan sesuatu yang penting dan tidak bisa dianggap suatu hal yang sepele, karena warga negara khususnya generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang tidak dapat didisparitaskan dari sejarah bangsa ini. Kendatipun demikian, kesadaran bela negara yang merupakan hak bagi setiap warga negara jangan pula ditafsirkan hanya berhubungan dengan angkat senjata melawan musuh dari negara luar belaka, melainkan harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam pengejawantahan arti bela negara ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menghilangkan hakekat bela negara itu sendiri.

Kalau kita coba melihat kondisi bangsa kita sekarang, merupakan salah satu indikator bahwa sebagian kalangan pemuda di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran akan pentingnya bela negara. Hal tersebut bisa kita lihat dari segelintir persoalan seperti, kebiasaan pemuda yang lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa lain dan tidak bangga dengan budaya bangsa sendiri. Semakin banyaknya pemuda yang memiliki kesadaran sosial dan perhatian kepada sesama yang ditunjukkan dengan semakin individualisnya pemuda itu sendiri di tengah-tengah masyarakat.

BI: Apa yang seharusnya dilakukan untuk lebih meningkatkan kesadaran bela negara dari warga negara RI tersebut?

AS: TNI untuk lebih meningkatkan kesadaran bela negara adalah dengan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat agar masyarakat memiliki sikap dan perilaku Bela Negara serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang diimplementasikan melalui kerelaan untuk menghormati simbol-simbol negara, memelihara semangat gotong-royong, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan serta memiliki kesadaran untuk rela berkorban dan maju membela negara dan bangsa ketika kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI terusik. ■ **san**

Mudahkan Syarat Capres 2014

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 adalah kesempatan penting bagi rakyat untuk memilih langsung siapa pemimpinnya (Presiden dan Wakil Presiden) untuk lima tahun ke depan. Berbagai kalangan *civil society* berharap dapat muncul beberapa pasangan Capres-Cawapres dari putera-puteri terbaik bangsa. Untuk itu, persyaratan pencapresan sebaiknya dipermudah setidaknya sama dengan Pilpres 2004.

Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) menyaratkan pencapresan dengan *presidential threshold* sebesar 20% kursi DPR atau 25% dari suara sah Pemilu Legislatif nasional. Persyaratan ini menyulitkan munculnya Capres-Capres alternatif seperti terjadi pada Pilpres 2009 lalu, di mana Capres hanya bisa muncul tiga pasangan. Berbeda dengan Pilpres 2004 dengan *presidential threshold* sebesar 4% sehingga memungkinkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Capres dan terpilih.

Kini, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mulai membahas revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres tersebut. Timbul perbedaan pendapat terutama tentang angka ambang batas bagi parpol/koalisi parpol untuk mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Setidaknya berkembang empat opsi.

Opsi pertama pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu legislatif sebelum pelaksanaan pilpres tanpa melihat hasil perolehan suara atau jumlah kursi DPR yang diraih semua parpol. Opsi ini sejalan dengan keinginan Fraksi Partai Gerindra.

Opsi Kedua, pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu legislatif yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif. Opsi ini sejalan dengan usulan Fraksi PPP dan PKS.

Opsi ketiga pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu legislatif yang meraih paling sedikit 15% dari jumlah total kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah nasional. Opsi ini sesuai dengan usulan Partai Demokrat dan PAN.

Opsi keempat pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol/gabungan parpol peserta pemilu legislatif yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 25% dari total jumlah kursi atau meraih 30% suara sah nasional. Opsi ini diusulkan Partai Golkar dan PDIP serta didukung PKB.

Aburizal Bakrie (Golkar)

Namun usulan opsi ini masih penuh dinamika. Masih terbuka kemungkinan masing-masing partai mengubah usulannya. Contohnya, belakangan Demokrat, PDIP, Golkar dan PAN cenderung menyepakati agar ambang batas pengusungan capres untuk 2014 disamakan saja dengan Pilpres 2009. Alasannya, supaya capres-cawapres jangan terlalu banyak, cukup 2-3 pasangan. Dengan demikian Pilpres bisa berlangsung satu putaran, dan yang lebih penting lagi akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap Capres jangan terlalu banyak, untuk mendorong koalisi partai. Menurut Ical, dengan calon yang tidak terlalu banyak akan memudahkan masyarakat menilai dan memilih calon. Dia juga mengatakan dengan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional maka Capres juga akan punya basis dukungan partai yang kuat, sekaligus untuk memperkuat sistem presidensial. Pendapat Ical tersebut sejalan dengan pendapat Akbar Tandjung yang meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk mempertahankan syarat itu jika UU Pilpres direvisi DPR.

Berbeda dengan pandangan Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy yang menilai *presidential threshold* pada Pilpres 2009 sudah tidak ideal. Dia mengusulkan untuk Pilpres 2014 sebaiknya semua parpol yang berhasil lolos ke parlemen (parliament threshold 3,5%) berhak mengusung pasangan kandidat. Menurutnya, kini Indonesia lagi krisis pemimpin, jangan sampai kita kesulitan mendapat figur. "Maka harus memudahkan pencalonan dengan cara menurunkan angka presidential threshold," katanya.

Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid juga menyatakan, kalau ingin banyak figur alternatif berlaga di Pilpres 2014, *presidential threshold* idealnya 3,5% saja. "Kalau tidak, ya jangan diubah sehingga tetap 20% dan 25% seperti 2009," ujarnya.

Partai Hanura berharap persyaratan minimal suara dalam Pemilu untuk mencalonkan presiden dihapuskan. Sebagaimana diungkapkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, Hanura akan mengusulkan agar setiap parpol yang telah menang pemilu dan lolos ambang batas parlemen dapat mengajukan calon presiden, sehingga nggak pusing harus koalisi dan lain sebagainya yang hanya sekadar

Romahurmuziy (PPP)

Hidayat Nurwahid (PKS)

Teguh Juwarno (PAN)

Habiburokhman (Gerindra)

Syahganda Nainggolan (SMC)

menyuburkan politik uang dan transaksional dengan koalisi-koalisi tersebut.

Sementara itu, sejumlah kader Partai Gerindra mengajukan permohonan uji materi Pasal 9 UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal ini mengatur pencalonan presiden (capres-cawapres) hanya bisa diusung oleh parpol/koalisi parpol yang memiliki 25% suara sah pemilu nasional atau 20% kursi DPR. Sejumlah kader Gerindra menilai ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi. Sebab UUD 1945 sama sekali tidak mengatur ambang batas pengusungan kandidat pilpres. Gerindra berpandangan seharusnya semua parpol peserta Pemilu 2014 berhak mengusung pasangan capres-cawapres.

Para pemohon uji materiil tersebut adalah Habiburokhman, Adhe Dwi Kurnia, M. Said Bakhri, Munathsir Mustaman. "Kami adalah WNI yang kebetulan anggota Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden periode 2014-2019," kata Habiburokhman. Menurut Habiburokhman, dengan presidential threshold 20 persen, politik Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin yang itu-itu saja, dari partai yang itu-itu saja dan bahkan dari keluarga yang itu-itu saja. "Padahal sebagai negara besar dan majemuk, rakyat harus diberi kesempatan untuk memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin," jelasnya.

Kader Partai Gerindra itu menyebut PT 20 persen adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998, di mana pada saat itu gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut perubahan politik dalam bentuk diimplementasikannya demokrasi multi partai kerakyatan sebagai koreksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang antidemokrasi.

Belakangan, sehubungan dengan uji materi UU Pilpres tersebut, semua parpol anggota Setgab Koalisi (Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB) sepakat menunda perdebatan tentang presidential threshold hingga ada putusan MK atas permohonan uji materi tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Teguh Juwarno mengungkapkan pembahasan RUU Pilpres di forum rapat setgab telah ada kesepahaman agar masing-masing parpol menahan diri untuk tidak memperdebatkan terlebih dahulu soal besaran *presidential threshold* agar tidak membuang waktu dan tenaga sampai ada putusan baru dari MK. Hal ini dibenarkan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Golkar di Baleg DPR Taufik Hidayat dan Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR Ecky Awal Mucharam.

Sementara itu, berbagai kalangan *civil society* berpandangan persyaratan UU Pilpres 2009 sebesar 20% suara parlemen yang terlalu tinggi itu, bisa diturunkan menjadi 3,5% sampai 5%. Menurut Cherry Augusta MA (HMI) dan Frans Aba MA (GMNI), dengan PT 20% suara parlemen, di atas kertas hanya tiga partai besar saja yang bisa mengajukan pasangan capres-cawapres, yaitu Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.

Pendapat senada dikemukakan mantan Menko Ekuin Rizal Ramli PhD, Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota DPR Fraksi PKS Sohibul Iman. Mereka menilai jika ambang batas *presidential threshold* tetap 20 persen, dan tidak diubah menjadi 3,5 persen, dipastikan tidak akan menemukan calon presiden alternatif pada 2014.

Mereka menyarankan sebaiknya aturan itu dikembalikan pada aturan pilpres 2004 dengan ambang batas 3,5 persen atau maksimal 5 persen, yang memungkinkan banyak calon presiden tampil.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam rilisnya Rabu (26/9) menyatakan gagasan menurunkan *presidential threshold* 3,5 persen tersebut rasional¸ demokratis, sekaligus tidak memberatkan parpol. "Apalagi, UUD 1945 hanya mengamanatkan setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden/wakil presiden tanpa menyentuh besarnya syarat perolehan suara," jelasnya.

Menurut Syahganda Nainggolan, adanya kekuatiran dapat menimbulkan banyak calon tentu bukan alasan tepat, kecuali sebatas ketakutan yang dicari-cari. "Sebab, hakikat penerimaan demokrasi harus mencerminkan kesediaan semua kekuatan politik dalam menghadapi ajang pemilihan nasional, baik dengan sedikit maupun banyaknya calon," ujarnya.

Syahganda mengatakan, penurunan syarat pengajuan capres/cawapres akan mendorong munculnya calon-calon alternatif. Hal itu, katanya, bukan saja mampu mendinamisasi wujud demokrasi di Tanah Air yang lebih heterogen, lantaran calon-calon terbaik dari beragam latarbelakang akan ikut terseleksi serta terdongkrak ke permukaan untuk dinilai terbuka oleh publik.

Di samping itu, kata Syahganda, hal itu dapat merekrut lapisan muda berkualitas untuk meramaikan bursa kepemimpinan nasional sebagai capres ataupun cawapres, demi berlangsungnya proses regenerasi bangsa di masa datang. Jadi, tambahnya, partai-partai besar tidak perlu kebakaran jenggot menolak harapan penurunan *presidential threshold* karena bila calon yang diusungnya paling baik, pasti juga akan mendapat kemenangan dalam Pilres 2014. ■ **tsl**

Arah Politik Penegakan Hukum

Saat ini iklim pembentukan dan penegakan hukum tengah dilanda euforia reformasi dengan kondisi tanpa arah yang jelas. Tampak pemerintah kehilangan arah reformasi di bidang penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi.

Oleh Prof.Dr. Romli Atmasasmita

Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran, Pembelajar Hukum Pidana, mantan Ketua Tim Perumus UU Antikorupsi dan UU KPK dan Ketua Pansel KPK Pertama, Koordinator Program Doktor Unpad serta Ketua Umum Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia).

Saat ini politik pencitraan hukum tampak lebih ditonjolkan dengan mengunggulkan `serba terbuka´ kepada publik tanpa menghiraukan masalah etika dan sopan santun baik secara personal maupun secara institusional. Reformasi hukum diterjemahkan sebagai ¨serba terbuka¨ yang memiliki konotasi berbeda dengan ¨transparansi¨ yang harus dilandaskan pada aturan hukum.

Akibat dari kondisi serba tidak jelas batas-batas mana yang ¨transparan¨ dan mana yang ¨serba terbuka¨ serta mana yang beretika dan tidak sopan dan tidak santun, maka kondisi riel penegakan hukum tengah mengalami anomi dan distorsi aturan hukum yang patut dan tidak patut serta disusul dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, lembaga pemerintah dan institusi penegak hukum termasuk KPK yang semakin rendah.

Dilema penegakan hukum yang kini tengah dialami juga disebabkan arus kuat tekanan publik dan pers yang telah mengalahkan ketahanan birokrasi dan penegak hukum di dalam meyakinkan masyarakat luas tentang keabsahan dan kebenaran langkah hukum yang telah dilakukannya dalam berbagai kasus terutama kasus korupsi. Kondisi serba tidak percaya diri di dalam menangani perkara yang menarik perhatian masyarakat luas yang melanda penegak hukum merupakan pertanda buruk di dalam menjaga tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di dalam suatu negara hukum.

Hal ini disebabkan pada akhirnya lembaga penegak hukum hanya menjadi `perantara´ keinginan publik untuk menghukum atau tidak menghukum seseorang yang diduga terlibat dalam perkara pidana. Imparsialitas, Integritas, dan Akuntabilitas (IIA) pejabat publik khususnya lembaga penegak hukum merupakan *conditio sine qua non* terhadap tinggi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga dimaksud. IIA ini hanya dapat dengan tegak dijalankan jika tidak ada intervensi dari siapa pun dan dari lembaga manapun juga jika pimpinan lembaga penegak hukum dapat mengatasi intervensi tersebut.

Melihat kondisi dilematis dalam penegakan hukum, kiranya patut kita pertanyakan mengenai arah reformasi birokrasi di dalam tubuh lembaga penegakan hukum saat ini. Di dalam menghadapi kondisi riel penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi dewasa ini tampak pemerintah kehilangan arah reformasi di bidang penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi.

Pertanyaan ini mengandung implikasi: politik hukum apakah dan yang bagaimanakah yang hendak dijalankan pemerintah di dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Politik hukum pidana bertolak dari doktrin membedakan antara politik hukum mewujudkan keadilan retributif, keadilan distributif, keadilan komutatif atau keadilan restoratif. Model keadilan terakhir mengutamakan rekonsiliasi dan menghindarkan persengketaan yang lebih mendahulukan konflik antara para pihak yang berperkara atau antara lembaga penegak hukum sebagai wakil negara dengan warga negara.

Ataukah pemerintah memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum versi ajaran Kelsen yang menafikan kepentingan moral dan kesusilaan dalam penegakan hukum kecuali hanya semata-mata bersumber pada hukum yang lebih tinggi yang dijadikan dasar penegakan hukum. Jika ajaran ini yang akan diikuti maka konsekuensi logis bagi aparat penegak hukum adalah hanya melihat fakta hukum semata-mata sebagai suatu sistem norma (*normative system*) yang mengandalkan aturan dan logika (*rules and*

"Politik hukum pidana bertolak dari doktrin membedakan antara politik hukum mewujudkan keadilan retributif, keadilan distributif, keadilan komutatif atau keadilan restoratif."

logic) – (Roger Cotterrell, 2003).

Jika pemerintah memiliki komitmen penegakan hukum berkiblat pada ajaran Roscou Pound, *"pragmatic legal realism"* yang menegaskan bahwa *"law as a tool of social engineering"* atau "hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat" (Mochtar Kusumaatmadja) maka apakah hukum yang berlaku saat ini sudah cukup memadai untuk membawa perubahan pandangan masyarakat ke arah yang lebih maju atau sesuai dengan nilai peradaban modern saat ini?

Jika komitmen politik hukum (penegakan hukum) pemerintah adalah agar hukum lebih mendekati kenyataan sosial atau hukum yang hidup dalam masyarakat (Eugen Erhlich), maka apakah pemerintah telah dapat meyakinkan masyarakat luas tentang kebutuhan yang riel dan mendesak dari masyarakat Indonesia saat ini dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi atau apakah pemerintah akan memelihara keragaman adat dan budaya setempat sebagai salah satu alternatif solusi dari tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat?

Sudah tentu jika kerangka teoritik hukum masih melekat pada para pengambil keputusan baik pemerintah dan badan legislatif, tampak masih banyak jalan menuju ke roma untuk solusi carut marut pembentukan undang-undang dan penegakan hukum di Tanah Air tercinta ini. Dewasa ini yang tampak mengemuka adalah komitmen pemerintah telah melepaskan diri dari kerangka teoritik hukum yang juga telah dianut dan diterapkan di negara maju sehingga mengakibatkan tidak jelas lagi, fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional abad ke 21 menghadapi era globalisasi.

Sudah tentu masyarakat luas terutama mereka yang paham hukum mendambakan adanya suatu sikap politik pemerintah di bidang pembentukan hukum dan penegakan hukum yang memiliki visi dan misi yang jelas disertai landasan pemikiran (teoritik dan praksis) di dalam berbagai bidang kehidupan terutama perekonomian, perbankan, perdagangan dan penegakan hukum (pidana) yang dapat menegakkan kedaulatan hukum Negara RI.

Disharmonisasi dan konflik pembentukan hukum dan penegakan hukum yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan tidak jelasnya arah politik hukum (pembentukan dan penegakan hukum) pemerintah ketika mulai menjalankan roda reformasi sejak tahun 1998 yang lampau sampai saat ini.

Solusi dari kondisi tanpa arah jelas, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukum, seharusnya bercermin pada: Pertama, mengingatkan para legislator dan eksekutif mengenai *fungsi filsafat hukum* yang *bercita-cita menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya* (Mochtar Kusumaatmadja, 1986). Dalam konteks hukum di Indonesia, fungsi filsafat hukum adalah menghaluskan pemikiran tentang hukum bukan semata-mata sebagai sistem norma *(normative system)* melainkan lebih dari itu, yaitu merupakan *sistem nilai (values system)* yang lebih hidup dan dinamis mengikuti perkembangan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat;

Cermin kedua yang perlu diperhatikan oleh legislator dan eksekutif adalah fungsi hukum harus dapat menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat (fungsi integratif), terlepas dari topik undang-undang yang direncanakan dan termasuk ke dalam agenda Prolegnas. Atas dasar inilah maka fungsi dan peranan harmonisasi dan sinkronisasi perancangan dalam setiap UU sangat menentukan apakah pasca pengesahan, UU dimaksud memperoleh akseptabilitas yang tinggi atau rendah dari masyarakat luas atau bahkan menciptakan konflik sosial atau konflik kelembagaan baru.

Cermin ketiga, kenyataan lembaga penegak hukum di Indonesia sejak dikeluarkannya UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU Kekuasaan Kehakiman, adalah representasi kemandirian kelembagaan secara organisasi dan struktural satu sama lain. Berlainan halnya ketika di bawah hukum Hindia Belanda di mana Jaksa termasuk kekuasaan kehakiman di bawah Menteri Kehakiman, dan Polisi merupakan pembantu jaksa. Konsekuensi logis dari keberadaan UU organik di atas, seharusnya tidak ada lagi pemikiran *subordinasi antar kelembagaan* penegak hukum, apalagi saat ini kontrol masyarakat dan kebebasan pers yang telah menguat, didukung oleh keberadaan Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial, yang diharapkan lebih ampuh dan efektif ketimbang peranan supervisi dan koordinasi antara instansi penegak hukum itu sendiri.

Sesungguhya pemikiran subordinatif lebih mencerminkan "berburuk sangka" daripada "berbaik sangka" antara lembaga penegak hukum; hal ini potensial memicu konflik kelembagaan dan meningkatkan arogansi sektoral di antara lembaga tersebut. Penyusunan RUU HAP baru pengganti KUHAP 1981 seharusnya mempertimbangkan hal tersebut secara serius.

Arah politik penegakan hukum jauh lebih penting untuk ditetapkan daripada penegakan hukum yang bersifat "instan" dan "adhoc" sehingga dalam jangka panjang kita akan memperoleh suatu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemerintah di dalam mengarungi berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. ■ BERINDO

"Arah politik penegakan hukum jauh lebih penting ditetapkan daripada penegakan hukum yang bersifat instan dan adhoc, sehingga dalam jangka panjang kita akan memperoleh suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah."

SDA, Pemimpin Islamis Kebangsaan

Drs. Suryadharma Ali, MSi yang akrab dipanggil Pak Surya dan namanya sering disingkat SDA, punya sikap tegas bahwa Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Menteri Agama RI (2009-2014) dan Menteri Negara Koperasi dan UKM (2004-2009) ini seorang politisi dan pemimpin yang Islamis kebangsaan. Dia Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (2007-2011 dan 2011-2016).

Alumni Institut Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta (1984) ini menegaskan meskipun PPP merupakan partai berasaskan Islam, namun tidak akan mendirikan Negara Islam. Suryadharma Ali bersikap bahwa Islam dan nasionalisme (kebangsaan) adalah bersifat sinergis bagi kemajuan bangsa (NKRI). Islam dan nasionalisme tidak memiliki pertentangan, bahkan saling bersinergis demi kemajuan bangsa.

Suami dari Dra. Hajjah Wardatul Asriah (Indah) ini menjelaskan sikap yang dianutnya, yang juga merupakan sikap yang dianut PPP di bawah kepemimpinannya. Nasionalisme tanpa diikuti ajaran Islam akan menjadi kering pemaknaannya dan bahkan bisa merusak tatanan harmoni umat dan bangsa (NKRI). Sebaliknya, ajaran Islam tanpa ditanamkan jiwa nasionalisme akan melahirkan penyempalan dengan mengambil pola perjuangan di luar semangat NKRI. Contohnya, kelompok teror bom ataupun jaringan NII.

Ayah dari empat orang anak (Kartika Yudistira, Sherlita Nabila, Abdurrahman Sagara Prakasa dan Nadia Jesica Nurul Wardani) ini pun merisaukan timbulnya fenomena semakin merosotnya rasa nasionalisme di kalangan anak bangsa saat ini. Maka, dia memandang perlu upaya membangkitkan rasa nasionalisme dan kebangsaan khususnya di kalangan generasi muda Islam. Berulangkali dia menegaskan bahwa prinsip ajaran Islam di Indonesia sejalan dengan empat pilar bangsa yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, keempat pilar inilah sebagai dasar bagi seluruh rakyat dan umat Islam dalam berbangsa dan bernegara.

Itu pulalah sikap dan prinsip kepemimpinan Suryadharma Ali baik sebagai seorang politisi (kader PPP), maupun sebagai pejabat negara (publik) – Menteri Agama dan Menteri Negara Koperasi dan UKM. Dia seorang pemimpin yang Islamis (*Islamis, bersifat Islam: pemimpin yang Islamis; Islami, bersifat keislaman: akhlak Islami.*) dan berorientasi kebangsaan. Sikap dan prinsip itu telah dimilikinya sejak kecil dalam pengasuhan orang tuanya yang warga NU di daerah Koja, Jakarta Utara. Dia diasuh dengan kedalaman keagamaan oleh orang tua dan para ustadz di masjid di sekitar tempat tinggalnya. Selain mendapat pendidikan formal, dia juga mengecap pendidikan keagamaan yang mumpuni. Terutama sejak dia kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarief Hidayatullah Jakarta pada tahun 1977-1984. Semasa kuliah, dia sudah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sebagai mahasiswa, dia terbilang sangat aktif dan kreatif. Dia meraih gelar sarjana (S-1) tahun 1984.

Kemudian, dia bekerja di PT Hero Supermarket, Tbk hingga 1999. Jabatan terakhirnya sebagai Deputi Direktur. Saat itu, dia juga aktif sebagai pengurus di berbagai organisasi ritel di Indonesia. Kemudian, ketika gerakan reformasi bergulir (1998), dia pun mulai memfokuskan aktivitas ke dunia politik praktis. Dia meneguhkan diri memilih PPP sebagai wadah perjuangan dan pengabdian politiknya. SDA tak salah memilih wadah perjuangannya dalam dunia politik praktis itu. Karirnya sebagai politisi meroket. Visi, wawasan, kreativitas, integritas dan penampilannya yang soleh, amanah, bersahabat dan bersahaja telah menempatkannya dalam posisi politik yang pantas diperhitungkan, tidak hanya dalam internal PPP, tetapi juga dalam kepemimpinan politik nasional. ■ e-ti

Pemimpin Tanpa Menghukum

Soeparno Prawiroadiredjo, Dipl. Ing, lahir di Pasuruan, 4 Juni 1933. Mantan CEO PT Kodja (Persero), ini seorang pemimpin yang tak pernah menghukum *(punishment)* tetapi tidak sulit memberi penghargaan *(reward)*. Kunci utama kepemimpinannya adalah keteladanan, kebersahajaan dan kebersamaan, tentu saja plus integritas, intelektualitas dan kapabilitas yang mumpuni.

Dengan gaya kepemimpinan seperti itu, dia memimpin (Dirut) PT Kodja (Persero) selama 22 tahun (1966-1988). Sampai akhirnya dia diangkat menjabat Dirjen Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika, Depperin RI (1988-1994).

Peraih gelar Diploma-Ingenieur Teknik Perkapalan dari Technische Hochschule Hannover, Jerman, 1960, ini mengabdikan diri dalam dunia maritim sejak 1960. Dia memulai karir sebagai *Engineering Superintendant* di PT Pelni (1960-1962). Dia pemimpin industri kapal yang mengutamakan keteladanan daripada banyak memerintah. Seorang pemimpin yang bersahaja dan sangat tidak mau menonjol-nonjolkan diri, apalagi menonjolkan prestasi. ■ e-ti

Mengingatkan Janji Abraham Samad

Abraham Samad, SH, MH, Dr, seorang advokat yang melejit bagai roket menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid 3 (2011-2015). Pengalaman yang sangat minim tidak menjadi hambatan bagi pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, itu untuk menduduki kursi Ketua KPK. Abraham Samad yang sebelumnya pernah gagal sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial, serta dua kali gagal dalam seleksi pimpinan KPK, akhirnya dalam seleksi capim KPK 2011, dia berhasil lolos bahkan terpilih menjadi Ketua KPK dan dilantik Presiden SBY di Istana Negara pada 16 Desember 2011.

Abraham Samad pun berjanji untuk segera menuntaskan kasus Bank Century dan mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar. Dia berjanji siap mundur jika dalam setahun kepemimpinannya, pemberantasan korupsi dinilai tidak optimal. Abraham Samad berjanji tak akan banyak mengumbar pernyataan ke publik jika terpilih sebagai Ketua KPK. Dia bahkan mengkritik Busyro Muqoddas yang banyak berbicara ke publik dengan menyebutnya seperti pemain sinetron. "Sebagai penegak hukum itu seharusnya sudah tahu karakter penegak hukum yang tidak boleh banyak bicara ke publik. Tidak boleh banyak tampil di televisi. Kalau sering tampil itu seperti sinetron saja," ujarnya dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Senin, 28 November 2011.

Abraham Samad juga menjamin selama kepemimpinannya, lembaga antikorupsi ini tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun. Jika hal itu terjadi, Abraham menegaskan, pada hakikatnya dirinya akan berpegang teguh pada kemandirian sikap yang dimiliki masing-masing pimpinan KPK. Maka, dia menjamin akan selalu ada koordinasi dan konsolidasi antarpimpinan KPK. "Kalau saya gagal melaksanakan itu semua, pulang kampung saya," tegas Abraham. Menurutnya, janji-janjinya di hadapan Komisi III DPR bukanlah bentuk kontrak politik melainkan kontrak sosial. Dia tidak pernah berafiliasi atau terkait dengan partai politik mana pun. ■ d-ti

Rieke Mengaku Gregetan

Sebelum terjun ke dunia politik, ia populer sebagai artis sinetron lewat perannya sebagai gadis blo'on dan lugu bernama Oneng dalam serial Bajaj Bajuri dan Salon Oneng. Dalam kiprahnya sebagai anggota DPR periode 2009-2014 (PDIP) dari Dapil 2 Jawa Barat, ia banyak menyoroti masalah-masalah yang berkaitan dengan kaum miskin, buruh dan perempuan.

Rieke Diah Pitaloka Intan Permatasari lahir di Garut, Jawa Barat 8 Januari 1974. Ketertarikan jebolan Sastra Belanda UI ini pada politik tak main-main atau hanya sekadar latah. Awalnya, dia mengaku gregetan dengan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Dia juga sedih karena ada stigma bahwa di dunia politik artis cuma digunakan sebagai pajangan, hanya disuruh nyanyi, menghibur, jadi MC, tanpa ditanya apa punya gagasan atau diajak rapat. Ketertarikannya dalam dunia politik sebenarnya sudah terlihat sejak mahasiswa. Dia ikut Gerakan Mahasiswa UI Aliansi Pro Demokrasi Antimiliterisme pada awal reformasi.

Rieke mengaku, selama aktif dalam bidang politik, ia sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan lantaran terlalu vokal menyuarakan aspirasi rakyat. Ancaman pun kerap ia dapatkan dari oknum-oknum yang berseberangan pemikiran dengannya. Tapi hal itu tidak pernah menyurutkannya untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat.

Semula Rieke bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal DPP. Namun, belakangan ia mengundurkan diri dan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan terpilih sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II. Belakangan, dia maju sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan cawagub Teten Masduki. ■ d-ti

Merdeka, Si Peduli Hak Anak

Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak periode 2010-2014 ini sebelumnya dikenal luas sebagai aktivis buruh. Namun perjumpaannya dengan anak-anak yang kurang mendapat perhatian membuat ia memutar haluan menjadi aktivis sekaligus sahabat anak Indonesia. Perjuangannya berfokus pada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak.

Kiprahnya sebagai aktivis mulai dikenal publik setelah ia bersama Seto Mulyadi (Kak Seto) dan aktivis lainnya mendirikan Komnas PA pada 1998. Kehadiran Komnas PA tersebut menjadi bukti nyata peran Indonesia sebagai negara yang telah ikut meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak (1990). Setelah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komnas PA, ia terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2010-2014 menggantikan Seto Mulyadi yang telah menjabat selama 12 tahun (tiga periode). Arist terpilih secara aklamasi dalam Kongres Komnas PA yang digelar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 25-27 Mei 2010. Sedangkan Seto diangkat menjadi Ketua Dewan Konsultatif Nasional.

Arist Merdeka melewati masa kecilnya di daerah perkebunan Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di sana ia tumbuh bersama teman-temannya yang kebanyakan bekerja sebagai buruh perkebunan. Banyak di antara mereka yang terpaksa putus sekolah karena terhimpit kemiskinan. Kalau pun mereka sekolah, tidak lebih dari tingkat Sekolah Dasar (SD). Keadaan itu membuat ayah Arist yang meski saat itu bekerja sebagai penjahit tergerak untuk membuat sekolah di lingkungan perkebunan itu. Sang ayah menjadi koordinator guru (bukan Kepala Sekolah). Setamat SMA, pria kelahiran Pematang Siantar, 17 Agustus 1960 ini meneruskan kuliah di Jakarta dan aktif di organisasi kampus, organisasi buruh dan LSM.

Sekitar tahun 1981, Arist terkejut ketika melihat banyak anak putus sekolah yang bekerja di lingkungan kerja berbahaya seperti di industri bahan kimia. Hal itu mendorongnya untuk memberikan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang bekerja. Lalu tahun 1986, Arist mendirikan yayasan (buruh) yang memberikan pendidikan bagi pekerja anak yang bekerja dalam situasi buruk. Pada 1987, Arist membentuk Yayasan Komite Pendidikan Anak Kreatif (Kompak) Indonesia yang juga memberikan berbagai pendidikan alternatif bagi anak yang bekerja, seperti pendidikan toleransi, demokrasi dan baca tulis. ■ d-ti

Kembalikan Fungsi MPR

Dalam Indonesia merdeka, dinyatakan kita memiliki negara yang "Berkedaulatan Rakyat" yang dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karenanya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia).

Oleh: Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang

Syaykh al-Zaytun, disarikan dari Khutbah Idul Fithri 1433 H/2012 M di Kampus Al-Zaytun pada tarikh: 01 Syawwal 1433 H (19 Agustus 2012 M).

"Bercermin pada pembukaan UUD negara (yang merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia), bangsa Indonesia dapat merasakan dan menimbang, apa yang harus dilakukan untuk menuju yang lebih baik."

Tetapi, setelah UUD mengalami perubahan, kini peranan MPR dalam praktiknya tidak menetapkan GBHN, dan bukan merupakan kekuasaan negara yang tertinggi, sehingga penyelenggara negara dan pemerintahnya tidak dapat menentukan arah yang jelas dalam melaksanakan UUD, disebabkan tidak adanya program jelas yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk GBHN.

Maka segala yang kita rasakan dan saksikan pada sekarang ini adalah akibat dari kedaulatan rakyat yang menjelma di dalam MPR telah berkurang fungsi kedaulatannya. Sehingga tidak dapat dijadikan timbangan maupun ukuran keberhasilan perjalanan perjuangan rakyat bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, harus diperjuangkan kembali, kesempurnaan kedaulatan rakyat itu, sehingga MPR dapat kembali menjadi pemegang kekuasaan negara yang tertinggi dan dapat menetapkan GBHN. Sehingga berbagai problem yang dihadapi rakyat bangsa Indonesia dapat diselesaikan dengan cara bijak, tertib, dan damai.

Peristiwa Penting

Di bulan Ramadhan tahun ini (juga tahun lalu), kita bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-67. Peristiwa kemerdekaan Indonesia, oleh Bung Karno dalam sambutan beliau sebelum membacakan Teks Proklamasi, peristiwa ini belaiu katakan sebagai "suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia." Sebab berpuluh tahun bahkan ratus tahun bangsa Indonesia telah berjuang, dengan semangat jiwa untuk mencapai cita-cita, mengambil nasib bangsa dan nasib Tanah Air ke dalam tangan bangsa sendiri, agar dapat berdiri tegak dengan kuatnya.

Proklamasi yang dinyatakan pada 17.8.45 itu didahului dengan mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah 17.8.45 telah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Setelah membacakan proklamasi, dari serambi Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno menutup sambutannya: "Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat Tanah Air kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insyaallah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!"

Dari saat itulah setiap datang tanggal dan bulan yang sama, setiap tahun kita peringati. Peringatan-peringatan selanjutnya, sejak tahun 1946-1949, dipusatkan di Jogjakarta, dan seterusnya dilaksanakan di Jakarta ibu kota negara, serta di seluruh pelosok Tanah Air negara Indonesia, juga perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri.

Dalam memperingati hari kemerdekaan

ini, adalah sangat bijak jika kita sebagai warga bangsa Indonesia tidak lengah terhadap cita-cita kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu.

Cita-cita itu merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD negara Indonesia:

Pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "Pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Kedua, negara hendak mewujudkan "Keadilan Sosial" bagi seluruh rakyat.

Ketiga, negara yang "Berkedaulatan Rakyat" berdasar atas kerakyatan dan "Permusyawaratan Perwakilan". Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas "Kedaulatan Rakyat" dan berdasar atas "Permusyawaratan Perwakilan". Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

Keempat, negara berdasar atas Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pokok-pokok pikiran itu kemudian menjelma dalam UUD negara. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman terus bergerak dan berubah, dituntut, kehidupan harus dinamis, harus selalu melihat segala gerak kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Yang sangat penting dalam hal hidupnya negara ini adalah semangat, semangat rakyat Indonesia, semangat penyelenggara negara, semangat pemimpin pemerintahan, semangat yang baik, semangat yang baik itu harus hidup dan terus dinamis.

MPR Penjelmaan Seluruh Rakyat

Hari ini umur kemerdekaan Indonesia mencapai 67 tahun telah mengalami berbagai era. Dalam sejarah perjuangan bangsa disebut era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. UUD negara pun mengalami perubahan. Namun cita-cita kemerdekaan yang terkandung di dalam pembukaan UUD tidak pernah berubah.

Bercermin pada pembukaan UUD negara (yang merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia), bangsa Indonesia dapat merasakan dan menimbang, apa yang harus dilakukan untuk menuju yang lebih baik.

Rakyat di dalam Indonesia merdeka, dinyatakan memiliki negara yang "Berkedaulatan Rakyat". Kedaulan rakyat yang dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karenanya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia).

Setelah UUD mengalami perubahan, kini peranan MPR dalam peraktiknya tidak menetapkan GBHN, dan bukan merupakan kekuasaan negara yang tertinggi, sehingga penyelenggara negara dan pemerintahnya tidak dapat menentukan arah yang jelas dalam melaksanakan UUD, disebabkan tidak adanya program jelas yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk GBHN.

Maka segala yang kita rasakan dan saksikan pada sekarang ini adalah akibat dari kedaulatan rakyat yang menjelma di dalam MPR telah berkurang fungsi kedaulatannya. Sehingga tidak dapat dijadikan timbangan maupun ukuran keberhasilan perjalanan perjuangan rakyat bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, harus diperjuangkan kembali, kesempurnaan kedaulatan rakyat itu, sehingga MPR dapat kembali menjadi pemegang kekuasaan negara yang tertinggi dan dapat menetapkan GBHN. Sehingga berbagai problem yang dihadapi rakyat bangsa Indonesia dapat diselesaikan dengan cara bijak, tertib, dan damai. ■ BERINDO

"Harus diperjuangkan kembali, kesempurnaan kedaulatan rakyat itu, sehingga MPR dapat kembali menjadi pemegang kekuasaan negara yang tertinggi dan dapat menetapkan GBHN. Sehingga berbagai problem yang dihadapi rakyat bangsa Indonesia dapat diselesaikan dengan cara bijak, tertib, dan damai."

Kisah Manusia

Oleh: Syaykh al-Zaytun Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang

Tulisan ini selain mengupas barang sedikit tentang pengenalan diri tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia dan alam, tujuan manusia, struktur manusia, keterjerumusan manusia dalam dosa, manusia dan fitrahnya, juga berupaya mengenali Bapak-Bapak Leluhur manusia dari periode ke periode, sejak diproklamirkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mencipta manusia sebagai khalifahNya. Manusia khalifah Tuhan ini tentunya adalah manusia yang berperadaban, karena berfungsi sebagai khalifah Tuhan di bumi. Bapak-Bapak Leluhur umat manusia berperadaban dapat digolongkan dalam beberapa periode, dimulai dari sejak Nabi Adam As. sampai dengan periode-periode sesudahnya.

Pada kesempatan Idul Kurban tahun ini, 1433 H/26 Oktober 2012 M, saya mengajak semua kita, untuk lebih mengenali diri secara mendalam. Agar dapat lebih mengenal Tuhan dan bertakwa kepadaNya, dengan sebenar-benar takwa.

Dalam Ajaran Ilahi tentang penciptaan, memberikan kepada manusia tempat mulia dalam alam semesta. Manusia diperintahkan memenuhi bumi dan menguasainya.

a. Dalam hal alam semesta, sesungguhnya manusia adalah bagian dari alam ini. Manusia adalah debu dan diciptakan dari debu tanah. Secara biologi dan badaniah manusia mempunyai banyak kesamaan dengan binatang. Semuanya itu nampak jelas dalam banyak segi hidup manusia. Manusia sebagai onggokan daging adalah lemah, dan bergantung pada belas kasihan Allah Swt. seperti semua makhluk lainnya. Bahkan dalam memanfaatkan alam untuk melayani hajat kebutuhannya, manusia harus melayani alam ini, harus menjaganya, dan mengolahnya untuk mencapai tujuannya. Manusia tunduk kepada hukum-hukum yang sama, seperti kaidah alam, dan manusia dapat terpesona di tengah-tengah keagungan dunia yang menjadi tempat hidupnya.

Alam ini bukanlah melulu suatu kerangka atau latar belakang yang netral bagi hidup manusia. Antara alam dan manusia ada ikatan-ikatan yang sangat mendalam dan rahasia. Alam dapat digambarkan bersuka ria, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang menuju kepada keselamatan manusia, sementara alam ini juga menikmati pemulihannya. Di pihak manusia ada simpati naluriah terhadap alam, dan manusia harus menjunjung tinggi hukum-hukum alam, harus mengakui kenyataan ketergantungannya pada alam, dan harus membanting tulang untuk mendapat makanan yang dibutuhkannya dari alam sekitarnya supaya ia dapat hidup, juga hal-hal yang dapat memperkaya kebudayaannya.

b. Namun manusia tidak bisa mendapat makna sebenarnya dari hidup dalam alam yang dilukiskan tadi. Binatang-binatang tidak dapat menjadi penolong yang layak baginya. Manusia mempunyai sejarah dan masa depan yang harus disempurnakan, unik di tengah-tengah makhluk dan ciptaan lainnya. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifahNya di bumi, tergambar dalam kekuasaan manusia atas dunia ini, atau dalam daya pikirnya.

Tatkala Allah menciptakan manusia, Ia mengambil sikap dan perhatian yang sangat khusus dan mendalam terhadap manusia itu. Dan cara pendekatanNya ialah melibatkan diriNya dalam hubungan yang lebih erat dengan manusia ciptaan-Nya itu, dibandingkan dengan semua ciptaan lainnya. Manusia dimampukan menanggapi ucapan Allah Swt. yang penuh kasih sayang, dengan kasih sayang pribadi dan kepercayaan. Hanya dalam jawaban kasih sayang pribadi dan kepercayaan demikianlah manusia bisa menjadi "apa sebenarnya dia".

Petunjuk/hidayah Ilahi yang olehnya manusia hidup, menempatkan manusia dalam suatu hubungan yang meninggikan dia di atas semua ciptaan lain di sekelilingnya, dan mengaruniakan kepadanya martabat sebagai makhluk Allah, yang diciptakan menurut citra Ilahi dan memantulkan kemuliaan Ilahi. Manusia memiliki martabat ini bukan sebagai perseorangan yang terisolir di hadapan Allah, melainkan hanya jika ia berada

Khalifah Tuhan

dalam hubungan yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Hanya bila ia berada di tengah-tengah lingkungan keluarganya dan dalam hubungan sosialnya, ia betul-betul memantulkan citra Ilahi.

c. Struktur diri manusia itu adalah satu kesatuan daripada: jasad/badan/daging, jiwa dan roh, yang tidak terpisah-pisahkan.

Jiwa boleh jadi menekankan unsur perseorangan dan kuasa hidup manusia itu, dengan penekanan pada hidup batiniah, perasaan dan kesadaran dirinya. Badan, dipakai untuk penekanan kaitan sejarah dan lahiriah yang memengaruhi hidupnya. Tetapi jiwa ialah jiwa, yang memang harus menyatu dengan badannya, dan demikian juga sebaliknya. Manusia juga mempunyai hubungan dengan Roh Allah, sehingga dia sendiri mempunyai roh, tetapi sekalipun demikian manusia tidak dapat disebut suatu roh, dan roh juga tidak dapat dianggap sebagai unsur ketiga dari diri manusia.

Manusia sebagai jasad/badan/daging, ialah manusia dalam hubungannya dengan dunia alam dan dengan umat manusia sebagai keseluruhan, tidak hanya dalam kelemahannya, tapi juga dalam kedosaannya dan kekufurannya terhadap Allah.

Segi-segi khusus atau fungsi tertentu dari manusia, yakni dorongan emosi dan perasaan, dianggap bersumber (dalam arti sebenarnya maupun kiasan) dari organ-organ badan seperti jantung, hati buah pinggang (ginjal), dan usus perut. Begitu juga darah, dianggap sebagai pusat kehidupan atau jiwa, dan khusus jantung dianggap sebagai pusat sejumlah besar kegiatan jiwa manusia, seperti kehendak, budi dan perasaan, yang merupakan segi batiniah yang tersembunyi, dalam kata lain pikiran, hati, suara hati, hati nurani. Dalam diri manusia yang satu itu, terdapat perbedaan antara manusia batiniah dan manusia lahiriah, tapi kedua segi yang berbeda ini tidak dapat dipisahkan dari manusia yang satu itu.

d. Dalam perjalanannya manusia dapat terjerumus ke dalam dosa, kejahatan, kesalahan, oleh sebab penolakan manusia terhadap petunjuk Ilahi, menolak penyatuan langkah pada jalan yang diridlai Ilahi untuk menyempurnakan tujuan ketika ia diciptakan. Manusia seperti itu selalu berusaha mencari pembenaran akan keberadaannya hanya dari dalam dirinya sendiri.

Manusia yang terjerumus dalam dosa, tidak berusaha hidup dalam keterikatan yang benar dengan Ilahi dan dengan persekutuan/persahabatan yang akrab dengan sesama manusia, di mana ia dapat memantulkan citra kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti juga memantulkan citra kemuliaan Tuhan YME, yaitu Allah Swt.

Manusia yang terjerumus dalam dosa, selalu berusaha memaknai hidupnya melulu dalam hubungannya dengan dunia ciptaan ini, dalam arti alam sekitarnya. Akibatnya ialah: hidupnya

Tatkala Allah menciptakan manusia, Ia mengambil sikap dan perhatian yang sangat khusus dan mendalam terhadap manusia itu. Dan cara pendekatanNya ialah melibatkan diriNya dalam hubungan yang lebih erat dengan manusia ciptaan-Nya itu, dibandingkan dengan semua ciptaan lainnya.

ditandai dengan perbudakan, permusuhan, kelemahan dan kegagalan, ia sedemikian busuk dan jahat dalam tindakan, pikiran, dan hatinya; sehingga ia memutarbalikkan kebenaran Ilahiah dan menjadi pendusta.

e. Kendati manusia telah terjerumus dalam dosa, manusia menurut janji Tuhan YME masih harus dipandang sebagai ciptaanNya yang terbaik sebagai citra Tuhan YME. Ketidaksetiaan manusia kepada Tuhan YME tidak dapat membatalkan kesetiaan Tuhan kepada manusia. Maka di hadapan Tuhan YME, manusia dari segi hidup perseorangan maupun dari segi hidup bersama, dipandang jauh lebih bernilai dari seluruh alam.

Tuhan YME memberi kepada manusia tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Dengan iman kepada Tuhan YME, manusia yang terjerumus dalam dosa akan mendapati dirinya sedang diubah menjadi serupa dengan fitrahnya, maupun kemuliaannya. Dalam iman kepada Tuhan YME, maka manusia harus menanggalkan "manusia lama" (yang terjerumus dalam dosa). Kehidupan bergelimang dosa berarti mencoreng fitrah dan merusaknya, diubah menjadi kehidupan iman yang berarti mempertahankan fitrah kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakekat manusia dan kemanusiaannya yang adil dan beradab itu tercermin dalam gelora jiwa yang penuh syukur dan iman kepada Tuhan YME dan terwujud dalam berbagai perbuatan baik yang menekankan kepada hubungan saling menolong antara sesama manusia sebagai hakikat dari kodrat manusia. Itulah bentuk kembali kepada Tuhan bertobat kepada Tuhan atau menebus dosa-dosa kepada Tuhan YME.

Manusia dimampukan menanggapi ucapan Allah Swt. yang penuh kasih sayang, dengan kasih sayang pribadi dan kepercayaan. Hanya dalam jawaban kasih sayang pribadi dan kepercayaan demikianlah manusia bisa menjadi "apa sebenarnya dia".

Bapak Leluhur Manusia

Setelah kita mengupas barang sedikit tentang pengenalan diri tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan, kaitannya: manusia dan alam, tujuan manusia, struktur manusia, keterjerumusan manusia dalam dosa, manusia dan fitrahnya, mari kita kenali Bapak-Bapak Leluhur manusia dari periode ke periode, sejak diproklamirkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mencipta manusia sebagai khalifahNya. Manusia khalifah Tuhan ini tentunya adalah manusia yang berperadaban, karena berfungsi sebagai khalifah Tuhan di bumi.

Bapak-Bapak Leluhur umat manusia berperadaban dapat digolongkan dalam beberapa periode, dimulai dari sejak Nabi Adam As. sampai dengan periode-periode sesudahnya.

Pertama: Periode Bapak-Bapak Leluhur Kuno.

Dimulai dari Adam As. yang memperanakkan Qobil/Kain, Habil, dan Set/Sesy. Dari putra Adam As. yang bernama Set inilah kemudian lahir beberapa generasi sampai kepada Nabi Nuh As. yakni kalau diurai silsilahnya adalah sbb: Adam As. berumur 930 tahun, memperanakkan Set berumur 912 tahun, memperanakkan Enos berumur 905 tahun, memperanakkan Kenan 910 tahun, memperanakkan Muhalaleel 895 tahun, mempernakkan Yared 960 tahun, memperanakkan

Henokh 365 tahun, memperanakkan Matusaleh 969 tahun, memperanakkan Lamekh 777 tahun, memperanakkan Nuh As. Dari Adam As. hingga Nuh As. berjarak ± 2000 tahun.

Kedua: Periode Bapak-bapak Leluhur dihitung sejak Nuh As. sampai dengan Ibrahim As.

Putra-putra Nuh As. adalah Sam, Ham, dan Yafet. Setelah penghuni bumi tersapu oleh banjir bandang yang memusnahkan umat manusia, maka perkembangan penduduk bumi dimulai kembali dari tiga putra turunan Nuh As. Silsilahnya diambil dari Sam putra Nuh As, yang kemudian melahirkan turunan selanjutnya sampai kepada Ibrahim As., yakni:

Nuh As. 950 tahun memperanakkan Sam, memperanakkan Arpakhsad, memperanakkan Selah, memperanakkan Eber, memperanakkan Peleg, memperanakkan Rahu, memperanakkan Serug, memperanakkan Nahor, memperanakkan Terah, memperanakkan Ibrahim. Dari Nuh As. sampai dengan Ibrahim As. berjarak ± 2000 tahun.

Ketiga: Periode ini terhitung dari Bapak-bapak Leluhur, Ibrahim As. sampai dengan Isa Almasih As.

Ibrahim As. mempunyai 3 istri, yaitu Sara, Hajar dan Keturah.

Periode Ketiga ini dirunut silsilahnya dari keturunan Ibrahim As melalui istrinya Sara, yakni: Ibrahim As. 175 tahun, memperanakkan Ishak, memperanakkan Yakub, memperanakkan Yahuda, memperanakkan Peres, memperanakkan Hazron, memperanakkan Ram, memperanakkan Aminadab, memperanakkan Nahason, memperanakkan Salmon, memperanakkan Boas, memperanakkan Obed, memperanakkan Isai, memperanakkan Daud, memperanakkan Salomo, memperanakkan Rehabean, memperanakkan Abia, memperanakkan Asa, memperanakkan Yosafat memperanak-

Sholat Id Adha di Al-Zaytun

kan Yoram, memperanakkan Uzia, memperanakkan Yatam, memperanakkan Ahaz, memperanakkan Hizkia, memperanakkan Manasye, memperanakkan Amon, memperanakkan Yosia, memperanakkan Yekhonya, memperanakkan Sealtael, memperanakkan Zerubabel, memperanakkan Abehud, memperanakkan Elyakim, memperanakkan Azor, memperanakkan Zodak, memperanakkan Akhim, memperanakkan Eliud, memperanakkan Eliazar, memperanakkan Matan, memperanakkan Ya'kub, memperanakkan Yosef suami daripada Mariam ibunda Isa Almasih. Dari Ibrahim As. sampai dengan Isa Almasih ± 2000 tahun.

Keempat: Adalah lanjutan daripada periode-periode sebelumnya, yang telah diproklamirkan oleh Isa As. kepada Bani Israel yang termaktub di dalam QS: 61/6; Dan tatkala Isa putra Maryam berkata: Wahai Bani Israel sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, dengan membenarkan kitab yang telah turun sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Selanjutnya uraian daripada Nabi yang bernama Ahmad dijelaskan di dalam QS: 48/29; Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad Saw. utusan Allah inilah yang kemudian lahir pada 20 April 571 M / 9 Rabiul Awal tahun Fil ke 1.

Nabi Muhammad Saw., bukan keturunan daripada bani Israel melainkan keturunan daripada bani Ismail bin Ibrahim As. Dalam riwayat Ismail bin Ibrahim As. adalah nenek ke-30 kepada nabi Muhammad Saw. Sekalipun yang selalu diriwayatkan dalam sejarah hanya sampai kepada nenek ke-21. Silsilahnya adalah Muhammad Saw. bin Abdullah bin Abd Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushayi bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Lu ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadlor bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad, dan terus menyambung ke atas kepada Ismail As bin Ibrahim As. Rasulullah Muhammad berumur lebih dari 60 tahun. Wafat pada 8 Juni 632 H (61 tahun, 50 hari).

Para leluhur umat manusia yang diuraikan tadi di antara mereka adalah para nabi Allah mahupun rasul utusanNya yang menyebarkan ajaran Ilahi, yang intinya adalah menegakkan ajaran Ilahi berupa Agama dan mengajak untuk tidak berpecah belah atas nama Agama, maupun perselisihan atas nama Agama, dan terus mengajak ummat manusia untuk selalu mendapatkan Rahmah, Kasih Sayang, dan BerkatNya.

Para Nabi dan Rasul utusan Allah, ada yang tampil sebagai pemimpin umat manusia, penyelamat umat manusia dan alam lingkungannya dari kepunahan, pemimpin exodus bangsanya dari sebuah negara ke tempat leluhurnya demi menghindari perbudakan dan menjadikan bangsanya sebagai pengabdi kepada Allah swt, menjadi panutan utama para orang beriman, yang kesemua mereka digolongkan orang yang penuh kesabarannya yang mempunyai kemauan kuat dan teguh hati menghadapi segala halangan dan rintangan dalam menjalankan tugasnya, dan terus berjuang dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan. Para Rasul utusan Allah yang seperti ini termasuk kelompok ulul azmi, adalah para Rasul Allah yang terkenal kesabaran dan ketabahannya dalam menjalankan tugas, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah swt dan dijadikan sebagai contoh kesabaran yang baik, hal itu ditegaskan oleh Allah dalam QS 46/35 yang artinya : *Maka bersabarlah kamu seperti para Rasul Allah ulul azmi yang telah bersabar*. Para Rasul Allah yang termasuk ulul azmi adalah Nuh as, Ibrahim as, Musa as, Isa as, dan Muhammad saw.

Nama lima person Rasul Allah tersebut secara eksklusif disebut oleh Allah swt dalam QS 33/7 : *Dan ketahuilah ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil perjanjian yang teguh.*

Selanjutnya disebut dalam QS 42/13, sebagai berikut: *Dia telah mensyareatkan bagi kamu (Muhammad) tentang ajaran Agama, sebagaimana telah diwasiatkanNya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.*

***Syaykh al-Zaytun Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang**, Khutbah Idul Adha 1433 H/ 2012 M di Kampus Al-Zaytun pada tarikh 10 Dzul Hijjah 1433 H / 26 Oktober 2012 M*

Ditegaskan oleh Allah dalam QS 46/35 yang artinya: Maka bersabarlah kamu seperti para Rasul Allah ulul azmi yang telah bersabar. Para Rasul Allah yang termasuk ulul azmi adalah Nuh as, Ibrahim as, Musa as, Isa as, dan Muhammad saw.

Negara Mestinya Netral

Kekerasan atas nama agama pertanda pemahaman agama masih rendah sehingga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an atau kemajemukan (pluralitas) masih hadapi problem.

Negara seakan tidak hadir dalam beberapa kasus kekerasan yang menodai kehidupan beragama di Indonesia. Seperti kasus kekerasan yang menimpa kelompok minoritas Syiah yang terjadi di Sampang, Madura dan Ahmadiyah di Mataram, NTB dan beberapa tempat, serta penyegelan beberapa gereja.

Penilaian atas kealpaan negara tersebut dikemukakan beberapa tokoh. Di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD, yang mengaku heran kasus kekerasan di negeri ini bisa berlarut-larut. Mahfud mencontohkan sejumlah warga Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang masih mengungsi. "Ini hak asasi orang. Bayangkan kalau Anda yang diperlakukan seperti itu, diusir dari rumah sendiri. Keluar takut. Seakan-akan negara tak ada di situ," katanya.

Mahfud MD, N. Fatah Natsir, Hajriyanto Thohari, Kacung Marijan

Hal senada dikemukakan Prof. Dr. Kacung Marijan, MA, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) dan Staf Ahli Mendikbud. Dia menyoroti kekerasan atas nama agama yang kembali terjadi di Sampang. Kelompok pengikut Sunni dan Syiah bersitegang dan berakhir dengan pembakaran sejumlah rumah pengikut Syiah bahkan menelan korban jiwa yang memaksa kelompok Syiah mengungsi. Menurut Prof Kacung, apa yang terjadi di Sampang itu merupakan peristiwa buruk yang tidak perlu terjadi. Dia menegaskan konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama itu bukan hanya telah mencederai kesucian agama, melainkan juga mencederai rasa kebangsaan kita.

Hajriyanto Y Thohari, Wakil Ketua MPR RI memandang serangkaian peristiwa konflik dan kekerasan yang menimpa kelompok minoritas yang terjadi akhir-akhir ini menyadarkan kita bahwa persoalan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an atau kemajemukan (pluralitas) masih menjadi problem di negeri ini. Apalagi, problem ini bukan hanya menyangkut kemajemukan eksternal (pluralitas agama), melainkan yang tidak kurang gawatnya adalah kemajemukan internal (pluralitas internal agama). Maka dia mengingatkan tidak mengherankan jika Prof Nurcholish Madjid dulu sangat gigih mengajarkan dikembangkannya paham pluralisme eksternal dan sekaligus pluralisme internal di kalangan umat dan bangsa Indonesia.

Pengungsi Syiah Mampang, Madura [voa]

Mahfud MD menduga berlarut-larutnya penanganan kekerasan di masyarakat dikarenakan tak adanya ketegasan aparat penegak hukum, padahal aturannya jelas. Penegakan hukum, yang diharapkan menjadi penyelesai konflik di masyarakat, justru memunculkan ketidakadilan.

Ketua Presidiun Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof. Nanat Fatah Natsir juga mengatakan, negara harus tegas dan netral dalam mengusut kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti terhadap kelompok Syiah yang terjadi di Sampang, Madura. Dia mengatakan aparat penegak hukum harus bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan meluas ke wilayah lain. Karena itu, intelijen aparat penegak hukum harus mampu mendeteksi bibit-bibit kekerasan sedini mungkin.

Apalagi, menurut catatan Prof. Nanat Fatah Natsir, konflik yang muncul antara Sunni dan Syiah di Madura, sudah terjadi cukup lama, setidaknya sudah terjadi sembilan peristiwa konflik yang terjadi sejak 2006 yang melibatkan kedua kelompok aliran Islam itu. Maka, dia sangat merasa prihatin dengan kekerasan di Sampang yang mengatasnamakan agama sehingga sampai jatuh korban jiwa, pembakaran rumah dan pengusiran.

"Seharusnya kejadian kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak terjadi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Apalagi, kebebasan beragama diatur dalam konstitusi. Negara harus melindungi agama apa pun untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Nanat Fatah Natsir, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung tersebut.

Selaku Ketua Presidium ICMI, Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir, MS, menegaskan negara mestinya netral terhadap agama, tidak memihak agama manapun dan menjamin kebebasan penduduknya dalam menjalankan ibadahnya. "Harus kembali ke UUD 1945 pasal 29 ayat 2," tegasnya.

Prof. Nanat Fatah Nasir yang juga menjabat Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama, Kementerian Agama tersebut menegaskan negara tidak boleh memandang rendah agama manapun. Begitu juga tidak ada campur tangan bahkan terkait aliran yang dianut oleh rakyatnya. Dia menegaskan negara tidak boleh intervensi terhadap kebenaran agama, termasuk masalah alirannya. Terserah rakyat, mau memeluk mazhab mana.

Nanat berharap pemerintah harus segera mengambil jalan keluar terutama untuk menyelesaikan konflik dan melindungi korban. Korban kekerasan itu harus segera dikembalikan ke tempat tinggalnya semula dan mendapat perlindungan untuk menjalankan kepercayaannya.

Prof. Kacung Marijan juga memandang betapa penting kehadiran negara untuk mengatasi hal itu. Dia memandang perlu intervensi negara berupa aksi aparat negara, khususnya aparat keamanan dan penegak hukum, dalam melakukan pencegahan dan penanganan masalah kalau kerusuhan semacam itu terjadi. Menurutnya, bagaimana pun, negara merupakan institusi pokok yang memiliki kekuatan, termasuk kekuatan kekerasan, agar peristiwa-peristiwa semacam itu tidak terjadi.

Sementara, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, memandang pentingnya dialog eksternal dan internal agama diselenggarakan. Dialog itu, menurutnya, bukan hanya dialog-dialog yang berdimensi doktrinal atau mazhab, melainkan juga dialog-dialog karya yang jauh lebih konkret. Dialog-dialog itu secara langsung dan tidak langsung akan mengajarkan kepada umat masing-masing untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan harmonis meskipun berbeda paham, aliran, mazhab, dan praktik-praktik keagamaannya. Menurutnya, dialog-dialog antarmazhab ini setidaknya akan dapat meningkatkan pemahaman timbal balik antarmazhab yang berbeda. Lebih daripada itu akan mengurangi ketegangan antargolongan keagamaan yang diakibatkan ketidaktahuan atau ketidakmengertian di antara satu golongan atau aliran dengan golongan atau aliran yang lain.

Prof. Nanat Fatah Nasir pun berharap ke depan semakin tinggi sikap toleransi antarumat beragama di Tanah Air. Harapan ini berkaitan dengan semakin tingginya pamahaman agama rakyat Indonesia. Sebab menurutnya, tinggi tidaknya toleransi seseorang tergantung tingkat pemahaman akan agama. "Semakin tinggi pemahaman agamanya, maka dia akan semakin toleran. Begitu juga sebaliknya," jelasnya. ■ mbi/tsl

Menuju Ketahanan Pangan

YPI Bersama Masyarakat Lingkungan Al-Zaytun

YAYASAN PESANTREN INDONESIA (YPI) bekerjasama dengan Masyarakat Lingkungan A-Zaytun yang tersebar di Kecamatan Gantar, Haurgelis, Kroya dan Bongas untuk menggarap lahan pertanian YPI seluas 500 hektar (lk. 714 bahu). Mereka tergabung dalam Delapan Kelompok Tani, dengan sistem kerja sama bagi hasil. Kerjasama tersebut dimulai musim tanam tahun ini (2012-2013). FOTO ATAS: Anwar dari Blok Balir II, salah satu Ketua Kelompok Tani, sedang menerima Surat Perjanjian Kerjasama dari Syaykh Al-Zaytun. FOTO BAWAH: Para Kelompok Kerja yang siap bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun. ■ **mbi-maz**

Kurban Diantar Langsung

Santri Al-Zaytun mengantar langsung bingkisan kurban ke rumah warga

Tidak seperti di kebanyakan tempat, yang masih sering diwarnai kericuhan dan berdesak-desakan sehingga tak jarang mengakibatkan jatuhnya korban saat pembagian daging kurban, di Al-Zaytun sudah sejak awal dilakukan dengan mengantar langsung kepada para mustahiq (penerima daging kurban).

Selain untuk menghindari masyarakat berjubel dan berdesak-desakan, tradisi antar langsung itu juga dimaksudkan agar para santri terjun langsung melihat kondisi masyarakat sekaligus membina hubungan kekerabatan antara Al-Zaytun dengan masyarakat.

Seperti biasa untuk mempercepat pendistribusian daging kurban sampai ke tangan mustahiq, beberapa truk dikerahkan untuk mengangkut daging dan beras yang telah disiapkan. Tiap truknya didampingi sebanyak 40 orang santri sehingga proses pembagian hewan kurban bisa berlangsung lebih cepat dan tertib.

Para warga memuji apa yang dilakukan Al-Zaytun dengan mengantarkan langsung hewan kurban tanpa harus menyuruh warga untuk datang berjubel-jubel lalu berdesak-desakan. Para mustahiq yang menerima hewan kurban yang rata-rata petani ini mengaku senang mendapat bingkisan daging kurban dari Al-Zaytun.

Hari raya kurban, Idul Adha, dilakukan merujuk pada tuntunan Nabi Muhammad SAW dan telah diteladankan oleh nabi Allah Ibrahim a.s dalam Al-Quran. Seiring dengan itu, umat muslim di dunia melakukan pemotongan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Demikian pula Al-Zaytun selalu berbagi dengan masyarakat desa di sekelilingnya.

Dari pantauan Berita Indonesia, kemeriahan perayaan kurban di Al-Zaytun selalu melibatkan para santri, eksponen dan para wali santri. Meski sudah merupakan kegiatan rutin tahunan, mereka selalu antusias dalam pemotongan hewan kurban yang dilakukan di *basement* Masjid Rahmatan Lil Alamin.

Setiap tahun Al-Zaytun selalu menyediakan hewan kurban dalam jumlah yang tidak sedikit untuk dibagikan kepada 3 ribuan mustahiq, yang tersebar di wilayah Kecamatan Gantar, Indramayu, meliputi Desa Mekarjaya, Balai Raja, Situ Raja, Sanca, Gantar, Bantar Waru; Juga dibagikan di kalangan internal kampus Al-Zaytun baik karyawan, guru, saiq (driver) yayasan, pelaksana pertanian atau pekerja pertanian maupun para tukang ojek yang mangkal di sekitar kampus. Rata-rata mustahiq mendapat hampir satu kilogram daging kurban ditambah beras. ■ **mbi**

Presiden Serukan Antipenistaan Agama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, 26/9/2012 menyerukan perlunya protokol internasional antipenistaan agama guna mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia. "Instrumen ini, yang merupakan produk dari konsensus internasional, harus dapat menjadi referensi yang dipatuhi oleh komunitas dunia," kata Presiden SBY yang berpidato di hari pertama sidang tersebut bersama dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Prancis Francois Hollande.

Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa sebagai sebuah negara yang menghormati keberagaman budaya dan agama, Indonesia menyeru penghormatan dan pemahaman yang sama dari kelompok-kelompok keyakinan yang berbeda. Presiden menilai, sekalipun ada sejumlah inisiatif yang dilakukan oleh beberapa negara di PBB dan sejumlah forum lain, pelecehan terhadap agama-agama di dunia tetap terjadi. Dalam hal ini, kata Presiden, kita menyaksikan kembali wajah jelek dari bentuk penistaan agama dalam film 'Innocence of Muslims' yang menyebabkan keresahan internasional.

Presiden menggarisbawahi bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manu-sia telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan kebebasan berekspresi setiap orang harus mematuhi morali-tas dan ketertiban publik. Jadi, tegas Presiden, kebebasan berekspresi tidak absolut. Presiden juga mengatakan bahwa dunia internasional perlu untuk mempromosikan proses dialog di antara umat beragama, peradaban dan kebudayaan. Namun, kata Presiden, dialog itu jangan hanya berhenti pada dialog tetapi juga diterjemahkan ke kerja sama nyata sehingga individu dari beragam agama dan budaya dapat bekerja sama dan saling peduli.

Berbagai pihak mengapresiasi Pida-to Presiden tersebut yang dianggap merupakan representasi dari aspirasi rakyat Indonesia yang marah dengan film 'Innocence of Muslims' yang telah melecehkan Nabi Muhammad SAW. Kendati ada juga yang bertanya-tanya mengapa seruan-seruan terkait dengan kehidupan beragama yang lainnya tidak juga disampaikan Presiden? Bukankah problem kebebasan beragama dan beribadah di sejumlah tempat, baik di dalam negeri maupun regional, tak kalah penting pula untuk disuarakan? ■ **mbi**

Dunia Terpikat Pesona Batik

Sejumlah perancang mancanegara pun tergiur mengeksplorasi lembaran kain bercita rasa tinggi khas nusantara ini di sejumlah karya mereka.

Di tengah tren busana kontemporer, batik muncul sebagai busana kebanggaan bangsa Indonesia. Batik bukan lagi sekadar pakaian resmi atau formal untuk keperluan hajatan atau kerja kantoran. Batik sekarang ada di mana-mana.

Tiga tahun lalu, tepatnya 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai 'Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi' milik Indonesia. Semenjak itu, pemerintah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.

Menurut sejumlah ahli, kata "Batik" berasal dari bahasa Jawa. Batik, berasal dari kata 'ngembat (disingkat mbat)' dan titik (tik)'. Kedua kata ini bermakna 'melontarkan titik'. Artinya, kegiatan membatik sama dengan melemparkan atau melontarkan titik demi titik pada sebuah kain yang berwarna putih.

Pola pembuatan batik diperkirakan diperkenalkan dari India atau Srilanka pada abad ke-6 atau 7. Akan tetapi di daerah tertentu di Indonesia, seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua, tradisi batik menjadi tradisi asli mereka. Padahal mereka tak terpengaruh Hinduisme. Ini menguatkan batik sebagai tradisi Indonesia.

Pola-pola batik tradisional dikenal di Jawa sejak abad ke-12. Pada awalnya, batik bersifat eksklusif, hanya dibuat dan dikenakan untuk kalangan keraton. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, penggunaan batik meluas hingga ke kalangan rakyat jelata.

Dalam literatur Eropa, teknik batik pertama kali diceritakan dalam buku History of Java (Sir Thomas Stamford Raffles, London, 1817). Sejak itu batik banyak dikenal di Eropa sebagai kain karya budaya Indonesia. Ketika dipamerkan di Exposition Universelle, Paris, tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman.

PESONA BATIK: Sejumlah model dunia mengenakan batik (atas). Para kepala negara mengenakan batik dalam acara bertajuk "Voices of Peace" pada jamuan makan malam KTT ke-19 ASEAN di Ballroom Bali Nusa Dua Convention Centre, 18/11/2011

Perkembangan batik dewasa ini pun sudah sangat pesat. Pada tahun 1960-an, penggunaan baju batik dilakukan sebagai pakaian resmi non-Barat khas Indonesia. Dan kini, ia tidak hanya dianggap sebagai pakaian resmi atau formal. Batik tak lagi sekadar jarik atau kemben yang identik dengan masyarakat pedesaan tempo dulu. Wujudnya pun tak melulu helaian kain panjang tanpa jahit. Kain bermotif yang dilukis dengan lelehan malam panas itu telah menjadi bagian tren fashion kelas dunia.

Batik tidak lagi menjadi pakaian orang-orang tua yang dipakai ketika ada hajatan. Bukan hanya pakaian 'resmi' di kantor setiap hari Jumat. Sekarang, tua, muda, anak-anak, tak lagi merasa malu membalut tubuh dengan batik. Mereka menenakannya di berbagai kesempatan: kantor, sekolah, mal, dan tempat wisata.

Kala memakai batik, ada segenggam kebanggaan terhadap Indonesia di dalamnya. Batik sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Bahkan dunia pun terpikat dengan pesona batik. Sejumlah perancang mancanegara tergiur mengeksplorasi lembaran kain khas nusantara ini di sejumlah karya mereka.

Perancang asal Belgia, Dries Van Noten, misalnya tertarik dengan batik parang. Ia berusaha mengawinkan pesona batik dengan detail modern, dalam serangkaian koleksi Spring /Summer 2010. Ada pula Nicole Miller, desainer asal Australia yang sohor di Amerika menunjukkan hasratnya terhadap batik pesisir dan mega mendung khas Cirebon lewat serangkaian koleksi resort 'Bali' 2009.

Rumah mode Versace dan Armani pun konon bakal mengangkat eksotika batik sogan khas Solo dalam rangkaian koleksi teranyar yang akan diperagakan di Italy Fashion Week pada Januari 2013.

Terangkatnya batik ke kancah internasional kian kukuh lewat penampilan sejumlah selebritas. Mereka yang tertangkap kamera berbalut batik antara lain, Jessica Alba, Reese Witherspoon, Rachel Bilson, Lenka, dan Drew Barrymore.

Nelson Mandela, tokoh anti-apartheid yang sangat dihormati bangsa Afrika Selatan, bahkan telah menjadikan batik sebagai kostum utamanya. Di berbagai forum dunia, ia selalu mengenakan batik, yang kebanyakan dari Indonesia.

Meski UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia, batik rupanya tak hanya berkembang di Indonesia. Selain di Afrika yang populer dengan sebutan 'Madiba's Shirt' alias pakaian Mandela, batik juga muncul di Malaysia, Jepang, China, India, Jerman, dan Belanda. ■ **cid**

Geliat Wisata Minat Khusus

Pariwisata Indonesia sedang menghadapi tren perubahan paradigma, dari wisata massal menjadi wisata minat khusus. Banyak daerah berlomba-lomba mengembangkan wisata minat khusus untuk menarik wisatawan dan menambah pemasukan daerah.

WISATA ALAM: Salah satu wisata gua yang menarik bisa ditemukan di Gua Pindul di Gunungkidul Jogjakarta. Para wisatawan menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban dalam (cavetubing)

Dua dekade terakhir, wisata minat khusus berkembang pesat terutama di negara-negara berkembang. Pada dasarnya, wisata minat khusus mempunyai kaitan dengan petualangan dan keunikan. Wisatawan secara fisik mengeluarkan keringat dan menguras tenaga dan ada unsur tantangan yang harus dilakukan. Bentuk wisata minat khusus kategori petualangan misalnya safari di daerah terpencil, trekking, hiking, pendakian gunung, rafting di sungai, penelusuran gua (caving) dan berperahu. Berburu dan memancing di laut dapat dikategorikan sebagai bentuk wisata minat khusus.

Wisata minat khusus tidak memerlukan fasilitas yang mahal dan pengembangan infrastruktur dalam skala besar. Sebab dalam banyak hal, wisata minat khusus dikaitkan dengan perjalanan aktif dan memberi pengalaman baru, perjalanan ke pedalaman untuk bertemu masyarakat terasing atau wisata sosial, wisata pendidikan, berwisata yang berbasis alam atau wisata yang bertujuan untuk pelestarian.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, gunung yang banyak, bahkan budaya dan kuliner yang sangat beragam, menawarkan segudang potensi wisata minat khusus. Oleh sebab itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupaya menonjolkan wisata minat khusus dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Ada tujuh tema yang diambil yaitu wisata budaya dan sejarah, wisata alam dan ekowisata, wisata olahraga dan rekreasi, wisata kapal pesiar, wisata kuliner dan belanja, wisata kesehatan dan kebugaran, serta wisata konvensi, insentif, pameran, dan *event*.

Wisata sejarah dan budaya, misalnya, berkaitan erat dengan ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan dan seni musik, serta seni rupa dan arsitektur tradisional. Untuk wisata sejarah, Indonesia punya banyak sekali bangunan sejarah mulai dari candi hingga gedung-gedung bersejarah. Contohnya, situs Sangiran, Candi Borobudur, Gedung Sate, hingga Museum Bank Mandiri. Untuk wisata budaya, Indonesia mempunyai sejuta festival mulai dari upacara adat, seni rupa, tarian, wayang, hingga beragam tradisi yang bisa diikuti wisatawan. Adat tradisional yang mencerminkan kearifan lokal juga menarik untuk para wisatawan.

Ekowisata pun menjadi wisata minat khusus. Sebab, kegiatan ramah lingkungan ini sedang menjadi tren di masa sekarang. Wisata kuliner dan belanja juga tak dapat dipisahkan. Sebab, menurut Kemenparekraf, pada tahun 2009, wisatawan mancanegara (wisman) lebih banyak belanja kuliner dibandingkan wisatawan nusantara (wisnus). Atau dengan kata lain, sebagaimana dituturkan Menparekraf, Mari Pangestu, biasanya wisman lebih suka kuliner lalu belanja, sedangkan wisnus lebih suka belanja dulu baru makan.

Indonesia juga mempunyai potensi besar untuk wisata konvensi, insentif, pameran, dan event (MICE). Untuk wisata MICE, Indonesia terus mempromosikan 15 kota MICE. Jakarta, misalnya, menjadi kota digelarnya beragam pameran internasional. Selesai pameran, tak sedikit peserta yang melanjutkan perjalanan dengan berwisata.

Sedangkan untuk wisata olahraga dan rekreasi, ada golf, surfing, diving, cycling, trekking, hiking, dan cavetubing. Acara Tour de Singkarak 2012 yang digelar 4-

WISATA KESEHATAN DAN KEBUGARAN: Salah satu pulau yang menyuguhkan wisata spa adalah Bali. Di Pulau Dewata tersebut, terdapat "Balinese massage", dimana Anda dipijat menggunakan minyak esensial dari bahan-bahan tradisional khas Bali

10 Juni 2012 lalu merupakan salah satu bentuk wisata minat khusus kategori wisata olahraga dan rekreasi. Balap sepeda bertaraf internasional itu mengenalkan keindahan alam Sumatera Barat seperti Lembah Harau, Lembah Anai, dan lain-lain, kepada para peserta dari berbagai negara.

Indonesia juga berpotensi mengembangkan wisata kapal pesiar karena berbentuk kepulauan. Perairan Indonesia juga punya panorama super indah, mulai dari Raja Ampat sampai Batam-Bintan. Rencananya, ada 10 pelabuhan yang akan dikembangkan dalam 3 tahun ke depan untuk melayani kapal pesiar yang besar. Event seperti Sail Morotai merupakan cara untuk mendatangkan kapal pesiar mancanegara. Mereka akan melihat keindahan laut Indonesia dan menyaksikan sendiri bentangan pantai nan memesona. Rencananya akan diadakan Sail Komodo pada tahun 2013 sebagai bagian dari upaya mempromosikan wisata kapal pesiar.

Terakhir, adalah wisata kesehatan dan kebugaran. Spa termasuk wisata minat khusus bagi wisatawan. Salah satu pulau yang menyuguhkan wisata spa adalah Bali. Di Pulau Dewata tersebut, terdapat "Balinese massage", dimana Anda dipijat menggunakan minyak esensial dari bahan-bahan tradisional khas Bali. Bahkan, sekarang sudah ada rumah sakit yang menawarkan wisata kesehatan dan kebugaran. ■ **cid**

WISATA OLAHRAGA: TOUR de Singkarak 2012 yang berlangsung 4-10 Juni 2012 di Sumatera Barat merupakan perpaduan menarik antara olahraga balap sepeda bertaraf internasional dengan pengenalan potensi pariwisata serta budaya Indonesia

Petualangan Terakhir Divisi Fringe

Atmosfir serial ini begitu khas membuat penonton rindu akan plot ceritanya yang sering maju mundur, kisah science fiction yang gila, the observer, cortexiphan, alternate universe, hingga kisah cinta yang kuat. Pada season 5 yang menjadi kisah penutup, semua pertanyaan dan rasa penasaran akan terjawab, *full action* tanpa *filler*.

Serial TV yang ditayangkan di Channel FOX Asia setiap jam 9 malam ini berbeda dengan kebanyakan serial TV *science fiction* lainnya. Fringe ciptaan J.J. Abrams (pembuat Lost dan Alias), Alex Kurtzman dan Roberto Orci, ini adalah serial kreatif yang telah menetapkan standar tinggi untuk drama paling imajinatif di layar televisi. Tema serial ini adalah Fringe Sciences, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang berada di luar teori-teori *science* ortodoks karena tidak mempunyai dasar keilmiahan yang kuat. Semua fenomena yang terjadi di serial ini selalu dipandang dari sudut kacamata ilmiah, betapapun absurdnya itu. Teleportasi, pyrokinesis, dunia paralel, kemampuan psikis, dan sebagainya dijelaskan sebagai hal-hal yang sudah ada dan beberapa memang sedang dalam penelitian.

Dibintangi oleh Olivia Dunham (Anna Torv), seorang agen FBI yang cantik dengan senyum menawan namun tidak mudah dekat dengan orang lain. Ada pula Walter Bishop (John Noble) yang menjadi otak utama dari Divisi Fringe. Dia adalah *mad scientist*, alias 'ilmuwan gila' yang bisa memahami dan menemukan solusi untuk kasus-kasus aneh yang disebut The Pattern (Season 1). Walter disebut *mad scientist* karena pada masa lalu banyak membuat eksperimen yang cenderung melanggar etika ilmiah. Sebagian besar kasus yang ditangani Divisi Fringe ternyata berasal dari eksperimen-eksperimennya itu. Banyak penonton termasuk kritikus film memuji John Noble karena kepiawaiannya berakting sebagai Walter Bishop yang *moody*. Karakter Walter ini pulalah yang sering mengocok perut penonton.

Selain itu, ada Peter Bishop (Joshua Jackson), anak dari Walter, yang banyak membantu dalam penelitian dan menenangkan kondisi emosional ayahnya ; Phillip Broyles (Lance Reddick) berperan sebagai agen Homeland Security yang memimpin Divisi Fringe ; dan Astrid Farnsworth (Jasika Nicole) berperan sebagai agen FBI junior yang menjadi asisten bagi Olivia dan Walter.

Selain menyajikan berbagai fenomena sains yang aneh, Fringe juga menonjolkan kisah cinta yang kuat antara Olivia Dunham dan Peter Bishop. Kisah di antara mereka berdua diuntai perlahan-lahan sehingga perasaan penonton dibuat terombang-ambing dan penasaran. Hubungan cinta mereka semakin berliku di Season 5 sebab muncul karakter baru bernama, Henrietta, anak perempuan dari Olivia dan Peter.

Sepanjang Season 1 hingga Season 4, penonton disuguhkan kisah yang saling bertalian pada setiap episodenya. Plot ceritanya sering dibuat maju mundur seperti yang kita jumpai pada serial Lost. Itulah sebabnya, menonton Fringe harus dimulai dari awal dan urut agar mengerti latar belakang ceritanya. Berbeda dengan serial seperti CSI, Criminal Minds atau NCIS yang relatif bisa ditonton tanpa mengikuti urutan episode/season.

Season 1 berkutat pada The Pattern, namun menjelang akhir season dan sepanjang Season 2, fokus bergeser ke dunia paralel (parallel universe). Pada season 3, kisah cinta Olivia Dunham dan Peter Bishop dibuat semakin rumit dan memilukan sebab Peter Bishop malah menambatkan hatinya pada Olivia Dunham veri dunia paralel. Sementara Olivia Dunham yang sebenarnya, terjebak di dunia paralel. Walaupun akhirnya, hubungan mereka mulai membaik di akhir episode season 3.

Di episode terakhir Season 3, Peter Bishop berhasil menghubungkan dua dunia itu sehingga tidak saling menghancurkan. Dengan konsekuensi, Peter Bishop menghilang dari sejarah (*timeline*). Pada Season 4, Olivia Dunham dkk bekerja di Divisi Fringe seperti sedia kala dengan pengetahuan bahwa Peter Bishop tidak berhasil diselamatkan oleh ayahnya dan meninggal saat masih kecil. Pada Season 4 ini, Olivia dkk melewati banyak petualangan di dua dunia, dunia sekarang dan dunia paralel termasuk pula perjumpaan dengan anak-anak Cortexiphan. Peter Bishop akhirnya muncul kembali (episode 4) dengan kenyataan bahwa kekasihnya, Olivia Dunham tidak mengenalinya sama sekali.

Boleh dibilang, kisah cinta Olivia dan Peter kembali dikemas dengan cantik dan menggetarkan. Pada episode terakhir Season 4, dunia nyata dan dunia paralel akhirnya tidak bisa lagi terhubung. Olivia pun mengaku pada Peter bahwa ia hamil. Saat berbicara, Olivia sempat terhenti sejenak sebelum memberitahu Peter bahwa dia hamil. Mengapa Olivia seperti tertahan untuk bicara, penonton akan mengerti di Season 5.

Pada Season 5 yang menjadi season penutup, cerita berfokus pada The Observer dan apa yang terjadi di tahun 2036 dimana Olivia dkk dibangunkan setelah beku dalam amber sejak tahun 2015. Olivia dan Peter bertemu dengan putrinya, Henrietta yang telah beranjak dewasa. Co-creator "Fringe" dan produser eksekutif J.J. Abrams mengatakan bahwa Fringe akan berakhir dengan cara yang sangat luar biasa. Pernyataan J.J. Abrams itu tentu membuat penonton semakin penasaran. Seperti apa hubungan Oliva, Peter dan Henrietta? Apa yang terjadi selama 21 tahun sejak mereka terakhir kali melihat satu sama lain? Apakah mereka berhasil menyelamatkan dunia dengan mengalahkan The Observer? Jawabannya diungkap di 13 episode Season 5, tayang 28/09/2012 - 18/01/2013. ■ **cid**

Tarif Listrik Naik 1 Januari 2013

Pemerintah sudah mendapat izin DPR untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% pada 2013 dan telah sepakat menetapkan subsidi listrik sebesar Rp.78,63 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman (21/9), atas persetujuan tersebut, pemerintah memastikan akan menaikkan TDL secara bertahap mulai 1 Januari 2013. Dia menegaskan pemerintah mencabut subsidi listrik untuk mal, hotel, dan rumah mewah. "Tahun depan sudah tidak ada lagi mal, hotel,dan rumah mewah dengan daya 6.600 VA diberi subsidi listrik oleh negara," katanya.

Jarman menjelaskan, golongan-golongan yang dicabut subsidi listriknya harus membayar TDL sesuai ketentuan biaya pokok produksi (BPP) listrik ditambah margin 7%. "Subsidinya dicabut bukan berarti mereka membayar tarif berdasarkan harga keekonomian. Tetapi mereka membayar tarif berdasarkan BPP listrik yakni Rp1.163 per kWh ditambah margin PLN 7% yang telah ditetapkan," jelasnya. Namun, belum dipastikan tahapan kenaikan dilakukan per bulan atau triwulanan. Jarman memastikan, sebelum 1 Januari 2013, aturan mengenai kenaikan TDL tersebut sudah diselesaikan. Pemerintah sedang menghitung besaran kenaikan TDL untuk masing-masing golongan. Pemerintah juga akan mengajak pelaku industri untuk membahas kenaikan TDL tersebut guna mendapatkan besaran kenaikan TDL berdasarkan golongan masing-masing industri.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Nur Pamudji kepada wartawan di Jakarta (28/9) mengatakan simulasi kenaikan TDL saat ini sedang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan. "PLN hanya menyediakan data-data histogram terkait pembayaran tagihan pelanggan per golongan untuk dirata-ratakan besaran kenaikan TDL tersebut," jelasnya. Kenaikan listrik rencananya dilakukan secara bertahap hingga mencapai 15% agar tidak terlalu memberatkan konsumen.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini menambahkan, meski tarif untuk sejumlah golongan mengalami kenaikan, pemerintah sejatinya masih memberikan subsidi listrik ke industri sebesar Rp20 triliun tahun depan (2013). "Subsidi yang diberikan ke industri dikurangi sedikit dan membuat kenaikan tarif listrik untuk golongan industri paling tinggi dibandingkan golongan lain. Tetapi kan mereka tetap diberikan subsidi," tegasnya. Rudi mengatakan, satu industri bisa mendapat subsidi hingga miliaran rupiah. "Angka itu jauh lebih besar ketimbang golongan rumah tangga yang meski disubsidi sebesar Rp40 triliun, tetapi peruntukannya adalah bagi 39 juta lebih pelanggan," jelas Rudi.

Menkeu Agus Martowardojo

Kendati pemerintah masih memberikan subsidi listrik Rp 20 triliun kepada industri, mereka masih menjerit dan hendak menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Makanya sudah mereka (industri) dapat miliaran, yang sudah dapat ratusan miliar menjeritkan sekarang (karena kenaikan tarif listrik tahun depan), mereka mau Judicial Review (gugat ke Mahkamah Konstitusi), yang benar saja, sudah dapat ratusan miliar masih menjerit," tandas Rudi Rubiandini.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menanggapi sikap para pengusaha yang menyatakan keberatan dengan rencana kenaikan TDL 15% tahun depan secara bertahap dengan akan mengajukan *judicial review* ke MK tersebut mengimbau para pengusaha ataupun *stakeholder* untuk tidak bikin tradisi mengajukan *judicial review*. "Kita bicara baik-baik. Ini negara Indonesia, negara sama-sama dan jangan bikin tradisi untuk mudah melakukan *judicial review*," ujar Agus Marto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Agus Martowardojo menjelaskan subsidi listrik yang disetujui APBN-P 2012 sekitar Rp 64 triliun. "Kita perkirakan saat ini kalau tidak hati-hati, peningkatan subsidi listrik bisa sampai Rp 89 triliun," kata Agus kepada pers di Jakarta (20/9/2012). Menteri Keuangan mengatakan, subsidi listrik tinggi karena PLN masih banyak menggunakan BBM untuk pembangkit listriknya. Sehingga biaya produksi listrik masih mahal.

Menurut Agus, pemerintah saat ini fokus untuk menekan subsidi energi yaitu untuk BBM dan listrik yang jumlahnya meningkat tinggi tahun ini. Tetapi, kata Agus, program konversi BBM ke gas, serta penggunaan energi terbarukan yang lebih murah tidak jalan. "Entah apa penyebabnya, yang pasti penggunaan BBM masih tinggi, bahkan Indonesia terpaksa impor dalam jumlah besar," keluh Agus. Dia menjelaskan, saat ini, produksi gas dalam negeri sebenarnya cukup tinggi dibandingkan minyak. Namun penggunaan energi di Indonesia masih didominasi oleh BBM yang harganya mahal. Ujung-ujungnya, subsidi yang dikeluarkan tinggi. "Khusus untuk listrik memang peningkatan yang tinggi subsidi listriknya itu adalah karena lambatnya program pembangunan pembangkit 10 ribu megawatt (MW) tahap satu yang menggunakan batubara. Jadi pembangkit listrik berba-

Wamen ESDM Rudi Rubiandini

Dirut PLN Nur Pamudji

han bakar BBM masih banyak. Belum lagi beberapa pembangkit gas kita belum berhasil," ujar Menkeu.

Agus menjelaskan dengan kenaikan TDL, maka akan ada anggaran yang dapat dihemat sebesar Rp 11,8 triliun yang nantinya akan dialokasikan untuk infrastruktur. "Akan kita akan alokasikan semuanya untuk infrastruktur, ada di 4 area utama," tandasnya. Berdasar Nota Keuangan RAPBN 2013, belanja energi dipatok sebesar Rp274,74 triliun dengan jumlah subsidi untuk BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun.

Sementara itu, konsumen meminta peningkatan pelayanan PLN. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, saat ini pengaduan pelanggan terhadap pelayanan listrik di Indonesia masih tinggi dibandingkan negara- negara ASEAN lainnya. Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo dalam acara lokakarya nasional bertajuk "Menuju Pelayanan Jasa Kelistrikan yang Bebas Korupsi" di Jakarta (28/9)menjelaskan, persentase pengaduan pelanggan listrik di Indonesia masih berada dalam kisaran 10-13%. Jika dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia jauh tertinggal karena pengaduan pelanggan negeri jiran tersebut atas layanan penyedia listriknya hanya sekitar 3%. Apalagi jika dibandingkan dengan Hongkong, menurut data YLKI, di sana tidak ada pengaduan sama sekali.

Sudaryatmo mengungkapkan keluhan pelanggan tertinggi di Indonesia adalah masalah penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), yakni mencapai 30%. Keluhan kedua adalah pemenuhan hak-hak informasi pelanggan, seperti laporan layanan gangguan dan hak mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Keluhan ketiga terbanyak adalah pengaduan kualitas tegangan, terkait dengan pemadaman. ■ **mbi-san**

Prototipe Mobnas Selesai 2013

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan penyusunan platform dan prototipe mobil nasional (mobnas) selesai pertengahan tahun 2013.

Menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi Agson Gani mengatakan akhir tahun depan sudah keluar prototipenya. Dia menegaskan *platform* mobnas yang tengah disusun tersebut akan menciptakan pasar sendiri sehingga tidak akan mengganggu industri otomotif nasional yang sudah ada.

Dengan demikian, Erzi Agson Gani berkeyakinan akhir 2014 sudah ada yang memproduksi. "Pertimbangan utama dari penyusunan *platform* itu adalah hemat energi serta mempunyai banyak turunan produk," kata Erzi seusai pembukaan "Pameran dan Seminar Industri Permesinan dan Alat Transportasi" di Kemenperin, Jakarta (26/9). Namun, dia belum bisa membeberkan apa jenis bahan bakar yang akan digunakan oleh mobnas tersebut.

Perihal kandungan lokal, akan dimulai dari angka 40% sesuai dengan target dari Kemenperin. Mesinnya juga di bawah 1.000 cc. Erzi mengatakan, BPPT mengembangkan mesin berkapasitas 650 cc. Dia mengungkapkan pemerintah menginginkan adanya lokalisasi mesin, atau kemampuan nasional untuk membuat mesin bagi mobnas tersebut.

Sementara Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin, Budi Darmadi menekankan perlu adanya kesamaan *platform* untuk menekan biaya produksi. Menurut Budi, tanpa kesamaan *platform*, komponen mesin yang bisa diproduksi di dalam negeri malah harus diimpor dengan bea masuk yang cukup tinggi. "Akibat *platform* yang belum terfokus, varian produk *principal* lokal sangat banyak, sedangkan desain dan kapasitas mesin yang dihasilkan berbeda-beda," jelasnya.

Ketua Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma), Dasep Ahmadi juga mengungkapkan, pihaknya dan para *principal* mobil lokal juga telah membentuk sebuah tim kerja guna membahas platform mobnas tersebut. ■ **mbi-san**

BUMN-DKI Kerjasama Bangun Underpass

Meneg BUMN Dahlan Iskan berencana bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun 24 jalan bawah tanah (*underpass*) pada perlintasan rel kereta api. Dahlan Iskan menyatakan hal itu menjawab pers, di Jakarta, sehari setelah Pemilukada DKI Jakarta yang dimenangkan Jokowi-Basuki.

Dahlan menegaskan BUMN akan membantu Pemda DKI untuk membangun *underpass*, di mana PT KAI Persero akan menjadi koordinatornya. Menurutnya, pembangunan *underpass* ini untuk mengatasi kemacetan di wilayah yang dilintasi oleh Kereta Rel Listrik (KRL) milik PT KAI Persero.

Dia memberi contoh, selama ini masyarakat pengguna roda empat sering mengalami kesulitan bila pintu lintasan rel KA tertutup. "Nantinya, masyarakat secara luas dapat merasakan pembangunan *underpass* ini," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama KAI Ignasius Jonan telah meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera membangun *fly over* dan *underpass* di perlintasan kereta api. Langkah ini perlu segera dilakukan terkait dengan dioperasikannya secara resmi KRL Commuter Line. Pembangunan *fly over* dan *underpass* tersebut selain bisa membantu frekuensi perjalanan kereta sehingga lebih cepat mencapai tujuan, juga untuk mengurai kemacetan lalulintas Jakarta. ■ **mbi-san**

Ancaman di Kutub Utara

Kawasan Kutub Utara mengalami pemanasan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan kawasan lain di seluruh planet Bumi.

MELELEH: Musim panas di Svalbard, sebuah kepulauan di kawasan Kutub Utara, bagian dari Norwegia, kini lebih hangat dibandingkan dengan waktu manapun selama 1.800 tahun terakhir

Kehilangan lapisan es menyebabkan samudera menyerap lebih banyak energi dari matahari dan kemudian melelehkan lebih banyak es dan terus menyebabkan kenaikan penyerapan energi panas dan ini terus berulang.

Para peneliti dari Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, Amerika Serikat, mengamati catatan perubahan iklim selama 1.800 tahun terakhir. Mereka menganalisa tingkat lemak tak jenuh pada ganggang yang terkubur dalam lapisan sedimen di danau Kongressvatnet, Svalbard, sebuah kepulauan di kawasan Kutub Utara, bagian dari Norwegia.

Menurut peneliti, pada air yang lebih dingin, ganggang memproduksi lebih banyak lemak tak jenuh. Sementara jika kondisi air lebih hangat, mereka memproduksi lemak jenuh. Tingkat lemak pada ganggang tersebut bisa menyediakan informasi perubahan iklim yang terjadi di masa lalu.

Hasilnya, dalam laporan yang dipublikasikan di jurnal Geology, musim panas di kepulauan tersebut kini lebih hangat dibandingkan dengan waktu manapun selama 1.800 tahun terakhir. Termasuk di abad pertengahan, saat bagian dari belahan bumi utara sama panas atau bahkan lebih panas dibanding saat ini.

Saat mendapati bagaimana musim panas di Svalbard bervariasi, peneliti juga menemukan bahwa pada periode "Little Ice Age" yang terjadi pada abad 18 dan 19, gletser di Svalbard tumbuh mencapai ukuran terbesarnya dalam 10 ribu tahun terakhir.

Namun, pengukuran suhu yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa kawasan Arktik mengalami pemanasan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan kawasan lain di seluruh planet Bumi. Dengan tingkat ketebalan es di laut mencapai titik tertipis dalam sejarah. Kehilangan lapisan es ini menyebabkan samudera menyerap lebih banyak energi dari matahari dan kemudian melelehkan lebih banyak es dan terus menyebabkan kenaikan penyerapan energi panas dan seterusnya.

Dari pemodelan iklim yang dibuat oleh International Panel on Climate Change, tahun 2100 mendatang, Svalbard akan menghangat jauh lebih cepat dibandingkan dengan kawasan lain di Bumi karena kombinasi hilangnya es laut dan perubahan atmosfer dan sirkulasi arus laut.

Sebelum ini, dalam sebuah studi yang pernah dipublikasikan di jurnal Advances in Meteorology, sejumlah peneliti Norwegia memperkirakan bahwa rata-rata temperatur musim dingin di Svalbard bisa naik sampai 10 derajat Celsius. ■

Ekosistem Pasifik Akan Bergeser

Kurang dari seabad lagi, diprediksi akan terjadi perubahan lokasi dari para penghuni laut di Samudera Pasifik. Mereka diperkirakan bakal berpindah lebih dari 965 kilometer di tahun 2100. Dari beberapa hewan besar, penyu, hiu, dan paus, akan menerima dampak paling besar. Ini akhirnya berekses pada komunitas dan industri yang bergantung pada hasil laut termasuk menyebabkan hilangnya 20 persen keanekaragaman hayati.

Demikian hasil kesimpulan studi terbaru yang dipublikasikan Nature Climate Change yang meneliti distribusi fauna di utara Pasifik. Studi ini mempelajari perubahan yang akan terjadi di lokasi tersebut seiring meningkatnya suhu laut dan level produksi. Kesimpulan pergeseran ini didapat setelah para peneliti yang terlibat menggabungkan model matematika dengan data dari "Tagging of Pacific Predators" (TOPP). Sekitar 4.300 tag elektronik dari TOPP ditempatkan pada 23 spesies dengan rentang waktu 2000-2009. ■

Laju Oksidasi Samudra Mengkhawatirkan

Dalam ajang "International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World" ketiga yang digelar di Monterey, California, Amerika Serikat, akhir September 2012, Daniela Schmidt, geolog dari School of Earth Sciences, University of Bristol memperingatkan, kecepatan oksidasi samudra saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah planet Bumi.

Schmidt menyebutkan, oksidasi yang paling mirip dengan kondisi yang tengah berlangsung saat ini kemungkinan terjadi sekitar 55 juta tahun lalu. Namun, kecepatannya 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan oksidasi laut masa kini. Saat itu, kata Schmidt, spesies merespons kenaikan suhu, oksidasi, perubahan asupan nutrisi dan kehilangan oksigen. Sebuah proses yang sama yang sekarang kita lihat terjadi di samudera kita.

Kecepatan oksidasi yang kita alami saat ini tidak pernah terjadi dalam sejarah planet Bumi. Mendorong sebagian besar ekosistem ke kondisi yang belum pernah diketahui. Dalam proses kimia, oksidasi merupakan perubahan kimia dengan suatu atom atau partikel sehingga kehilangan elektron atau bertambah oksidasinya. ■

Parkir, Ganti Sesuai Harga Mobil

Mahkamah Agung (MA) sudah beberapa kali menetapkan keputusan yang mengharuskan pengelola parkir bertanggung jawab dan mengganti kerugian apabila ada kendaraan yang hilang.

Setidaknya sudah lima kali MA memenangkan konsumen bersengketa tentang parkir. Antara lain kasus hilangnya mobil Kijang di pusat perbelanjaan Mangga Dua dan pusat perbelanjaan Lebak Bulus, juga kasus kehilangan motor Honda Tiger di kompleks Fatmawati Mas. Semua konsumen (korban) dimenangkan mengharuskan pengelola parkir membayar ganti rugi. Juru Bicara MA Djoko Sarwoko mengatakan putusan MA itu bisa jadi yurisprudensi kalau ada kasus sama.

Jadi, penyedia jasa layanan parkir tidak bisa lagi begitu saja lepas dari tanggung jawab saat ada kendaraan konsumen hilang. Mereka harus bertanggung jawab. Dalam amar beberapa keputusan MA tersebut ada setidaknya empat alasan mengapa pengelola parkir (penyedia jasa parkir) harus bertanggungjawab: Pertama, pengelola parkir melanggar UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999; Kedua, pengelola parkir dinilai melanggar pasal 1366 KUH Perdata yang menyebutkan seseorang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian/kekuranghati-hatiannya; Ketiga, hilangnya kendaraan akibat kelalaian pengelola parkir; Keempat, pengelola parkir dilakukan oleh perusahaan profesional sehingga harus bertanggungjawab secara hukum.

Keputusan MA tersebut disikapi pengelola parkir dengan bekerjasama dengan pihak asuransi. Pemprov DKI Jakarta juga menyikapinya dengan menerbitkan Pergub 120/2012, dengan menaikkan tarif parkir yang sudah meliputi jaminan asuransi, kerusakan dan kehilangan kendaraan. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dengan demikian, tidak ada lagi peluang bagi pengelola parkir mengelak dari tanggung jawab.

Koordinator Advokasi Perparkiran YLKI Karunia Asih Rahayu mengatakan, pengelola parkir diwajibkan mengganti setiap kehilangan ataupun kerusakan kendaraan sesuai nilai kerugian. Selama ini, katanya, sistem penggantian belum jelas dan nilai ganti rugi tidak sebanding sehingga merugikan konsumen. Akibat tidak jelasnya sistem yang diterapkan, masyarakat enggan mempersoalkan lebih lanjut setiap ada kehilangan ataupun kerusakan kendaraan di areal parkir. Apalagi upaya meminta pertanggungjawaban pengelola parkir terkesan dipersulit. Bahkan, tidak sedikit pengelola parkir mengelak dari tanggung jawab atas kerusakan ataupun kehilangan kendaraan di area parkir. Sehingga seringkali masyarakat merasa terlalu repot dan bosan berurusan panjang.

Karunia mengungkapkan, kasus yang sering terjadi di areal parkir adalah kerusakan kendaraan atau kehilangan aksesorinya, seperti kaca, tape mobil, dan kaca spion. Namun, hal ini sering kali tidak bisa diganti karena pengelola berdalih kesulitan menaksir nilai kerugian barang yang rusak.

Sementara itu, Direktur PT Pansakti Satria VIP Parking B Hartono mengatakan, pihaknya taat pada aturan pemerintah. "Bila akan mengganti kerusakan dan kehilangan, semua itu telah kami serahkan kepada pihak asuransi," katanya. Namun, konsekuensinya tarif parkir juga naik. Sesuai Pergub 120/2012, kenaikan tarif *off street* (dalam gedung) sekitar 100-200%. Tarif ini berlaku di pusat-pusat perbelanjaan dan hotel atau kegiatan parkir yang menyatu serta perkantoran dan apartemen. Besaran untuk kendaraan jenis sedan, jip, pikap, minibus,dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000-5.000 pada jam pertama. Satu jam berikutnya mengalami kenaikan sebesar Rp2.000–4.000.

Pada golongan kendaraan jenis bus, truk, dan sejenisnya, jam pertama dikenakan sebesar Rp.6.000–7.000. Jam berikutnya ditambah berikutnya Rp. 3.000 per jam. Khusus untuk sepeda motor, tarifnya Rp1.000–2.000 pada jam pertama dan jam berikutnya Rp. 1.000 per jam. Tarif baru ini tidak berlaku di pasar, tempat rekreasi, rumah sakit atau stadion. ■ **san**

Parkir Tercanggih di Dunia

Pengelola gedung pencakar langit terbaru di Birmingham, Inggris, The Cube, melengkapi gedungnya dengan tempat parkir yang paling canggih di dunia. Di tempat parkir canggih ini, para pemilik mobil tidak perlu lagi repot mencari tempat parkir. Tinggal meletakkan mobil di sebuah ruangan yang telah disediakan. Setelah itu, mobil tersebut akan diangkat ke tempat parkir khusus dengan sebuah alas yang digerakkan secara mekanis. Pemilik mobil pun dengan santai meninggalkan mobilnya tanpa perlu takut kehilangan sebab mobil tersebut diparkir di ruang khusus yang digerakkan secara robotik tanpa ada jalan masuk dan keluar konvensional. ■ **san**

Pantai Ancol Digugat Jadi Ruang Publik

Tiga warga DKI Jakarta menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol terkait tarif masuk Pantai Ancol. Ketiga warga tersebut yakni Ahmad Taufik, Abdul Malik Damrah dan Bina Bektiati. Mereka menggugat areal Pantai Ancol supaya menjadi ruang publik yang bisa diakses secara gratis. Pantai Ancol di mata para penggugat adalah kawasan publik.

Mereka menggugat Pemprov DKI Jakarta sebagai tergugat I, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai tergugat II dan PT Taman Impian Jaya Ancol sebagai tergugat III. Serta Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai para pihak yang turut tergugat. Kemudian atas gugatan itu, PT Pembangunan Jaya Ancol balik menggugat ketiga warga tersebut senilai Rp 1,5 miliar.

Gugatan perdata ketiga warga Jakarta itu telah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fahmi Syakir, kuasa hukum penggugat mengungkapkan, pengadilan telah menganjurkan lebih dulu dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat. Mediasi telah dilakukan (29/8), tetapi tidak ada kesepakatan. Menurut Fahmi, di hadapan mediator, pihak tergugat tetap bersikukuh menuntut akses publik terhadap Pantai Ancol.

Sementara itu, GM Legal Officer PT Pembangunan Jaya Ancol Sunutomo selaku pengelola menawarkan perdamaian kepada penggugat yakni bekerjasama dalam mengelola Pantai Muara Kamal yang bisa diakses secara gratis. Tetapi ketiga warga itu menolak dengan alasan bahwa sepanjang garis pantai adalah akses publik.

Para penggugat berpegang bahwa pengelolaan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Peraturan itu diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama, ruang terbuka publik, termasuk laut, pantai, dan ruang terbuka hijau.

Sementara kasus ini masih berlangsung, berbagai pihak memberi komentar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendro Subroto kepada wartawan (10/10) menilai pengelolaan Pantai Ancol saat ini sudah sangat tepat. Menurutnya, justru tidak elok jika Ancol dijadikan ruang publik. Selain akan menjadi kumuh, juga akan membuat tidak nyaman bagi pengujung baik itu dari domestik maupun mancanegara.

Pendapat senada dikemukakan ekonom Aviliani. Dia mengatakan gugatan terkait Pantai Ancol sebaiknya dijadikan ruang publik sangat tidak tepat. Menurutnya, apabila Pantai Ancol dipegang oleh pemerintah dan tidak berbayar, kondisinya langsung tidak terawat. Selain itu, katanya, tentu harus melihat perjanjian Pemprov Jakarta dengan perusahaan pengelola. "Namanya perjanjian harus dihormati, tidak bisa ketika orang sudah investasi banyak tiba-tiba muncul gugatan dan kemudian dikabulkan. Kondisi ini akan membuat para investor berpikir kembali untuk bekerjasama dengan pemerintah sebab tidak ada jaminan hukum," tegasnya. ■ **san**

Pilkada Kota Bekasi

Pilkada Kota Bekasi yang dijadwal berlangsung 16 Desember 2012 diikuti lima pasangan calon yakni satu pasang calon nonpartai (independen) dan empat calon yang didukung partai politik. Pengambilan nomor urut dilaksanakan di Hotel Horison, Mal Metropolitan, Kota Bekasi (11/10/2012).

Pasangan independen Shalih Mangara Sitompul-Anwar Anshori Mahdum (Salam) mendapat nomor urut 1. Shalih dikenal sebagai Ketua Peradi Kota Bekasi. Anwar adalah pemuka agama. Pasangan Sumiyati Mochtar Mohamad-Anim Imamudin yang didukung oleh PDIP, PBB, dan PDS mendapat nomor urut 2. Sumiyati adalah istri dari mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad yang harus lengser akibat kasus korupsi. Sedangkan Anim adalah anggota DPRD Kota Bekasi.

Pasangan Dadang Mulyadi-Lucky Hakim (Dalu) didukung oleh PAN, Partai Gerindra, dan PPP, nomor urut 3. Dadang adalah Sekretaris Kabupaten Bekasi yang nonaktif karena keikutsertaan dalam pilkada. Pasangannya Lucky, pemain sinetron. Pasangan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu (PAS) diusung Partai Golkar, PKS, Partai Hanura, dan PKB, nomor urut 4. Rahmat adalah petahana, Wali Kota Bekasi yang sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Bekasi di masa kepemimpinan Mochtar. Karena Mochtar lengser, Rahmat naik menjadi wali kota. Sedangkan Syaikhu adalah anggota DPRD Jawa Barat.

Pasangan Awing Asmawi-Andi Zabidi (Azib) diusung Partai Demokrat, nomor urut 5. Awing, Sekretaris Partai Demokrat Jawa Barat, dia pernah maju dalam pilkada sebelumnya. Sedangkan pasangannya Zabidi menjabat Ketua DPRD Kota Bekasi dan nonaktif karena keikutsertaan dalam pilkada. ■ **san**

Sinergi Selamatkan Danau Toba

Selain air Danau Toba semakin susut, kualitas kebeningannya juga makin tercemar.

Inilah danau terbesar dan terluas di Indonesia, bahkan danau vulkanik terbesar di dunia, serta terdalam kedua di Indonesia dan terdalam ke-15 di dunia. Danau Toba berada di elevansi (ketinggian) 905 m, titik terdalam mencapai 505 m, luas permukaan 1.130 km2, volume air mencapai 240 km3. Danau ini juga memiliki keunikan tersendiri dengan adanya pulau Samosir di tengahnya.

Diperkirakan Danau Toba terjadi akibat letusan supervolcano (gunung berapi super) Gunung Toba sekitar 73.000-75.000 tahun lalu. Letusannya terjadi selama 1 minggu dan lontaran debunya mencapai 10 km di atas permukaan laut. Bill Rose dan Craig Chesner dari Michigan Technological University memperkirakan bahan-bahan vulkanik yang dimuntahkan gunung itu mencapai 2.800 km^3, dengan 800 km^3 batuan ignimbrit dan 2.000 km^3 abu vulkanik yang tertiup angin ke barat selama 2 minggu dan menyebar ke separuh bumi, dari Cina sampai ke Afrika Selatan.

Letusan supervolcano Gunung Toba tersebut menyebabkan kematian massal, bahkan diikuti kepunahan beberapa spesies. Konon, letusan itu menyusutkan jumlah manusia hingga 60% dari populasi manusia saat itu (sekitar 60 juta jiwa). Letusan itu jugalah yang menyebabkan terjadinya zaman es, kendati hal ini masih diperdebatkan para ahli.

Setelah letusan, terbentuk kaldera yang kemudian terisi air dan menjadi Danau Toba. Selain itu, tekanan ke atas oleh magma yang belum keluar memunculkan Pulau Samosir. Kini, danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer itu tidak hanya sebagai andalan wisata Provinsi Sumatera Utara, melainkan juga amat penting menopang kehidupan masyarakat sekitar.

Selain Pulau Samosir (Kabupaten Samosir) yang memang berada di tengah danau, delapan kabupaten lainnya di Provinsi Sumut memiliki pantai Danau Toba, yakni: Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun dan Karo. Sehingga penanganan danau ini memerlukan koordinasi terpadu secara sinergis.

Pernah diusulkan pembentukan Otorita Danau Toba untuk melestarikan dan mengoptimalkan fungsi danau ini. Sebagai awal dari mimpi tersebut, mantan Gubernur EWP Tambunan memulainya dengan menggelar Pesta Danau Toba yang melibatkan semua kabupaten sekeliling danau. Pesta Danau Toba memang terus digelar sekali setahun hingga saat ini, tapi visi koordinasinya semakin terdegradasi, sehingga sampai kini badan otorita Danau Toba itu hanya sebuah mimpi. Bahkan sekadar koordinasi antarkabupaten sekeliling Danau Toba pun hingga kini belum dilakukan secara sistematis dan sinergis (terpadu).

SIPINSUR: Danau Toba dipandang dari Sipinsur, salah satu titik lokasi pandang yang indah di Paranginan Kabupaten Humbahas

Seperti pernah dikeluhkan Ombang Siboro, Asisten Pemerintahan Kabupaten Samosir, kabupaten yang paling berkepentingan menyelamatkan Danau Toba, bahwa selama ini pihaknya merasa berjalan sendiri dalam menghadapi perkembangan dan masalah di Danau Toba. Menurutnya, Kabupaten Samosir memiliki sikap yang jelas untuk menjaga kondisi Danau Toba, sebab masyarakat Samosir sangat bergantung dengan kondisi perairan Danau Toba.

Pemkab Samosir sudah pernah meminta Pemprov Sumut dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) supaya menyetop HPH PT TPL di Sitongging-tongging. Sebab jika hal itu terus berlanjut akan berpengaruh pada kualitas air Danau Toba. Namun permintaan itu belum ada tanggapan. Perihal pencemaran air, pihaknya telah membuat perda yang antara lain mengatur semua perizinan usaha yang memanfaatkan air Danau Toba harus bayar mahal dan menaati semua ketentuan. Namun, hal ini tampaknya tidak diikuti kabupaten lain. Pemkab Samosir tidak bertujuan menyulitkan investasi, tapi supaya semua orang yang ingin menggunakan Danau Toba itu tahu bahwa air danau itu harus dijaga.

Sesuai pengamatan BERINDO, air danau ini tampaknya sudah semakin susut sekitar 1,5 meter, terlihat dari beberapa dermaga yang harus digeser dan diturunkan ke permukaan danau. Kualitas kebeningan airnya juga sudah semakin tercemar. Dulu airnya amat bening, sehingga jika saat berenang airnya tertelan tidak menimbulkan kekuatiran akan adanya gangguan kesehatan. Bahkan dulu banyak orang yang sengaja meneguk air danau ini.

Tapi sekarang, hal itu jangan lagi dilakukan. Pengamatan BERINDO di Parapat dan Ajibata, beberapa hotel, rumah makan, rumah penduduk bahkan peternakan mengalirkan limbahnya ke danau ini. Dulu, IPAL pernah beroperasi di Ajibata untuk menangani limbah domestik. Tapi sekarang, tampaknya tidak berfungsi lagi.

Begitu pula hutan dan lingkungan di sekitar kawasan penyangga danau sudah semakin rusak. Berbagai jenis ikan yang hidup di danau tawar tersebut juga sudah semakin berkurang. Bahkan Ikan Batak yang dahulu berkembang biak di arus deras bawah danau itu sudah amat langka bahkan nyaris punah. Ikan Batak (Ihan) itu nyaman hidup menantang arus deras air di dasar sungai atau aliran deras danau. Selain rasanya enak, Ikan Batak tersebut juga amat bermakna dalam upacara adat Batak. ■ **etp**

Petani Kemenyan Tak Berdaya

KRISTAL: Getang kemenyan mengkristal, kualitas premium. Kemenyan tumbuh di tengah hutan belantara

Para petani kemenyan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Tapanuli Utara dan Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara semakin tak berdaya menghadapi para tengkulak yang mempermainkan harga dengan fluktuasi tinggi. Untuk menghadapi hal ini, mereka mengharapkan pemerintah memberi perhatian untuk mendorong terbentuknya suatu badan yang bisa menjamin kestabilan harga, atau induk koperasi yang menaungi sejumlah petani kemenyan.

Santun Simanullang, seorang petani kemenyan di Desa Huta Gurgur, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbahas mengatakan selama ini petani kemenyan seringkali tak berdaya atas permainan harga akibat tidak adanya patokan harga. "Harga kemenyan sepenuhnya ditentukan pedagang besar (toke) melalui para pedagang pengumpul. Petani mau tidak mau harus mengikuti harga tengkulak tersebut. Pembayaran pun terkadang dilakukan dengan memberikan kertas cek mundur," kata Santun.

Kendati getah kemenyan jika disimpan lama akan bertambah baik, tetapi seringkali petani harus menjualnya walau harga sangat rendah karena desakan kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga para petani sangat membutuhkan sebuah lembaga (koperasi) yang dapat menampung kemenyan langsung dari petani dengan harga yang stabil. Selain mengharapkan adanya kestabilan harga, petani juga membutuhkan kenaikan harga. Kendati harga kemenyan sudah berada di atas Rp100 ribu per kilogram, menurut Santun, harga itu belum sepadan dengan biaya produksi dan faktor kesulitan pengelolaan kemenyan. Kemenyan itu hanya tumbuh di tengah hutan. Tidak bisa dibudidayakan layaknya karet. Oleh karena itu, pengelolaannya amat sulit. Maka harga semestinya rata-rata di atas Rp150 ribu per kilogram.

Dulu, jika petani menjual satu kilogram kemenyan kualitas baik, sudah cukup untuk membeli beras, lauk dan berbagai keperluan selama sepekan untuk lima orang (suami-isteri dan tiga anak). Sekarang, dijual dua kilo pun masih jauh dari cukup. ■ **pm**

Provinsi Kaltara Terbentuk 2013

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dipastikan sudah resmi terbentuk tahun depan (2013). Kepastian itu dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek di Balikpapan, Kamis 12/10/2012. Provinsi pecahan Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut mempunyai lima kabupaten/kota yakni Tarakan, Bulungan, Tanah Tidung, Malinau, dan Nunukan. Awang Faroek menyebut untuk persiapan provinsi Kaltara itu, pihaknya akan menggelontorkan dana Rp300 miliar, terdiri dari Rp250 miliar untuk operasional dan Rp50 miliar untuk biaya Pilkada.

Awang menjelaskan, setelah Kaltara terbentuk akan ditunjuk pelaksana tugas gubernur sementara, termasuk anggota DPRD provinsinya. Dia mengatakan saat ini sedang dipersiapkan segala kebutuhan provinsi baru tersebut termasuk pembangunan infrastruktur dan pemilihan gubernur Kaltara 2014. Awang berkeyakinan dengan berdirinya Kaltara akan semakin membuat wilayah paling utara di Kalimantan Timur itu khususnya di wilayah perbatasan akan semakin maju.

Pembentukan provinsi Kaltara ini, menurut Awang adalah merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia memprediksi APBD Provinsi Kaltara masih hanya Rp2 triliun. Hal ini diukur dari APBD lima daerah yang bergabung. ■ **ls**

Hindari Calo Anggaran di DPR

Kuatir akibat banyaknya calo anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Wali Kota Palu Rusdi Mastura memilih meminjam dana ke pusat investasi pemerintah atau PT Sara Multi Infrastruktur. Dia mengaku kesulitan mendapatkan dana pembangunan infrastruktur daerah karena keberadaan para calo tersebut. Rusdi Mastura mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara Kawasan Timur Indonesia Summit di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 2 Oktober 2012.

Kalau harus lewat DPR, keluhnya, terlalu banyak potongan. Maka memilih lebih baik membayar bunga ketimbang dana untuk pembangunan dipotong. "Saya sebagai wali kota, satu kaki saya ada di penjara," ujar Rusdi tertawa. Dia menghindari terlibat pemotongan anggaran di DPR. Menurut Rusdi, kepala daerah yang ingin memajukan daerahnya harus berani bertindak untuk membuat terobosan besar.

Dia berharap untuk pembangunan kawasan timur Indonesia, pemerintah pusat seharusnya tidak mengandalkan Jakarta sebagai gerbang utama. Tapi, juga harus membuka gerbang baru di utara Indonesia yang dia sebut sebagai Northern Gate Indonesia. Dia yakin dengan gerbang baru di utara itu, daerah di kawasan timur Indonesia bisa leluasa berhubungan dengan negara lain seperti Cina. ■ **ts**

Kukar, Perencanaan Propublik

Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) semakin memantapkan rencana pembangunannya yang propublik.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengajak segenap perangkat desa untuk bersama-sama dan penuh semangat dalam melaksanakan seluruh kebijakan program dan kegiatan RPJMD 2010-2015. Dia mengatakan, kebersamaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah ini lima tahun mendatang. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagai proses meningkatkan kesejahteraan menuju "Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan."

Bupati Kukar Rita Widyasari

Bupati Rita Widyasari mengemukakan hal itu saat membuka sosialisasi RPJMD Kutai Kartanegara 2011-2015 bagi seluruh kepala desa (Kades) di Ruang Serbaguna Kantor Bappeda Tenggarong, Rabu (10/10/2012). Dia mengatakan seluruh desa di Kukar memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. "Karena itu pembangunan desa sangat membutuhkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015," jelasnya.

Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

Rita menjelaskan, dokumen RPJMD tidak sekadar dokumen teknokratis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang baku. Hal itu dikemukakannya, sebab selama ini sering dipandang masyarakat secara umum sebagai rutinitas birokrasi lima tahunan yang kurang sensitif dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Dia menegaskan, sudah saatnya kita menunjukkan sebuah konstruksi perencanaan propublik yang memberikan jaminan untuk menempatkan rencana aksi yang lebih konkret atas sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah.

RPJM-Des, jelas Rita, disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dalam mengelola potensi maupun persoalan di desa. Jadi, RPJM-Des merupakan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten. Dalam RPJM-Des juga dirumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh serta program dan kegiatan yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini, menurut Rita, merupakan bagian dari kebijakan pemkab untuk mengupayakan adanya keterkaitan, keterpaduan dan kesinambungan proses perencanaan pembangunan. Hal mana, Pemkab Kukar telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbub) No. 21/2012 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Perbub ini pada prinsipnya untuk memberikan acuan kepada pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan yang komprehensif, sebagaimana yang diamanatkan UU No. 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan PP No. 8/2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah seluas 27.263,10 km2 yang dibagi dengan luas daratan 23.166,10 km2 dan luas perairan 4097 km2. Ibu kotanya Tenggarong berjarak 25 km dari Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur serta 145 km dari kota Balikpapan. Jumlah penduduk Kukar saat ini 828.303 jiwa dengan kepadatan sekitar 35 jiwa/km2, yang terdiri dari suku asli Melayu Kutai, Dayak Benuaq, Bahau, Modang, Kenyah, Punan, Kayan, Bentian dan Basap serta beberapa suku pendatang lainnya. Mata Pencaharian penduduk beragam yakni pertanian, jasa, perdagangan, industri dan pertambangan serta beberapa sektor swasta lainnya.

Kabupaten ini memiliki fasilitas pendidikan: 172 Play Group, 288 TK, 483 Sekolah Dasar, 162 SMP, 64 SMA, 28 SMK dan 1 unit Universitas serta 2 Sekolah Tinggi. Sedangkan bidang kesehatan, memiliki fasilitas 2 Rumah Sakit, 30 Puskesmas, 197 Puskesmas Pembantu, 89 orang dokter umum dan 27 dokter spesialis serta 37 dokter gigi. ■ **ls**

Rumah untuk Warga Miskin

Pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan terus dilanjutkan hingga tahun depan. Sedangkan pemerintah Provinsi Sumsel akan melanjutkan kembali pembangunan rumah tipe 21 bagi masyarakat kurang mampu yang sempat terhenti.

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berupaya menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2 tahun terakhir. Pada tahun 2011, Kemenpera telah membangun sebanyak 12.100 unit rumah layak huni di enam kabupaten di Provinsi NTT antara lain Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Kabupaten Alor. Dengan rincian, rumah khusus sebanyak 2.000 unit, rumah swadaya 5.050 unit, pembangunan rumah baru sebanyak 4.050 dan 1.000 unit peningkatan kualitas.

Sedangkan di tahun 2012, program tersebut dilaksanakan di sembilan kabupaten, ditambah tiga kabupaten yaitu Ngada, Flores Timur, dan Sumba Tengah. Target pembangunan rumah di tahun 2012 adalah sebagai berikut: pembangunan rumah khusus sebanyak 7.762 unit, rumah swadaya 15.255 unit, terdiri dari 2.020 unit pembangunan rumah baru dan 13.235 unit peningkatan kualitas.

Kemenpera juga diserahi tugas memperbaiki rumah di lokasi transmigrasi lokal Papua di Kota Waingapu, Sumba Timur sebanyak 75 unit. Dengan demikian, selama dua tahun terakhir, Kemenpera telah berhasil membangun dan merenovasi sebanyak 35.117 unit rumah.

Tahun depan, pemerintah pusat masih akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk pemberdayaan masyarakat di NTT, sekaligus menyelesaikan masalah warga eks Timtim di daerah ini. Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan oleh 14 kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah daerah juga diberi kesempatan untuk mengusulkan pembangunan rumah khusus warga pendatang yang akan direalisasikan pada tahun 2013 mendatang.

Sementara itu, puluhan ribu warga di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) antre rumah tipe 21 yang sempat terhenti pembangunannya. Pemerintah Provinsi Sumsel melanjutkan kembali pembangunan rumah tipe 21 bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini terkait dengan adanya putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur batas rumah minimal 36 m2.

Dengan adanya putuan MK tersebut, maka program rumah murah dan sehat bagi masyarakat tidak mampu yang dicanangkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dengan membangun rumah tipe 21, bisa dilanjutkan. Sebelumnya, program pembangunan rumah tipe 21 di kawasan Keramasan yang sudah sempat dilaksanakan itu harus dihentikan karena adanya UU No.1 tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur batas rumah yang bisa dibangun minimal tipe 36.

Sampai kini sudah 21.000 warga mengajukan permohonan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan rumah murah tersebut. Pemerintah provinsi akan melakukan seleksi terhadap warga yang mengajukan permohonan. Hal tersebut mengingat rumah yang dibangun hanya sebanyak 1.000 unit. ■ **pan**

Pelajar Kebumen yang Membanggakan

Empat pelajar Kebumen Jawa Tengah akan mewakili Indonesia dalam ajang Olimpiade Sains Internasional. Sebelumnya mereka berhasil meraih prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2012. Keempat pelajar berprestasi yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Kebumen itu adalah, Hawari Achmadi yang meraih medali emas untuk bidang studi astronomi ; Ferias Dwi Sembodo dengan medali perak untuk bidang studi biologi ; Fikri Wahyudi dan Isna Puji Astuti yang meraih medali perunggu untuk bidang studi kebumian. ■ **pan**

Pernikahan Dini Marak di Madiun

Pemerintah kabupaten Madiun mengaku merasa prihatin dengan pernikahan muda atau usia mempelai wanita di bawah 20 tahun yang mengalami kenaikan dari tahun 2010 dan 2011. Menurut data Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Madiun, pada tahun 2010, tercatat 711 pernikahan muda dari total 6.029 pernikahan atau 11,79%. Sedangkan pada tahun 2011, tercatat 859 pernikahan muda dari total 6.548 pernikahan atau 12,98%. Data ini menunjukkan ada kenaikan sebanyak 148 pernikahan muda. ■ **pan**

Mempertanyakan Komputasi Awan

Walaupun menawarkan banyak manfaat, komputasi awan masih menyisakan sejumlah pertanyaan terutama soal ketergantungan dan keamanan data yang kurang terjamin.

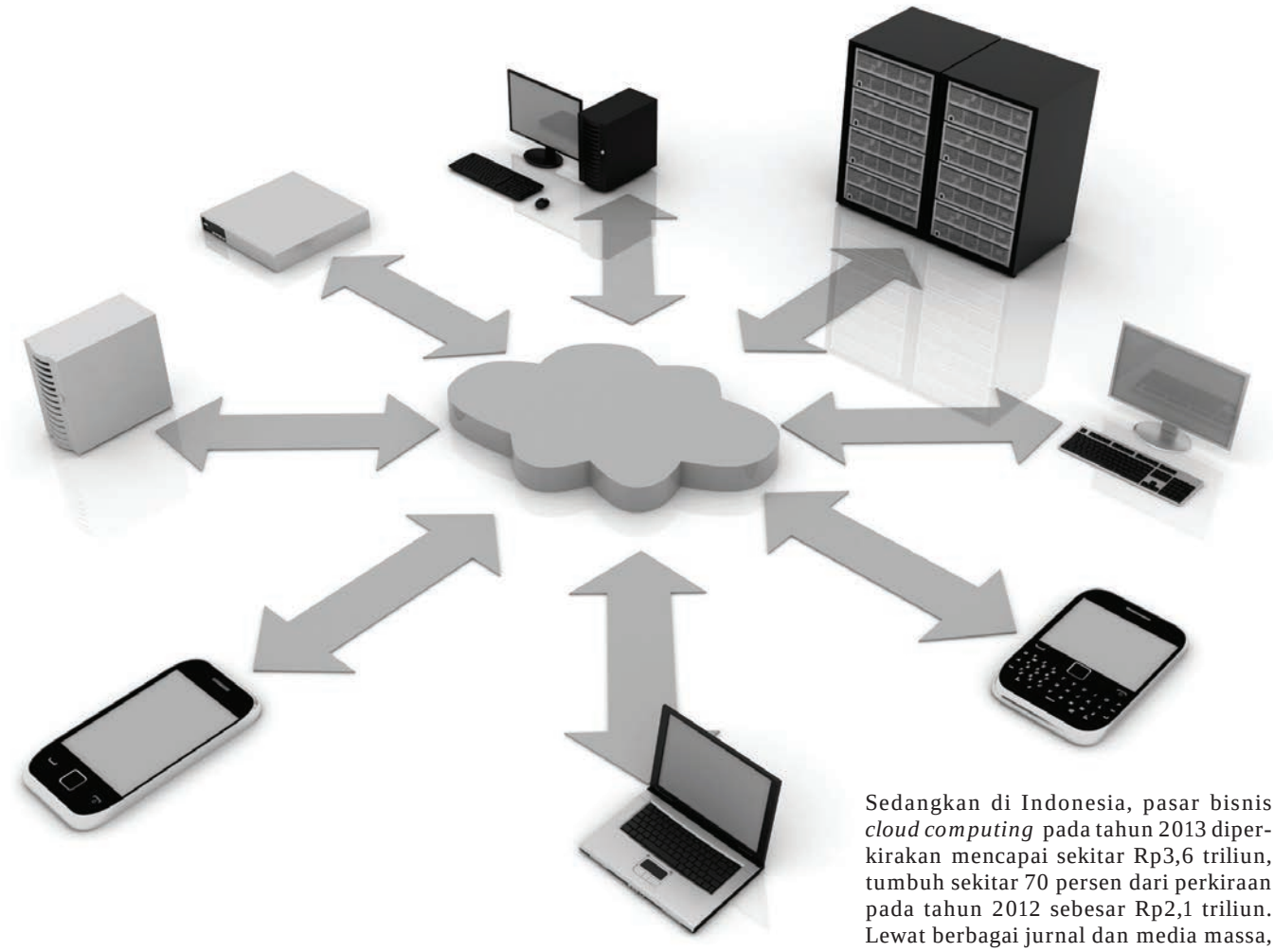

Dunia teknologi sedang memasuki era *cloud computing* atau komputasi awan. Pengertian awan di sini adalah internet yang secara metafora dilihat sebagai awan. Layanan *cloud computing* boleh dibilang menyerupai layanan listrik dan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Dimana untuk mendapatkan layanan listrik, kita tidak perlu membeli genset, membangun instalasi di rumah, dan membeli peralatan lain. Analogi tersebut dipakai karena untuk mengadopsi layanan komputasi awan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat ini sudah disediakan oleh provider sesuai kebutuhan pelanggan.

Popularitas *cloud computing* menguat saat Salesforce.com meluncurkan layanan aplikasi CRM dalam bentuk *Software as a Service* di awal 2000-an. Selanjutnya *cloud computing* mulai diadopsi berbagai pelaku dunia TI. Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), Google dengan Google App Engine-nya, tak ketinggalan raksasa biru IBM meluncurkan Blue Cloud Initiative. Sedangkan di Indonesia, pasar bisnis *cloud computing* pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sekitar Rp3,6 triliun, tumbuh sekitar 70 persen dari perkiraan pada tahun 2012 sebesar Rp2,1 triliun. Lewat berbagai jurnal dan media massa, *cloud computing* memperkenalkan dirinya sebagai teknologi masa depan.

Meski teknologi komputasi awan semakin gencar dikembangkan ternyata tidak serta merta mendapat dukungan penuh. Banyak pihak yang meragukan penggunaan komputasi awan, bahkan ada juga yang tidak tertarik sama sekali.

Mereka memandang, komputasi awan sangat membutuhkan koneksi internet. Tanpa internet, pengguna tidak bisa berbuat apa-apa alias tidak bisa bekerja. Kedua, aplikasi dan penyimpanan data *online* sangat tergantung pada pihak ketiga yang berarti bila server mereka

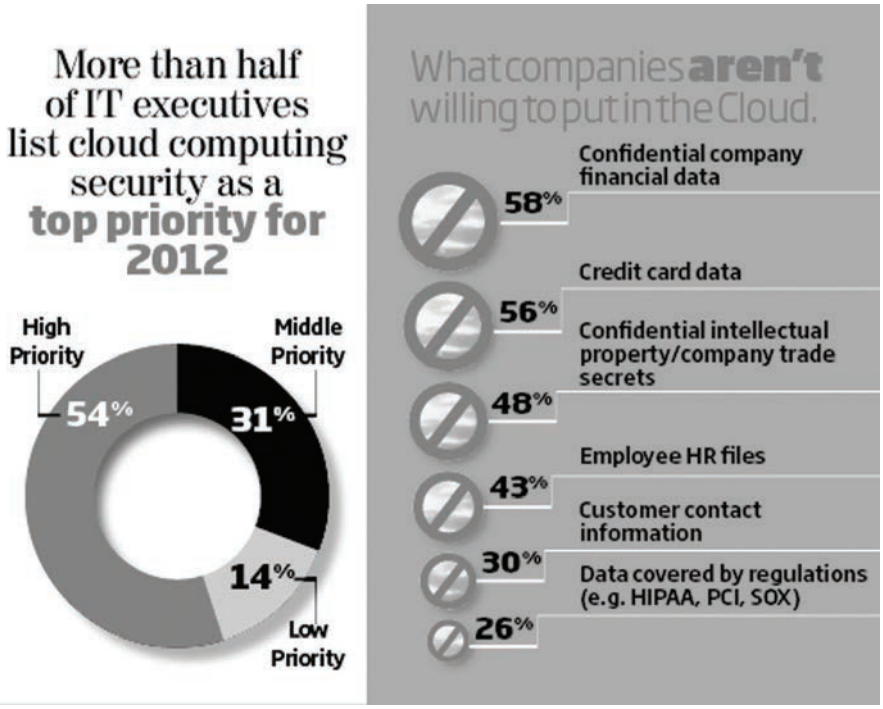

Komputasi awan sangat membutuhkan koneksi internet. Tanpa internet, pengguna tidak bisa berbuat apa-apa alias tidak bisa bekerja.

sedang "down" berarti kita tidak bisa bekerja/mengakses situs mereka. Ketiga, masalah kepercayaan. Apakah kita sudah siap mempercayakan data penting perusahaan kepada pihak ketiga?

Faktor lain yang menghambat penerapan komputasi awan di antaranya penetrasi infrastruktur internet yang masih terbatas ; tingkat kematangan pengguna internet, yang masih menjadikan media internet utamanya sebagai media hiburan atau sosialisasi ; dan tingginya investasi yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan *cloud* ini, karena harus merupakan kombinasi antara infrastruktur jaringan, *hardware* dan *software* sekaligus.

Salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak, misalnya, memprediksi bahwa komputasi awan justru akan mendatangkan masalah besar di masa depan. "Dengan *cloud*, Anda tidak lagi memiliki apa-apa," kata lelaki bertubuh besar itu. Sebab, *user* harus setuju dengan penyedia layanan *cloud* tentang perlakuan terhadap data-data yang disimpannya. "Semakin kita mentransfer semua hal ke web, ke *cloud*, semakin sedikit kita mempunyai kontrol terhadapnya," tambah Wozniak.

Sementara menurut Richard Stallman, pendiri Free Software Foundation dan pencipta sistem operasi GNU, komputasi awan hanyalah sebuah kampanye *marketing* yang bertujuan untuk menjaring semakin banyak pengguna ke dalam sistem tertutup. Komputasi awan merupakan paradigma komputasi yang dipromosikan berbagai perusahaan teknologi besar termasuk Google, Microsoft dan Amazon. Stallman mengatakan bahwa pengguna komputer seharusnya menyimpan informasi mereka sendiri dan tidak mempercayakannya pada pihak ketiga. Bahkan Larry Ellison, pendiri Oracle mengkritik keras bahwa komputasi awan hanyalah sebuah "mode" dan "bualan."

Kekhawatiran tokoh-tokoh di dunia teknologi itu memang beralasan. Saat ini jutaan pengguna mengunggah data pribadi seperti e-mail, foto dan bahkan data pekerjaan ke situs-situs yang dimiliki perusahaan-perusahaan seperti Google atau Yahoo.

Muncul pandangan bahwa adopsi komputasi awan oleh massal dapat melahirkan kekhawatiran privasi dan kepemilikan di mana pengguna berpotensi tidak diperbolehkan mengakses datanya sendiri. Untuk menyiasatinya, Stallman yang juga seorang aktivis privasi di internet menyarankan pada pengguna untuk tetap menyimpan data di komputer mereka sendiri. Kalaupun Anda belum siap untuk meninggalkan aplikasi-aplikasi web 2.0 sama sekali, setidaknya pilihlah aplikasi yang mendukung standar terbuka. Google contohnya sudah berkomitmen untuk tidak mencegah pengguna menyalin data miliknya sendiri dengan menyediakan fitur untuk menyalin data di sebagian besar layanannya. ■ **cid**

HIGHLIGHT

Google Street View Indonesia diluncurkan

Perusahaan penyedia jasa layanan mesin pencari terbesar di dunia, Google Inc., meluncurkan layanan Google Street View Indonesia, fitur Google Maps yang akan menyediakan peta berisi rincian jalan dan panorama kota. Indonesia menjadi negara ke-45 yang memiliki Google Street View, produk yang diluncurkan ke publik sejak tahun 2007 tersebut.

Penyedia layanan mesin pencari itu menyiapkan tim untuk memotret jalanan Indonesia menggunakan mobil yang dilengkapi dengan 15 kamera dan bisa memotret panorama 360 derajat. Google menyediakan lusinan mobil untuk mengambil suasana jalanan Jakarta, sebagai kota pertama di Indonesia yang akan diambil gambarnya.

Setelah pengambilan gambar panorama Jakarta selesai, Google berencana melanjutkan pengambilan gambar panorama ke berbagai daerah dan kota wisata yang lain. Rencananya, hasilnya baru bisa dilihat pada tahun 2013. Gambar untuk layanan jasa itu selanjutnya akan diperbarui setiap satu sampai dua tahun sekali. ■

Apple Kalahkan Semuanya

Setelah tercatat sebagai perusahaan dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah, Apple mencetak rekor dengan bernilai lebih tinggi dibanding gabungan empat raksasa teknologi, Microsoft, Google, Amazon sertaFacebook.

Nilai total dari kapitalisasi pasar Apple di bursa Nasdaq pada akhir Agustus 2012 mencapai nilai $632,56 miliar. Angka itu tercapai tak lepas berkat kesuksesan iPhone, iPad dan aneka gadget yang dijual perusahaan yang didirikan Steve Jobs itu.

Sementara nilai kapitalisasi pasar Microsoft ($256,78 miliar), Google ($221,48 miliar), Amazon ($111,26 miliar) dan Facebook ($41,43 miliar). Jika ditotal maka keempat raksasa teknologi itu akan memiliki nilai kapitalisasi pasar $630,95 miliar, masih lebih kecil dibandingkan Apple. ■

Demi Kebaikan Guru

Ujian Kompetensi Guru (UKG) online menuai segudang protes. Meski demikian, guru menjadi terpacu untuk terus belajar mengasah kompetensinya termasuk dalam penguasaan komputer dan internet.

Pada 30 Juli-12 Agustus 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengadakan Uji Kompetensi Guru tahap pertama yang disambung dengan tahap kedua pada 1-6 Oktober 2012. UKG dilakukan secara online di seluruh Indonesia dengan sasaran para guru yang telah lulus sertifikasi. Pemerintah menguji kompetensi wawasan dan pedagogik 1.020.000 guru SMP, SMA dan SD. Tujuan dari UKG untuk memetakan kompetensi guru yang hasilnya akan digunakan dalam proses pengembangan sumber daya guru bersangkutan.

Menjelang pelaksanaan UKG, sejumlah kalangan melontarkan protes. Bagi kalangan yang kontra seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Koalisi Tolak UKG, ketidaksetujuan itu diekspresikan dalam berbagai bentuk. Pada UKG tahap pertama misalnya, FSGI menolak dan akan menggugat Kemdikbud terkait dengan kebijakan uji kompetensi guru (UKG), dengan alasan lemah hukum, cenderung memaksakan dan menjadikan guru sebagai kelinci percobaan, juga dianggap tidak menguji seluruh kompetensi guru, di antaranya wawasan, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Bahkan menjelang pelaksanaan UKG, muncul SMS berantai yang memprovokasi para guru untuk menolak UKG dan himbauan agar para guru tidak mengikuti UKG bahkan mengarah pada usaha untuk memboikot pelaksanaan UKG.

Mereka yang kontra juga menuding bahwa UKG online hanyalah 'proyek' Balitbang Kemdikbud untuk mengisi pundi-pundi mereka. Pasalnya, sistem rekrutmen untuk para calon pendidik itu sendiri, baik calon guru maupun kepala sekolah, masih sarat KKN. UKG online tidak akan ada gunanya selama masih banyak guru-guru berprestasi yang seharusnya sudah layak menjadi kepala sekolah, tapi tidak bisa jadi kepala sekolah karena tidak punya uang dan koneksi.

UKG hanya alat pengukur seberapa tinggi kemampuan seorang guru dalam menguasai materi

Protes terhadap kebijakan Kemdikbud ini makin menjadi-jadi tatkala di hari pertama pelaksanaan UKG (30 Juli 2012), server ujian sempat ngadat sehingga jaringan komputer daerah tidak bisa terhubung dengan pusat. Hal ini membuat beberapa kalangan semakin serius meminta kepada Kemdikbud agar menghentikan pelaksanaan UKG. Selain masalah macetnya koneksi internet, ada banyak lagi alasan yang disampaikan termasuk dari segi soal yaitu bobot/kualitas soal, teknis penulisan, soal cacat, dan salah sasaran. Belum lagi banyak guru yang gagap internet dan tidak bisa mengoperasikan komputer.

Ironisnya lagi, berdasarkan hasil ujian di beberapa daerah di Indonesia, masih banyak guru yang tidak lulus dalam ujian kompetensi ini. Padahal sebagian besar mereka adalah guru senior yang telah mengabdi puluhan tahun. Mereka merasa sangat kecewa karena pengabdiannya terasa sia-sia lantaran hasil ujian menyatakan bahwa mereka tidak lulus dan belum diakui sebagai guru profesional. Dalam hal ini para guru diharapkan berjiwa besar dan positif menanggapi hasil tersebut sebab UKG bukanlah bukti ketidakprofesionalan guru namun hanya sebagai alat pengukur seberapa tinggi kemampuan seorang guru dalam menguasai materi. Harus diakui pula bahwa banyak guru yang memang malas mengasah kompetensinya karena sudah puas dengan kemampuan yang dimiliki.

Bagi mereka yang mendukung, UKG online bisa menjadi terobosan di dunia pendidikan. Dengan adanya ujian nasional *online*, pihak pelaksana ujian bisa mengacak soal menjadi puluhan bahkan ratusan 'paket soal', sehingga kemungkinan terjadi kecurangan dalam ujian nasional bisa diminimalisasi.

Melalui ujian nasional secara online akan banyak biaya yang bisa dipangkas dan ditekan. Misalnya biaya transportasi dan akomodasi soal ujian dari pusat ke daerah, biaya kertas, biaya percetakan, biaya fotokopi, biaya koreksi, biaya keamanan, dan lain-lain. Hasil pengurangan biaya operasional ujian nasional bisa dialihkan ke pembiayaan-pembiayaan lain yang lebih berguna. ■ **roy**

Ketika Pelajar Menghunus Pisau

Tawuran atau perkelahian antarpelajar terus terjadi setiap tahun. Penyebabnya kini semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman.

Era modern nampaknya tidak menjadi jaminan bahwa manusia pun akan berpikir modern. Dulu, pelajar/mahasiswa membawa buku dan alat tulis ke sekolah. Namun di era modern ini, sebagian dari mereka malah membawa pisau, clurit, golok bahkan samurai. Niatnya cuma satu, tawuran dengan sekolah atau siswa lain.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tawuran sering terjadi. Data di Jakarta misalnya (Bimmas Polri Metro Jaya), tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus.

KOMPLEKS: Penyebab perkelahian pelajar masa kini semakin kompleks meliputi faktor keluarga, lingkungan, budaya, psikologis, juga kebijakan pendidikan dalam arti luas (kurikulum yang padat)

Padahal kalau ditilik lebih dalam, tawuran bukanlah budaya Indonesia asli. Banyak cerita rakyat yang mengajarkan sikap ksatria dalam menyelesaikan masalah. Misalkan cerita "si Pitung", "Aji saka", "Arya Penangsang", dan lain-lain. Dalam kisah pewayangan pun sebagian besar cerita yang berkaitan dengan peperangan ditampilkan perang satu lawan satu. Sedangkan tawuran sama sekali jauh dari sikap kepahlawanan seperti dalam cerita-cerita rakyat tersebut.

Pasca tawuran antara pelajar SMA 6 Jakarta dan SMA 70 Jakarta yang menewaskan satu siswa tak berdosa akhir September 2012 lalu, publik dan pemangku kepentingan kembali ribut bahkan saling menyalahkan. Sering dituduhkan, pelajar yang berkelahi berasal dari sekolah kejuruan, berasal dari keluarga dengan ekonomi yang lemah. Data di Jakarta tidak mendukung hal ini sebab dari 275 sekolah yang sering terlibat perkelahian, 77 di antaranya adalah sekolah menengah umum. Begitu juga dari tingkat ekonomi para pelajar dimana sebagian pelajar yang sering berkelahi berasal dari keluarga mampu secara ekonomi. Tuduhan lain juga sering dialamatkan ke sekolah yang dirasa kurang memberikan pendidikan agama dan moral yang baik. Begitu juga pada keluarga yang dikatakan kurang harmonis dan sering tidak berada di rumah.

Padahal penyebab perkelahian pelajar masa kini tidaklah sesederhana itu lagi. Terutama di kota-kota besar, masalahnya sedemikian kompleks, meliputi faktor keluarga, lingkungan, budaya, psikologis, juga kebijakan pendidikan dalam arti luas (kurikulum yang padat misalnya), serta kebijakan publik lainnya seperti angkutan umum dan tata kota.

Belakangan muncul sejumlah alternatif pemecahan. Misalnya, sekolah mengeluarkan siswa yang ikut tawuran, atau dibuat kerja sama lintas sekolah untuk tidak menerima siswa yang melakukan tawuran. Namun solusi ini dianggap bisa menimbulkan masalah baru. Siswa yang tidak diterima sekolah di-mana-mana itu bisa stres dan makin berandalan.

Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh dan Menteri Agama, Suryadharma Ali bahkan mengusulkan penambahan mata pelajaran agama di sekolah. Cara pemecahan masalah ini sama dengan yang dilakukan SMAN 70 Jakarta: siswa diberi pelatihan *spiritual quotient* (SQ) sebagai upaya memperkuat dimensi spiritual yang dapat mengontrol perilaku yang liar dan agresif.

Namun bagi sejumlah pengamat, cara pemecahan masalah ini juga mengundang tanya. Sebab pendidikan agama, spiritualitas, atau pendidikan karakter dipersepsikan memiliki daya magis untuk mengubah perilaku. Padahal tidak ada jaminan bahwa 'mengetahui' yang baik pasti 'melakukan' yang baik pula. Antara 'tahu' dan 'melakukan', bisa menjadi dua hal yang berbeda.

Begitu pula dengan solusi-solusi yang ditawarkan lebih bersifat reaktif dan tidak komprehensif. Ada banyak faktor pemicu kekerasan seperti pewarisan kekerasan internal (dari senior ke yunior), ketidaktegasan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan, terbatasnya sarana publik yang dapat menampung dan menyalurkan energi berlebih para siswa, dan sebagainya. Banyak kalangan sependapat bahwa penyelesaian masalah harus menyeluruh, dan bukan menumpukkan beban hanya kepada pendidikan karakter atau agama. Penyelesaian pun harus fleksibel mengingat perkembangan jaman yang semakin kompleks. ■ **roy**

ICW: DPR Lumpuhkan KPK

Menurut pengamatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu aktor 'pelumpuh' terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pelemahan itu, menurut siaran pers ICW, begitu nyata terlihat dalam dua hal, yaitu upaya politisasi anggaran untuk menghambat pembangunan gedung KPK dan penggunaan fungsi legislasi untuk merevisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengarah pada pelumpuhan KPK.

ICW mensinyalir upaya pelumpuhan tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa saat ini KPK sangat gencar menangani kasus korupsi politik di DPR. ICW mencatat adanya beberapa politisi dari berbagai partai politik dicokok oleh KPK. Badan Anggaran (Banggar) yang juga disinyalir ICW sebagai episentrum korupsi di DPR pun tidak luput dari pengawasan dan aksi KPK. "Sehingga politisi korup di DPR merasa terganggu dan melakukan upaya serangan balik menggunakan dua fungsinya yaitu penganggaran dan legislasi," rilis ICW dalam situsnya antikorupsi.org.

ICW menguraikan anggaran pembangunan gedung KPK sebetulnya telah disetujui oleh DPR dan pemerintah melalui APBN 2012 dengan nilai Rp 72,8 milyar atau sekitar 4,7% dari seluruh usulan gedung baru untuk lembaga yudikatif yang ada. Namun dalam prakteknya, DPR justru berupaya menghalang-halangi pencairan anggaran untuk membangun gedung tersebut. DPR menyatakan bahwa anggaran KPK diberi tanda "bintang" sehingga tidak bisa digunakan.

Menurut ICW, alasan yang digunakan juga cenderung dipaksakan. Awalnya DPR menyarankan agar KPK menggunakan gedung milik pemerintah yang tidak terpakai. Namun, alasan ini dimentahkan oleh pernyataan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa tidak ada gedung yang bisa digunakan sesuai kebutuhan KPK. Perlu diingat bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum seperti halnya kepolisian dan kejaksaan.

ICW membandingkan dengan lembaga sektor penegakan hukum, yang anggaran pembangunan gedungnya juga disetujui oleh DPR: Mahkamah Agung Rp663, 216,819,000 (43.15%); Kepolisian Rp556, 742,039,000 (36.22%);Kejaksaan Rp244, 233,569,000 (15.89%); dan KPK* Rp72, 834,918,000 (hanya 4.74%) dari total Rp1,537,027,345,000 (100%) (Sumber RAPBN TA. 2013, diolah IBC).

Namun, jelas ICW, ada perlakuan berbeda yang dilakukan oleh DPR. "Ini mengisyaratkan bahwa fungsi anggaran DPR telah disalahgunakan untuk melemahkan lembaga antikorupsi," rilis ICW.

Namun kemudian, DPR beralih argumentasi dan malah mempertanyakan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Padahal, menurut ICW, KPK selalu menyampaikan laporan periodik (tahunan) kepada DPR, Presiden, dan BPK. "Maka menjadi sangat aneh ketika DPR kembali mempertanyakan hal yang sama. Jika ingin lebih fair, kinerja DPR selama ini sebetulnya sangat buruk baik pada fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran. Di lain pihak, ada begitu banyak anggota DPR yang malah menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana korupsi. Ada peningkatan jumlah anggota DPR yang menjadi 'pesakitan' karena melakukan kejahatan korupsi," jelas ICW.

Pelemahan kedua, menurut ICW, adalah dengan mempreteli instrumen kewenangan KPK terutama yang terkait penindakan hukum (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Upaya ini dilakukan melalui revisi terhadap UU No. 30 Tahun 2002. Bentuk upaya pelemahan di antaranya: (i) kewenangan penuntutan KPK yang akan dipangkas oleh DPR; (ii) DPR juga akan mempersoalkan masa jabatan pimpinan pengganti KPK dan soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); (iii) rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dibentuk DPR justru membuka potensi intervensi politik ke KPK sekaligus memperbesar kewenangan DPR; dan (iv) penyadapan KPK harus sesuai ijin pengadilan, padahal korupsi adalah *extra-ordinary crime*.

Berdasarkan atas fakta di atas, Koalisi Penegak Citra Parlemen yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), ICW, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan Fatayat NU, pada 30 September 2012 menyatakan sikap: 1) Cabut tanda "bintang" pada alokasi anggaran gedung KPK; 2) Penggunaan fungsi anggaran DPR secara rasional dan tanpa subjektivitas politis; 3) Membatalkan revisi terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengeluarkannya dari daftar Prolegnas 2010-2014; 4) Meminta Presiden secara tegas untuk menolak revisi UU KPK dalam pembahasan dengan DPR; dan 5) Menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap semua upaya 'pelemahan' dalam pemberantasan korupsi, khususnya pelumpuhan terhadap KPK secara sistematik yang dilakukan oleh DPR. ■ **bh**

Tentang ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) saat ini menjadi salah satu lembaga independen paling lantang bersuara dalam gerakan antikorupsi. Eksistensi ICW dalam pemberantasan korupsi sejak tahun 1998 telah diakui publik. Secara berturut-turut, tahun ini ICW mendapat penghargaan UII Award dari Universitas Islam Indonesia, Soegeng Sarjadi Syndicate Award, dan penghargaan dari Dewan Pers.

Selain award dari sejumlah institusi, ICW juga mendapat penghargaan yang jauh lebih bernilai, yakni dukungan dari masyarakat luas. Sejak membuka Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana pada 2010 lalu, ICW telah berhasil mengumpulkan dukungan nyata berupa barisan suporter ICW yang kini berjumlah 560 orang. Para suporter ini secara rutin memberikan donasi untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Korupsi yang sudah sedemikian menggurita di Indonesia memang harus dilawan secara bersama-sama. Bersama masyarakat, ICW berupaya meningkatkan kapasitas publik untuk menuntut haknya mendapatkan fasilitas dasar yang dijamin oleh negara tanpa dikorupsi. Kontrol masyarakat yang kuat sangat diperlukan untuk membuat perubahan. ICW juga berupaya mendobrak kebuntuan hukum untuk lebih dapat diandalkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kini, Kordinator ICW adalah J. Danang Widoyoko.Sekretariat: Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, Indonesia Phone: +62-21-7901 885, 7994015, Fax: +62-21-7994005, Email: icw@antikorupsi.org.

Kajian Pengadaan Simulator SIM

Siapa yang Bertanggungjawab?

Kasus pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi sangat menarik untuk dicermati karena melibatkan aktor dari kepolisian yang notabene adalah penegak hukum.

Artinya kasus ini harusnya menjadi momentum bagi kepolisian untuk melakukan pembersihan terhadap institusinya dari praktek korupsi. Namun sebaliknya, penegak hukum berpotensi menjadi episentrum korupsi jika pengungkapan kasus ini tidak menyentuh aktor kunci.

Simulator SIM di Surabaya (Demotix)

Koalisi Masyarakat Pemantau Pengadaan yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), YAPPIKA, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesia Legal Rountable (ILR), dan Kemitraan mengemukakan hal itu dalam kajiannya bertajuk: "Pengadaan Driving Simulator SIM, Siapa yang Bertanggungjawab?" yang dirilis Rabu, 03 Oktober 2012.

Menurut koalisi tersebut, prioritas pemberantasan korupsi harusnya dimulai dari institusi penegak hukum karena korupsi sejatinya muncul akibat penegakan hukum yang korup. Bahkan akan lebih berbahaya jika institusi penegak hukum menjadi bagian dari rezim korup itu sendiri. Pernyataan ini menjadi sangat logis karena korupsi akan timbul ketika institusi negara (termasuk penegak hukum) dengan segala kekuasaannya melakukan penyimpangan.

Dari sisi penegakan hukum, menurut mereka, keterlibatan penegak hukum dalam rangkaian kejahatan korupsi menjadi kerumitan tersendiri dalam penanganannya. Namun pada sisi yang lain, ketika kejahatan ini dibongkar akan memberikan efek yang positif bagi pengungkapan kasus korupsi di institusi negara lainnya.

Dijelaskan, kasus pengadaan sebetulnya bukanlah barang yang baru di ranah penegakan hukum kasus korupsi. Dalam catatan KPK, hampir 70%-80% kasus yang ditangani KPK berasal dari sektor pengadaan. Maka menjadi penting untuk melihat kasus ini dari sisi hukum pengadaan.

Koalisi ini melakukan kajian singkat dengan menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut ketentuan, pengadaan driving simulator SIM wajib berpedoman pada ketentuan ini. Karena anggaran yang digunakan dalam pengadaan ini dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara.

Sesuai Perpres pengadaan mengatur organisasi pengadaan (Pasal 7 ayat 1 Perpres 70 Tahun 2012) bahwa pengguna anggaran adalah Kapolri Jend. Timur Pradopo. Pengguna Anggaran (PA) adalah penanggungjawab utama pengadaan. PA menetapkan rencana umum pengadaan (mengeluarkan kebijakan pemaketan pengadaan). Rencana umum pengadaan tersebut meliputi: 1) Mengidentifikasi kebutuhan pengadaan; 2) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran; 3) Menetapkan kebijakan umum pengadaan, pemaketan pengadaan, tata cara pengadaan, dan pengorganisasian pengadaan; 4) Menyusun KAK - kerangka acuan kerja; uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, besar total biaya.

Jadi, kesalahan pemaketan adalah kesalahan PA. Berdasarkan kebutuhan atau tidaknya suatu pengadaan ada di tangan PA. Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp. 100 miliar, PA yang menandatangani keputusan pemenang tender. Untuk itu, dalam simulator tertera surat keputusan PA (Kapolri) tentang penetapan pemenang tender pengadaan simulator ujian SIM senilai Rp 142,4 miliar, Kep/193/IV/2011 bertanggal 8 April 2011 yang menyatakan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pemenang tender. PA juga yang berwenang menetapkan KPA - Kuasa Pengguna Anggaran, PPK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. PA juga sebagai pengawas penggunaan anggaran.

Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo. KPA mendapatkan limpahan kewenangan dari PA atau dapat diistilahkan kepanjangtanganan dari PA. KPA dapat pula mengusulkan rencana umum pengadaan sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya. Bersama-sama dengan PA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen. KPA sebagai eksekutor penggunaan anggaran mengacu kepada renca-

na umum pengadaan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Waka Korlantas Brigjend Didik Purnomo, sebagai penanggungjawab teknis; menentukan spesifikasi teknis barang, menentukan HPS (harga perkiraan sendiri), menyusun draft perjanjian, menandatangani kontrak perjanjian dengan penyedia jasa (pemenang tender), mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada PA dan KPA, menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA dan KPA.

Sementara Pejabat Pengadaan atau biasa disebut Panitia Pengadaan adalah AKBP Tedy Rusmawan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA. Bertugas melaksanaan seleksi calon pemenang tender. Mengumumkan pengadaan, menilai kualifikasi peserta tender, mengevaluasi harga penawaran dari para peserta tender.

Lalu ada lagi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak, membuat dan menandatangani hasil pekerjaan, serta menyampaikan laporan kepada PA/KPA.

Kemudian, Penyedia Jasa adalah PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (Budi Santoso). Sesuai ketentuan perundang-undangan, penyedia jasa dalam menjalankan kegiatan usaha, mesti memiliki keahlian/kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pengadaan, memiliki sumber daya manusia, modal, fasilitas dan peralatan lainnya, tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan dan keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.

Ditenggarai perusahaan ini tidak memenuhi kualifikasi karena tidak berpengalaman dalam pengadaan simulator. Diketahui perusahaan ini bergerak di bidang *metal packaging*. Maka tidak mengherankan jika kemudian PT CMMA mensubkonkan proyek pengadaan ini kepada PT Inovasi Teknologi Indonesia.

Sehubungan dengan itu, maka Koalisi Masyarakat Pemantau Pengadaan merekomendasi tiga hal: 1) Meminta penegak hukum untuk mengusut siapa pun aktor yang terlibat sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing; 2) Menyempurnakan aturan pengadaan yang masih meninggalkan celah hukum; 3) Meminta KPK untuk mengambil-alih kasus ini agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. ■ **bh**

Lomba Blog Melawan Korupsi

Tema: "Melawan Korupsi, Siapa Takut!"

Teten Masduki

Transparency Interna-tional Indonesia (TII) sebagai organisasi yang mengembangkan kampanye preventif melawan korupsi terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya yang memiliki visi sama dalam pemberantasan korupsi. Setelah menggandeng komunitas mural, teater, komik, pembuat film dan hacker, saat ini TII memperluas gerakan sosial tersebut melalui komunitas blogger di Indonesia.

"Perjuangan melawan korupsi harus dilakukan di berbagai lini masyarakat. Ini agar isu korupsi menjadi musuh bersama rakyat, bukan aktivis LSM saja," kata Sekjen TII, Teten Masduki. Menurutnya, dengan jumlah anggotanya yang sekitar 2,7 juta serta sifatnya yang lintas batas, potensi yang dimiliki komunitas blogger sangat besar. Terutama dalam mendorong gerakan sosial melawan korupsi semakin kuat di pemerintahan yang korup ini.

Sehubungan dengan itu dilakukan kompetisi blog dengan tema: "Melawan Korupsi, Siapa Takut!" Pendaftaran lomba ini dibuka untuk umum sampai hari Minggu, 28 Oktober 2012 dengan ketentuan lomba dapat dibaca di website: www.indonesiabersih.org. Dewan juri dalam lomba ini terdiri dari unsur penggiat anti korupsi dan pakar blog yaitu: Teten Masduki (Sekjen TII), KPK, Enda Nasution (enda.goblog media.com), Blontank Poer (blontank poer.com), dan Totot Indrarto (pak de.com).

Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa perlawanan terhadap korupsi dan koruptor itu tidak saja dilakukan di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Secara tidak langsung segala bentuk kampanye yang dilakukan merupakan bentuk dukungan rakyat terhadap KPK. Sebagai satu-satunya institusi penegak hukum yang masih diharapkan rakyat, KPK sendiri menunggu dukungan rakyat melalui berbagai cara yang konstruktif agar praktek korupsi dapat hilang di bumi nusantara ini secepat mungkin.

Indonesia memang negara yang tergolong sangat aktif dalam pemanfaatan internet dan *platform* media sosial.

TII dalam siaran persnya menyebut pemanfaatan kampanye melalui platform ini sangat strategis karena dengan blog memungkinkan publik menciptakan medianya sendiri berdasarkan gagasan dan *concern* yang dimilikinya sendiri. Bila dikelola dengan aktif dan baik, tidak jarang banyak blog-blog yang berpengaruh dalam menyebarkan pesan-pesan tertentu di masyarakat. Hal positif lain yang muncul dengan menggunakan *platform* media sosial adalah meningkatnya budaya partisipasi dan solidaritas di kalangan pemanfaat media sosial yang akhirnya terdengar oleh pihak yang disasar. Tengok saja bagaimana gerahnya Presiden, Kepolisian dan DPR ketika hastag #SaveKPK menjadi *trending* topik di twitterland untuk menggambarkan dukungan masyarakat terhadap KPK. Contact person: Amin Shabana (Public Engagement), Hp: 0813 82969602, E-mail: amin@ladangmedia.org.

Tata Kelola Dana Pendidikan

ICW (Indonesia Corruption Watch) mengingatkan pasangan gubernur dan wakil gubernur baru DKI Jakarta Jokowi-Ahok harus meningkatkan kualitas tata kelola dana pendidikan di DKI Jakarta. Hal ini untuk menekan kebocoran dan penyelewengan anggaran pendidikan DKI Jakarta sekaligus untuk meningkatkan performa indikator pendidikan. Meski penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta didukung oleh dana yang besar, Rp 9,78 triliun tahun 2012, akan tetapi masih banyak dijumpai anak putus sekolah, gedung dan sarana dan prasarana sekolah yang rusak, ataupun keluhan tentang kesejahteraan guru. ■ **bh**

Korupsi di KPUD Batam

Ketua KPUD Batam Hendriyanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih melenggang di alam bebas. Sedangkan dua tersangka lainnya yakni Saripuddin Hasibuan, sekretaris KPUD Batam dan Deddy Saputra, bendahara KPUD Batam sudah lama ditahan. Keduanya sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (16/10).

Kasus dana hibah KPUD Batam tersebut oleh penyidik kejaksaan diduga merugikan uang negara sekitar Rp 1,2 miliar, telah menetapkan tiga tersangka. Hendri dan para komisioner KPUD Batam lainnya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk berkas Deddy dan Saripuddin. Hendri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga sudah dicekal. Ketika wartawan menanyakan perihal ini kepadanya, ia balik bertanya: Apa buktinya saya korupsi?"

"Setahu wartawan, bagaimana? Apa buktinya? Satu saja! Kalau pernyataan saksi, saksinya siapa? Artinya kita harus jeli melihat persoalan ini, isunya kan banyak. Makanya kita tengok saja pemeriksaan nanti," tegasnya. Menurut Hendriyanto, untuk menelusuri siapa saja yang layak disalahkan dalam kasus itu, sebenarnya mudah. "Hal itu bisa dilakukan dengan merunut kronologi kasus ini. Mengurai dana KPU itu mudah, selidiki saja mulai dari tahapan pengajuannya, pengambilannya, penggunaannya dan pertanggungjawabannya. Apakah ketua atau komisioner ada tanda tangan di situ," katanya seusai mengikuti sebuah acara pelantikan sebuah organisasi kemasyarakatan di Hotel Golden View Bengkong, Batam.

Dia menyatakan siap mengikuti proses penyidikan yang dilakukan Tim Kejaksaan Negeri Batam, kendatipun ia mengaku heran dengan penetapannya sebagai tersangka. Apalagi jika sangkaan itu dikaitkan dengan tudingan memperkaya diri. Dia membantah pengakuan staf KPU perihal dugaan pemalsuan laporan perjalanan dinas fiktif serta memerintahkan untuk memberikan THR kepada staf KPU. Hendri menyatakan keberatan jika berbagai modus penyelewengan anggaran di KPU Batam otomatis menjadi tanggung jawabnya secara hukum.

Hendri menjelaskan, terkait dengan keluarnya surat perintah tugas (SPT), perlu dipahami bahwa SPT untuk perjalanan dinas di KPU ada dua. Pertama, untuk staf sekretariat ditandatangani oleh Sekretaris KPU. Kedua, untuk komisioner KPU ditandatangani oleh Ketua KPU. "Pertanyaanya, surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditemukan fiktif tersebut apakah untuk perjalanan staf KPU atau komisioner KPU? Kalau SPPD yang diduga fiktif tersebut atas nama komisioner KPU, maka langkah yang dilakukan adalah, bagaimana SPT tersebut keluar. Apakah benar dikeluarkan (ditandatangani) oleh Ketua KPU?" jelas Hendri dengan nada tanya.

Menurut keterangan yang dia dapat dari staf KPU yang membuat surat untuk perjalanan dinas komisioner KPU tersebut, bahwa tandatangan Ketua KPU di SPT tersebut bukan asli tanda tangannya, tetapi di-scan atas perintah Sekretaris KPU. Dia tegaskan juga, duit dari perjalanan dinas itu tidak pernah diserahkan ke komisioner yang namanya dicatut dalam SPPD tersebut, tetapi diambil oleh Sekretaris.

Sedangkan mengenai dugaan Ketua KPU Kota Batam memerintahkan untuk memberikan THR kepada staf KPU, menurut Hendri, hal itu perlu dibuktikan. "Apakah Ketua KPU memang pernah memerintahkannya? Nah, kalau ada, siapa yang diberi perintah tersebut?" sanggahnya. ■ **rd**

Gaji Penyidik Timpang

Gaji penyidik di KPK amat timpang dibanding penyidik di Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli, menyatakan gaji polisi yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi lebih besar empat kali lipat dibanding yang bertugas di Polri. Akan tetapi, perbedaan gaji yang timpang ini tidak menjadi daya tarik bagi anggota polisi untuk keluar dari kepolisian. "Hanya beberapa oknum saja yang pindah karena alasan gaji, sebagian besar kembali ke Polri," kata Boy Rafli kepada pers, Jumat, 12 Oktober 2012.

Boy merinci, di institusi Polri gaji anggota polisi yang berpangkat Komisaris Polisi sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Sedangkan gaji polisi berpangkat sama di KPK sekitar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per bulan. Selain penghasilan, papar Boy, perbedaan besar juga terjadi pada anggaran operasional penanganan kasus. Di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, anggaran operasional penyidikan hanya sebesar Rp 37 juta per kasus. Sangat timpang dengan biaya operasional penyidikan di KPK yang besarnya mencapai Rp 300 juta lebih.

Tapi, kata Boy Rafli, gaji dan anggaran operasional yang timpang itu tidak menjadi alasan bagi Polri untuk tidak bekerja secara baik. "Tidak ada masalah bagi penyidik Polri. Kami tetap jalan," kata Boy. Walaupun dia menyebut ada upaya untuk memberikan insentif atau penyamaan penghasilan dan operasional bagi Polri. Menurutnya, langkah ini akan semakin membantu Polri dalam penanganan kasus-kasus korupsi. ■ **tp**

Ada BUMN Jadi Mayat

Ada badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah jadi mayat dan mati suri. Itu kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Dahlan membeberkan sari 141 BUMN, 110 di antaranya sehat, sisanya berubah menjadi mayat dan tinggal nama. Menteri BUMN mengemukakan hal itu saat memberi pengarahan kepada pemimpin BUMN bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Yogyakarta, Rabu, 10 Oktober 2012.

Dahlan menegaskan, perusahaan BUMN harus bisa memenuhi tiga kategori, yakni menjaga ketahanan nasional, mesin pertumbuhan, dan bisa diandalkan menjadi jago-jago di dunia internasional. "Badan usaha yang belum masuk ketiga kategori itu harus berusaha masuk. Jika tidak memenuhi syarat, sebaiknya bubar," kata Dahlan. Dia mengingatkan perusahaan BUMN tak boleh saling jegal dan bergerak untuk satu misi, misalnya ketahanan pangan. Dia memberi contoh PT Sang Hyang Sri, Bulog, dan lainnya saat ini dalam satu komando, yaitu membangun ketahanan pangan. ■ **tp**

Skandal Doping Terbesar

Citra pebalap sepeda Amerika Serikat, Lance Armstrong sebagai *cancer survivor* dan juara tujuh kali Tour de France runtuh setelah ia terbukti melakukan doping dan menjadi motor konspirasi doping paling canggih dalam sejarah dunia olahraga.

Lance Armstrong telah menjadi legenda di Tour de France. Ia berhasil menjadi juara tujuh kali dalam balapan sepeda paling terkenal di muka bumi itu antara tahun 1999 hingga 2005. Armstrong juga dikenal sebagai sosok pemberi inspirasi karena mampu menjadi juara setelah berjuang melawan penyakit kanker testis yang dideritanya.

Namun, citra yang dibangun oleh Armstrong itu runtuh di mata dunia. Armstrong, yang pensiun setahun lalu ini terbukti menggunakan doping secara sistematis selama bertahun-tahun. Kasus doping Armstrong makin hangat dibicarakan di media menyusul keluarnya pernyataan mengejutkan dari Badan Anti Doping Amerika Serikat (USADA) pertengahan Oktober 2012. USADA mengklaim jika kasus doping Armstrong menjadi yang terbesar dalam sejarah dunia olahraga.

Dalam laporannya, USADA mengatakan bahwa Armstrong tidak hanya merupakan bagian dari budaya doping di timnya (US Postal Service), tetapi juga menerapkan dan membakukannya. USADA mendasarkan tuduhannya pada sejumlah bukti, mulai dari bukti pembayaran, surat elektronik, data ilmiah, hasil tes laboratorium, hingga kesaksian 11 pebalap yang pernah menjadi rekan satu tim Armstrong. Di antaranya adalah George Hincapie yang mengaku menggunakan obat doping canggih itu. Kesaksian George Hincapie itu termasuk yang paling merusak citra Armstrong sebab Hincapie mendampingi Armstrong dalam tujuh kemenangan Armstrong di Tour de France. Saat itu, Hincapie juga tercatat selalu lolos dalam uji doping. "Bukti luar dalam kasus ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari yang disajikan pada kasus-kasus yang sebelumnya," ungkap USADA.

Sebelumnya, pada pertengahan Agustus 2012, USADA memutuskan untuk menghukum Armstrong dengan larangan ikut serta dalam kompetisi balap sepeda profesional seumur hidup dan pencabutan tujuh gelar juara Tour de France. Mereka juga menghapus catatan karier Armstrong selama 14 tahun setelah mereka menyimpulkan sang pembalap terbukti menggunakan obat penambah stamina. Keputusan itu diambil setelah Armstrong menyatakan tidak akan melawan keputusan apa pun yang dibuat USADA.

Armstrong sendiri selalu membantah tuduhan doping tetapi tidak melawan tuduhan USADA. Armstrong menegaskan, selama kariernya sebagai pebalap sepeda, dia tak pernah gagal menjalani tes doping. Salah satu kuasa hukum Lance Armstrong, Sean Breen, juga membantah tuduhan USADA. Breen mengatakan bahwa USADA mengabaikan 500-600 tes doping yang berhasil dilalui Armstrong.

Akhir Oktober 2012, Persatuan Balap Sepeda Internasional (UCI) kemudian menyatakan meratifikasi sanksi-sanksi yang ditetapkan Badan Antidoping Amerika (USADA) Agustus lalu, yang melucuti gelar juara yang diraih Armstrong dari tahun 1999 hingga 2005.

Pasca dicopotnya tujuh gelar juara Tour de France, Armstrong kehilangan sejumlah sponsor perusahaan besar, termasuk di antaranya perusahaan busana atlet Nike, produsen bir Anheuser-Busch dan produsen sepeda Trek. Armstrong juga mengundurkan diri sebagai ketua Livestrong, badan amal yang ia dirikan untuk menggalang dana bagi riset kanker lebih dari satu dekade lalu setelah ia sembuh dari kanker testis.

Dalam sebuah pesta kembang api di Edenbridge, Inggris, patung Armstrong sempat dibakar. Dia dinilai masyarakat sebagai nista di dunia olahraga balap sepeda. Sejak skandal itu terkuak, Armstrong pun telah merubah keterangan di profil Twitternya dari 'Tujuh kali juara Tour de France' menjadi 'Ayah yang membesarkan anaknya'. ■ **pan**

Perenang Akbar Nasution Pensiun

Atlet renang nasional, M. Akbar Nasution memutuskan mengundurkan diri sebagai atlet renang dan fokus untuk menjadi pelatih. Di usia yang ke-28, Akbar merasa sudah saatnya untuk membagi ilmu dan pengalamannya dalam mengembangkan olahraga renang di Indonesia.

Akbar belum memutuskan apakah ia akan membuat perkumpulan renang yang baru untuk masa depannya. Sementara belum memutuskan, Akbar membantu kakaknya, Elsa Manora Nasution menjadi pelatih renang di sebuah sekolah swasta.

Akbar Nasution masuk dalam jajaran perenang elite nasional selama sepuluh tahun terakhir. Puncak prestasinya adalah saat ia memborong enam medali emas di Pekan Olah raga Nasional di Tenggarong, Kalimantan Timur pada 2008. Saat itu ia membela provinsi Jambi.

Pada PON XVIII di Riau, September 2012, Akbar membela provinsi Sumatera Selatan. Ia mempersembahkan satu medali emas di nomor 400 meter gaya ganti perorangan. Namun di nomor lainnya, 1500 meter, Akbar dikalahkan perenang Jawa Barat, Ricky Anggawjaya dan perenang DKI, Rodrick Luhur. ■ **pan**

Usain Bolt
Naikkan Citra Dunia Atletik

Pelari tercepat di dunia, Usain Bolt, kini menjadi magnet bagi produsen barang bermerek kelas dunia. Peraih tiga medali emas Olimpiade London 2012 yang ingin mencoba cabang olahraga lain seperti lompat jauh dan sepakbola ini dianggap berhasil menaikkan citra dunia olahraga atletik.

Siapa yang tidak mengenal Usain Bolt? Atlet kelahiran Jamaika ini menjadi pelari tercepat dunia dan menjadi fenomena pada Olimpiade London 2012 setelah berhasil mempertahankan medali emas di arena adu lari 100 m putra dengan catatan 9,63 detik. Bolt memecahkan rekor Olimpiade yang diukirnya ketika berlaga di Beijing pada 2008 dengan catatan 9,69 detik.

Setelah menuai kemenangan di Olimpiade Beijing, Bolt menjadi selebritis yang menarik banyak sponsor. Menurut catatan Forbes, Bolt mengumpulkan US$20 juta selama setahun terakhir. Pendapatan itu 20 kali dari yang biasa dikumpulkan seorang sprinter. Pada kejuaraan tahunan atletik, hadiah uang pemenang biasanya berkisar U$10 ribu sampai US$60 ribu.

Sprinter juga biasanya mendapat uang tambahan dalam setiap penampilan. Atlet seleb seperti Bolt mendapat bayaran US$250 ribu sampai US$350 ribu dalam tiap penampilan sebab ia bisa menyedot banyak penonton untuk datang ke stadion. Meski demikian, sumber penghasilan Bolt paling besar datang dari sponsor. Sebelum bersinar di Olimpiade Beijing, Bolt hanya memiliki kontrak dengan Puma dan Digicel, perusahaan telekomunikasi Jamaika.

Setelah Olimpiade Beijing, berbagai merek dunia berlomba-lomba memasang nama Bolt dalam iklan-iklannya. Misalnya, Gatorade, Hublot, dan Virgin Media. Wajah Bolt juga muncul di papan-papan reklame Visa di seluruh Eropa, termasuk dalam Olimpiade London 2012 karena Visa menjadi sponsor resmi.

Sebelumnya, pada tahun 2010, Bolt mendapatkan US$9 juta tiap tahun setelah kontraknya diperpanjang oleh Puma, produsen raksasa pakaian olahraga asal Jerman. Angka itu amat besar jika dibandingkan dengan kompetitor Puma, produsen pakaian olahraga, Nike. Atlet sepakbola atau bisbol yang dikontrak Nike biasanya 'hanya' dinilai sebesar US$1 juta per tahunnya. Bahkan, kontrak Bolt jauh lebih besar dengan kontrak empat tahun senilai US$32 juta yang dimiliki oleh bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo.

Sedangkan pada tahun 2012, Bolt menandatangani kontrak dengan Soul Electronics untuk memproduksi headphone ala Bolt. Nissan Motor juga tidak mau ketinggalan memasang Bolt sebagai bagian dari kampanye globalnya. Nissan memperkenalkan mobil GT-R special edition Usain Bolt pertengahan Oktober 2012 yang dilelang di eBay. Hasilnya disumbangkan untuk Usain Bolt Foundation yang memberi banyak kesempatan generasi muda di Jamaika untuk keluar dari keterpurukan.

Nama besar Bolt juga sampai ke Inggris. Bolt kemungkinan akan memperkuat Manchester United saat menghadapi Real Madrid tahun depan. Namun Bolt tidak akan berlaga di Liga Primer Inggris. Bolt kemungkinan akan diundang untuk memperkuat Manchester United dalam laga amal antara tim Legenda Manchester United melawan tim Legenda Real Madrid.

Kabarnya, Bolt, yang memang fans berat Manchester United berniat untuk banting stir jadi pemain sepakbola bila pensiun sebagai atlet lari. Dia juga bersedia berhenti sebagai pelari jika diminta masuk ke skuad United. Selain itu, Bolt berniat ingin menekuni nomor lari 400 meter atau lompat jauh di Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro.

Berlatih Sejak Kecil

Pada masa kecilnya, pelari kelahiran Jamaika 21 Agustus 1986 ini hanya tertarik pada olahraga sepakbola serta kriket. Nasibnya kemudian berubah ketika Pablo McNeil, seorang mantan sprinter, mendorong Usain Bolt kecil menekuni olahraga atletik.

Usain Bolt yang memiliki tinggi badan 196 cm ini memulai karirnya di ajang atletik saat mengikuti CARIFTA Games pada tahun 2001. Setelah melewati berbagai pertandingan di tingkat junior dan beberapa kali meraih medali emas, Bolt mulai melirik ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mencoba peruntungannya dengan mengikuti kejuaraan atletik World Championship di Osaka Jepang pada 2007. Sayangnya Bolt hanya mampu meraih medali perak di nomor 200 m dan 4×100 m relay. Kegagalan ini menjadi pelecut semangat Bolt untuk berprestasi lebih baik.

Akhirnya, kerja keras atlet bernama lengkap Usain St Leo Bolt ini berbuah manis di ajang Olimpiade Beijing 2008. Bolt meraih medali emas di nomor 100 m, 200 m, dan 4×100 m relay, sekaligus memecahkan rekor dunia. Sejak saat itu, gelar manusia tercepat di dunia pun disandangnya. ■ **pan**

Rahasia Bakat Pesepak Bola Brasil

Bagaimana Brasil bisa menjadi tempat "lahirnya" pemain sepak bola yang handal?

Daniel Coyle, dalam bukunya The Talent Code (Rahasia Bakat), menceritakan mengapa Brasil menjadi tempat "lahirnya" banyak pemain sepak bola berbakat. Kadang kita sering menganggap orang-orang yang berbakat mendapatkan kemampuannya tanpa usaha. Namun, Daniel mengatakan jika kita berpikir seperti itu maka kita akan terjebak ke dalam cara belajar yang mengerikan.

Bagi Coyle, bakat adalah keterampilan yang diulang-ulang yang tidak bergantung pada ukuran fisik. Mari kita garis bawahi kalimat "keterampilan yang diulang-ulang". Bakat dilahirkan dari latihan yang dilakukan berulang-ulang. Pengulangan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran. Inilah yang menjadi rahasia bakat.

Rahasia bakat dikembangkan dalam penemuan-penemuan ilmiah revolusioner yang menyertakan sebuah saraf insulator yang disebut myelin. Informasi yang didapatkan dari latihan yang berulang-ulang akan tersimpan di dalam myelin. Semakin sering seseorang berlatih (melakukan pengulangan) maka lapisan myelin akan menghasilkan lapisan baru. Semakin tebal myelin tersebut, maka informasi yang ada di dalam myelin itu akan makin tersimpan dengan baik, dan akan meningkatkan kemahiran.

Lalu, latihan seperti apa yang paling tepat untuk dapat menghasilkan lapisan-lapisan baru myelin? Daniel menyebutnya dengan nama Latihan Mendalam. Latihan mendalam tidak cukup hanya memperhatikan mengenai kuantitas: seberapa sering anda berlatih?", namun juga harus memperhatikan kualitas: seberapa baik saya belajar dari latihan ini?".

Daniel Coyle menjelaskan latihan mendalam seperti ini: "Latihan mendalam dibangun dengan sebuah paradoks: berjuang dengan cara-cara bertarget tertentu - melakukan hal yang melampaui batas-batas kemampuan anda dan anda melakukan kesalahan-kesalahan, yang membuat anda lebih pandai. Atau dengan kata lain, pengalaman yang memaksa anda untuk tidak tergesa-gesa, untuk membuat kesalahan dan mengoreksinya. Dan hal itulah yang dilakukan oleh para pemain sepakbola dari Brasil.

Simon Clifford, seorang pelatih sepak bola, pergi ke Brasil untuk mengetahui bagaimana cara Brasil bisa menghasilkan pemain sepak bola yang terampil. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyelidiki daerah luas penuh sesak di Sao Paolo. Ia menjumpai banyak hal

THE TALENT CODE: Bakat pemain tim sepakbola Brazil ditempa di pusat pelatihan yang benar-benar terorganisir dengan sesi latihan yang panjang

yang memang ingin ia lihat: hasrat, tradisi, pusat-pusat pelatihan yang benar-benar terorganisir, dan sesi latihan yang panjang. (Para pemain bola remaja di akademi-akademi sepak bola Brasil menempuh latihan dua puluh jam setiap minggunya, jauh lebih lama dibandingkan pemain-pemain bola di Inggris yang hanya berlatih lima jam setiap minggu).

Namun Clifford juga melihat sesuatu yang tidak terduga: sebuah permainan unik yang menjadi senjata rahasia di balik keterampilan pemain sepak bola Brasil. Permainan itu menyerupai sepak bola. Bolanya berukuran setengah dari ukuran bola biasa, bola itu sangat sulit dipantulkan. Para pemain dilatih bukan di lapangan rumput yang luas, tetapi di lapangan seukuran lapangan basket yang dibeton, berlantai kayu. Setiap kelompok terdiri dari lima atau enam pemain. Permainan ini memiliki irama dan kecepatan yang membabi-buta: permainan ini terdiri dari rangkaian tindakan rumit yang cepat tanpa kontrol, dan terdiri dari gerakan dari ujung ke ujung tanpa berhenti. Permainan ini disebut *futebol de salao*, bahasa Portugal untuk "sepak bola dalam ruangan". Bentuk modernnya disebut futsal.

Futsal disebut sebagai incubator bagi jiwa orang-orang Brasil. Inkubasi tersebut tercermin dalam biografi-biografi para pemainnya. Diawali dari Pele dan kemudian setiap pemain besar Brasil bermain futsal saat kecil. Juninho, misalnya, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menendang bola berukuran penuh di atas rumput sampai ia berusia empat belas tahun. Robinho menghabiskan waktu latihannya bermain futsal hingga ia berusia dua belas tahun. Gerakan *elastico* (gerakan menggiring bola ke luar dan masuk) yang dipopulerkan oleh Ronaldinho bermula dari futsal. Begitu juga gol sodokan kaki yang diperagakan Ronaldo pada Piala Dunia tahun 2002 juga berasal dari gerakan futsal.

Mengapa futsal bisa menjadi incubator lahirnya pemain sepak bola yang berbakat? Salah satu alasannya bisa dijelaskan dengan matematika. Menurut penelitian di Universitas Liverpool, para pemain futsal lebih sering menyentuh bola dibandingkan pemain sepak bola - enam kali lebih sering per menitnya. Bola futsal yang lebih kecil dan lebih berat dari bola biasa membuat semakin tinggi akurasi penanganan yang dibutuhkan dan dihasilkan. Dalam permainan futsal yang dimainkan dalam lapangan yang lebih kecil dari biasa, pengoperan dengan tepat adalah kuncinya: secara keseluruhan permainan tersebut berkaitan dengan mencari sudut dan jarak yang tepat serta berkoordinasi dengan cepat dengan pemain lain. Kontrol bola dan ketajaman penglihatan merupakan hal yang sangat penting, sehingga ketika para pemain futsal bermain dalam permainan penuh, mereka merasa seolah-olah memiliki satu ruang bebas untuk bergerak.

Kesimpulannya: futsal memadatkan keterampilan sepak bola dalam kotak kecil; menempatkan pemain dalam wilayah latihan mendalam, membuat dan mengoreksi kesalahan dan secara terus menerus menghasilkan solusi atas masalah-masalah yang muncul. Para pemain yang menyentuh bola 600 persen lebih sering, tanpa disadari belajar jauh lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang berada di lapangan luas dan besar di luar ruangan. ■ do

Tiga Peneliti Perempuan dari ITB

Penelitian yang dilakukan oleh tiga dosen perempuan ini terbilang unik. Ada yang meneliti tentang pisang ambon, berusaha membuat bioreaktor yang mampu menghasilkan sel darah merah, dan meneliti penyakit pada udang.

Fenny Martha Dwivany

Made Tri Ari Penia Kresnowati

Sidrotun Naim

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Mohammad Hatta memberikan penghargaan kepada tiga dosen ITB pada puncak perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pemberian penghargaan disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama beberapa menteri lain. Adapun penerima penghargaan peneliti wanita dari ITB adalah Fenny M. Dwivany dari Sekolah Ilmu Teknologi Hayati (SITH), Made Tri Ari Penia Kresnowati dari Fakultas Teknologi Industri (FTI), dan Sidrotun Naim dari SITH.

Dr. Fenny Martha Dwivany, perempuan kelahiran 1972 ini melakukan penelitian mengenai proses pematangan pada pisang ambon. Ia mengamati perubahan warna, tekstur, aroma dan rasa pada buah. Setelah menghabiskan waktu dua tahun untuk penelitian tersebut, ia menemukan keberadaan hormon etilen yang memiliki peranan penting untuk membuat pisang menjadi matang.

Hormon etilen ini menjadi penyebab gen-gen lain yang terlibat dalam pematangan buah. Saat penelitian, Fenny juga dengan sengaja melakukan gangguan pada pembentukan etilen sehingga buah tersebut menjadi tidak matang.

Selain mendapatkan penghargaan peneliti perempuan, Fenny sebelumnya sudah memperoleh International L'Oreal UNESCO for Women in Science, Endeavour Award dari pemerintah Australia pada 2010 dan paper terbaik Hayati Award 2009.

Sedangkan Made Tri Ari Penia Kresnowati berusaha membuat bioreaktor yang mampu menghasilkan sel darah merah. Ide itu ia dapat saat meneliti sel punca, sel yang ada di dalam tubuh yang dapat memproduksi diri menjadi sel darah, sel jantung, dan sel lainnya.

Penia berencana membuat sel punca ini akan memproduksi diri menjadi sel darah merah di luar tubuh dengan teknik bioreaktor. Diperlukan suatu zat yang memicu hal itu agar bisa terjadi, contohnya Cytokine. Penia sebelumnya pernah mendapat penghargaan dari L'Oreal-Unesco For Women in Science 2008.

Sementara Sidrotun Naim dijuluki dokter udang karena ia menjadi orang Indonesia pertama yang memfokuskan diri untuk meneliti penyakit pada udang. Naim tertarik pada hal itu saat ia bekerja untuk program Indonesia-Aceh WWF sebagai konsultan program kelautan. Saat bekerja, ia tidak menemukan ahli udang di Indonesia dan masih banyak petambak udang yang kebingungan apabila udangnya terkena penyakit. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor udang terbesar di dunia.

Naim meneliti penyakit udang dan mencari vaksinnya di Departeman Ilmu Hewan dan Mikrobiologi University Of Arizona, Amerika Serikat. Salah satu solusi yang sedang dikembangkan adalah dengan menggabungkan budidaya udang dengan ikan Nila dalam satu tambak. Untuk prestasi lainnya, Naim memenangi L'Oreak National Fellowship pada 2009 dan L'Oreal-UNESCO FWIS International 2012. ■ **cid**

KRL Khusus Perempuan

Kereta rel listrik (KRL) "Commuter Line" rute Jabodetabek layanan gerbong khusus wanita diluncurkan pada 1 Oktober 2012 sebagai salah satu program KAI Commuter Jabodetabek untuk meningkatkan pelayanan dan sebagai bentuk kepedulian kepada para penumpang wanita.

Selain itu, program Rangkaian Khusus Wanita (RKW) merupakan kelanjutan dari program Kereta Khusus Wanita (KKW) yang sudah terlebih dahulu diluncurkan pada 19 Agustus 2010. Pada program KKW, dalam satu rangkaian terdapat dua kereta khusus wanita, yaitu kereta paling depan dan kereta paling belakang.

Pemberlakuan penambahan rangkaian ini tidak mengubah jadwal perjalanan KRL/KA yang sudah ada, namun akan menambah jumlah perjalanan KRL yang sudah ada sebanyak 531 perjalanan menjadi 539 perjalanan. Perjalanan tambahan rangkaian khusus wanita ini tidak beroperasi pada hari Minggu dan hari libur. ■ **cid**

Mengajak Bayi Belajar Makan

Saat usia enam bulan, pemberian ASI saja hanya sekitar 60-70% kebutuhan bayi. Artinya, selain ASI, bayi membutuhkan makanan pendamping ASI (MP-ASI).

Badan Kesehatan Dunia WHO dan masyarakat dunia sepakat bahwa ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi baru lahir sampai berusia enam bulan. Pemberian ASI eksklusif (0-6 bulan) dapat melindungi bayi dari risiko terkena infeksi saluran pencernaan. Dengan manajemen laktasi yang baik, produk ASI dinyatakan cukup sebagai makanan tunggal untuk pertumbuhan bayi yang normal sampai usia enam bulan.

Saat usia bayi menginjak usia 6 bulan, bayi mulai diajarkan pula pengenalan dan pemberian makanan tambahan selain ASI. Dibutuhkan pengetahuan yang baik sebagai orang tua dalam memberikan makanan pendamping ASI ini, dikarenakan hal ini merupakan pengalaman pertama bagi bayi.

Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif SpA(K) menjelaskan, kematangan oromotor terjadi pada usia empat sampai delapan bulan. Disusul kematangan saluran cerna pada bulan keenam, yang bersamaan dengan kematangan sistem imun. Mengacu pada hal tersebut, maka usia yang paling tepat untuk diberikan makanan tambahan selain susu adalah umur 6 bulan.

Beberapa tanda bayi siap menerima makanan padat antara lain bayi tidak puas hanya dengan diberi ASI saja, terbangun tengah malam dan menangis karena lapar, dan tampak tertarik pada makanan yang Anda makan.

Saat usia enam bulan, pemberian ASI saja hanya sekitar 60-70% kebutuhan bayi. Artinya, selain ASI, bayi membutuhkan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Makanan padat pertama atau MP-ASI ini sebaiknya diberikan secara bertahap dalam hal jumlah maupun kualitas. Orangtua dapat melakukan 'tes makanan'. Mulailah makanan berbentuk halus antara lain bubur susu, biskuit yang ditambah air, atau buah yang dilumatkan.

BELAJAR MAKAN: Saat usia bayi menginjak usia 6 bulan, mulai diajar pengenalan dan pemberian makanan tambahan selain ASI.

Berikan sedikit demi sedikit, sekitar satu sampai dua sendok teh. Sebaiknya diberikan pada pagi hari agar cukup waktu bila ada reaksi simpang, seperti alergi atau masalah pencernaan. Jika tidak ada reaksi simpang, ulangi pemberiannya sebanyak satu sampai dua kali selama beberapa hari.

Ingatlah, bagi bayi Anda, makan juga merupakan satu keahlian baru. Ia perlu mempelajarinya secara bertahap bagaimana membuka mulut, mengunyah, dan menelan makanan yang dimasukkan ke mulutnya. Masa krisis untuk mengenalkan makanan padat yang memerlukan keterampilan mengunyah (6-7 bulan) yang terlewati, dapat berakibat kesulitan untuk menelan makanan, atau akan menolak makan bila diberi makanan padat di kemudian hari.

"Saat makan merupakan periode pembelajaran dan pemberian kasih sayang. Bicara dan kontak matalah selama menyuapi bayi Anda," saran Damayanti. Jangan jejali bayi dengan makanan dalam jumlah banyak. "Kelebihan makanan (*overfed*) akan memicu muntah," lanjutnya.

Usia enam sampai sembilan bulan adalah masa di mana si kecil belajar mengenali rasa. Itulah sebabnya, saat-saat ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk memperkenalkan berbagai tekstur dan rasa baru pada si kecil.

Jumlah atau porsi makanan bisa disesuaikan dengan hitungan umur. Misalnya, usia 6 bulan makan 6 sendok, usia 7 bulan makan 7 sendok, dan selanjutnya. Urutan pemberian makanan biasanya buah-buahan, tepung-tepungan, dan sayuran. Perhatikan pula kandungan gizi makanan bayi. Bayi membutuhkan kar-

bohidrat, protein, dan lemak yang cukup agar pertumbuhan dan perkembangan otaknya dan berjalan sempurna.

Untuk mempertinggi nilai gizi makanan, Anda dapat menambahkan nasi tim bayi dengan sumber zat lemak seperti santan, kaldu atau margarin agar asupan kalorinya menjadi lebih tinggi, di samping memberikan rasa enak serta mempertinggi penyerapan vitamin A dan zat gizi lainnya yang larut dalam lemak.

Saat usia 10-12 bulan, mulai perkenalkan makanan keluarga secara bertahap. Daging, ikan, dan telur umumnya sudah dapat dikonsumsi. Bila bayi menunjukkan gejala alergi, telur baru diberikan setelah usianya satu tahun. Aturlah bentuk dan kepadatan nasi tim yang Anda berikan secara bertahap sehingga lambat laun mendekati bentuk kepadatan makanan keluarga. Variasikan lauk pauk dan sayuran secara bergantian.

Di rentang usia ini, kemampuan mengunyah dan menelan sudah lebih baik. Jumlah makanan juga semakin banyak, namun tetap disesuaikan dengan kesanggupan makan anak. Patokannya tiga puluh menit. Jika lewat dari waktu itu makannya belum habis, sudahi saja.

"Lengkapi gizinya dengan camilan sekitar dua atau tiga jam berikutnya. Anda bisa memberinya makanan selingan bergizi tinggi seperti bubur kacang hijau atau jus buah," tambah Damayanti. Atur jadwal makan agar bayi merasa lapar dan kenyang secara teratur.

Lalu apa konsekuensinya bila waktu belajar makan itu terlewat? "Jika bayi sudah usia lewat setahun akan lebih sulit mengajak anak untuk belajar. Karena ia sudah memasuki fase bermain," papar dokter yang menjadi pengurus UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini.

Manfaatkan satu tahun pertama kehidupan anak untuk melatih keterampilan makan. Pola makan yang baik merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjamin kehidupan yang sehat dan masa depan yang baik bagi sang buah hati tercinta. ■ **DGR**

Minuman Kesehatan Jantung

Menjaga kesehatan jantung tidak boleh disepelekan. Jantung adalah organ tubuh yang harus selalu aktif kendati kita tidur. Jika jantung berhenti berdetak, itulah kematian.

Serangan jantung dapat terjadi jika pembuluh darah tersumbat oleh lapisan lemak yang menghambat aliran darah.

Maka jika ingin berumur panjang dan sehat, jagalah kesehatan jantung Anda. Biasakan berolahraga secara teratur dan mengonsumsi minuman dan makanan sehat. Berikut ini beberapa jenis minuman yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung:

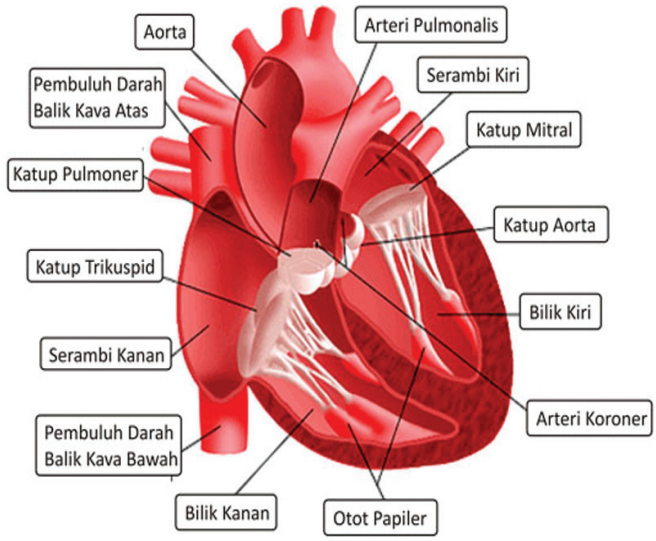

1. Air putih: Minuman terbaik untuk mengatasi dehidrasi dan tanpa kalori. Dehidrasi dapat berkontribusi pada beberapa faktor risiko untuk penyakit jantung koroner, termasuk darah kental. Maka minumlah 6-8 gelas air putih per hari.

2. Susu: Susu yang rendah lemak atau susu kedelai yang diperkaya kalsium dan/atau sterol yang sekaligus berfungsi membantu menurunkan kadar kolesterol.

3. Anggur: Buah (jus) anggur baik untuk jantung karena mengandung banyak senyawa yang berkhasiat menurunkan risiko penyakit jantung. Anggur merah (red wine) yang antara lain mengandung resveratrol (memiliki sifat antioksidan) dapat melindungi pembuluh darah di jantung serta membantu mencegah pembentukan penggumpalan darah. Minumlah 1-2 gelas per hari

4. Kopi: Ternyata kopi memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi ketimbang kakao atau teh. Maka dengan mengonsumsi kopi dalam jumlah yang tepat dapat menghambat peradangan dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Minumlah antara 2 hingga 4 cangkir kopi per hari, kecuali Anda mengalami insomnia, gelisah dan kelelahan, cukuplah satu gelas.

5. Teh hitam dan hijau: Teh hitam dihasilkan melalui proses fermentasi setelah daun dipanen lalu dikeringkan. Pengolahan ini mengubah komposisi kimia dari daun sehingga menghasilkan beberapa antioksidan kuat yang membantu mendukung kesehatan jantung. Begitu pula teh hijau, sama seperti teh hitam, juga mengandung banyak antioksidan yang baik untuk jantung. Perbedaan utamanya adalah teh hijau tidak difermentasi. Minum 1-3 cangkir teh hitam atau hijau setiap hari dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung.

6. Jus delima: Para pakar dari University of California menemukan bahwa kapasitas antioksidan jus delima tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang anggur merah dan teh hijau. Konsumsi rutin jus buah delima dapat menurunkan kolesterol, mengurangi plak arteri (faktor risiko untuk penyakit jantung), dan meningkatkan aliran darah ke jantung. (dari berbagai sumber)

Jadi Jahat Bila Berlebihan

Walau enak di mulut, Anda berisiko terkena serangan jantung dan stroke. Itulah keburukan kolesterol bila menimbun di dalam tubuh Anda.

Menikmati *seafood* seperti udang, cumi, dan kepiting tentulah nikmat. Meskipun harganya agak mahal, tak membuat para penggemar *seafood* keberatan. Makanan ini pun mudah ditemukan mulai dari pinggir jalan sampai restoran berkelas di hotel-hotel berbintang.

Namun tahukah Anda, apa yang terkandung dalam makanan *seafood* yang nikmat dan gurih itu? Ya benar, kandungan kolesterol yang tinggi. Selain makanan yang disebut di atas, masih banyak lagi jenis makanan yang diketahui memiliki kandungan kolesterol tinggi, seperti kuning telur, otak sapi, minyak babi, jeroan (hati, usus, jantung), santan, susu sapi, dan sebagainya.

Semakin tinggi kandungan kolesterol dalam makanan, semakin nikmat rasanya di mulut Anda. Namun, kebiasaan mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi jelas tidak sehat bagi tubuh. Karena dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung dan stroke.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RS Harapan Kita, dr Arieska Ann Soenarta, SpJP, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap makanan yang memicu peningkatan kadar kolesterol darah.

Dalam jumlah tertentu, kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk dinding sel, hormon, dan metabolisme tubuh. Setiap hari tubuh membutuhkan 1.100mg kolesterol, dimana sekitar 25-40% (200-300mg) kolesterol berasal dari makanan. Selebihnya dibuat dalam hati dan usus.

Ada tiga jenis kolesterol, yakni HDL, LDL, dan trigliserida. LDL (*low density lipoprotein*) dikenal sebagai kolesterol jahat karena bisa membentuk endapan/plak di dinding pembuluh darah (aterosklerosis) sehingga pembuluh darah menyempit. Kondisi itu berisiko menyebabkan serangan jantung dan stroke.

Permukaan plak bisa pecah karena tekanan darah pada area plak pada umumnya tinggi. Saat plak pecah, mekanisme pertahanan tubuh akan membentuk gumpalan darah untuk menutup luka yang terjadi. Namun, karena pembuluh darah di lokasi itu sudah menyempit, gumpalan darah itu akan menutup diameter pembuluh darah. Bila terjadi pada pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Jika kejadiannya berlangsung pada pembuluh darah otak, terjadilah stroke.

KOLESTEROL: Semakin tinggi kandungan kolesterol dalam makanan, semakin nikmat rasanya di mulut Anda

Sementara itu, HDL (*high density lipoprotein*) disebut kolesterol baik, karena berfungsi mengangkut LDL dari pembuluh darah menuju hati. Dengan demikian, risiko terbentuknya plak lebih kecil. Kadar kolesterol HDL kolesterol baik pada wanita cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pria.

Sementara itu, trigliserida adalah jenis lemak lain yang melewati pembuluh darah. Kebanyakan trigliserida berasal dari makanan. Tingginya kadar trigliserida menjadi risiko tambahan serangan jantung

"Kolesterol perlu senantiasa terkontrol setiap saat. Kolesterol total normal dalam tubuh adalah 160-200 mg/dl, dengan komposisi kadar LDL, HDL, dan trigliserida seimbang. Yaitu LDL kurang dari 160mg/dl, HDL lebih dari 40mg/dl, dan trigliserida kurang dari 150mg/dl," jelas Arieska.

Kondisi saat LDL dan trigliserida tinggi dan HDL rendah, perlu diwaspadai. Kondisi itu dikenal juga sebagai dislipidemia atau hiperkolesterol. Kolesterol yang tinggi tidak terlihat dan seringkali tidak bergejala. Karena itu penting bagi kita untuk secara rutin melakukan *check up* (periksa darah) setiap 6 bulan.

Ahli penyakit stroke, Dr. Sutarto Prodjo Disastro mengungkapkan banyak faktor yang menyebabkan kondisi hiperkolesterol. Antara lain, genetik, usia, etnis, jenis kelamin, stres, dan gaya hidup.

"Penanganan hiperkolesterol lebih baik fokus pada faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, yaitu gaya hidup," ujar Sutarto. Termasuk pola makan, olahraga, dan kebiasaan sehari-hari.

Para peneliti telah menemukan beberapa makanan yang bisa mengontrol kolesterol. Makanan tersebut termasuk ikan yang mengandung lemak seperti salmon dan tuna, kenari, oatmeal, serta makanan yang telah diperkaya dengan sterol dan stanol dari tumbuhan.

Kiat memilih makanan rendah kolesterol adalah membatasi sumber hewani. Perbanyak makanan dari bahan nabati. Selain tidak mengandung kolesterol, jenis makanan ini dapat menyerap kolesterol yang ada dalam darah dan mengeluarkannya dari tubuh serta mengandung bahan aktif non nutrisi yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Misalnya isoflavon dari biji-bijian, pektin dari buah dan sayur, serta serat.

Batasi konsumsi daging, pilihlah yang berserat halus, seperti daging ayam. Jika ingin makan daging sapi, pilih yang tanpa lemak. Makanan cepat saji (*fast food*) apa pun jenisnya, sebaiknya dikurangi atau dibatasi.

Menu tradisional Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari, rata-rata mengandung sedikit kolesterol. Misalnya nasi dengan lauk tempe, daging, sayur, buah dan kacang hijau hanya mengandung kolesterol sebesar 70 mg. Nasi goreng dengan omelet mengandung kolesterol sekitar 50 mg (berasal dari telur).

Lakukan olahraga teratur, jaga agar berat badan Anda agar tidak berlebihan.Yang tak kalah penting, hindari rokok dan alkohol. Bila hal di atas sudah dilaksanakan, namun masih hiperkolesterol, maka intervensi obat oleh dokter sebaiknya diberikan demi mengendalikan kolesterol.

Sutarto mengingatkan, modifikasi gaya hidup dan penggunaan obat-obatan serta pengecekan kadar kolesterol secara berkala penting dilakukan untuk deteksi dini hiperkolesterol dan pengendalianya. ■ **DGR**

Al-Zaytun

SARANA MANGUN KARSA

PARAMADINA

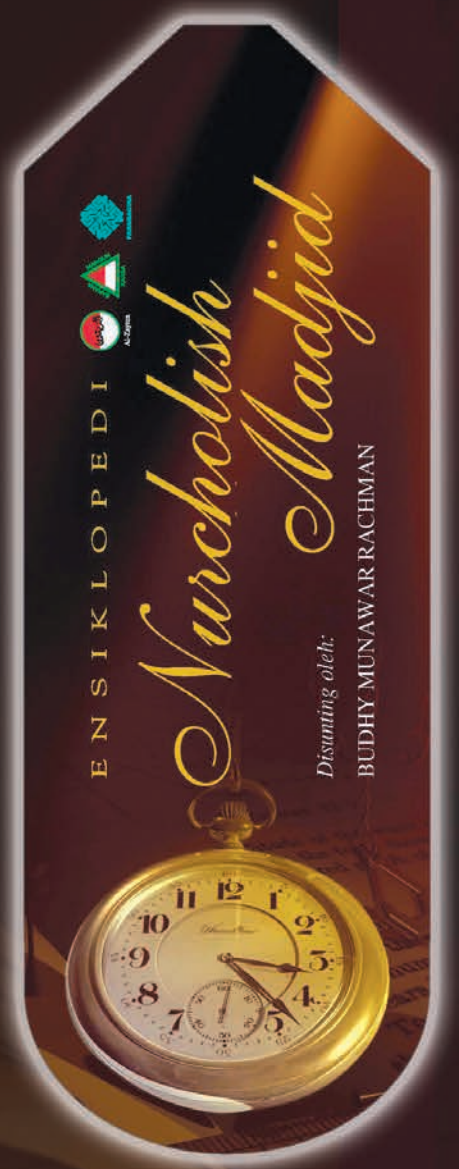

BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

PESAN SEKARANG:

AL-ZAYTUN
(0234) 742815

BERITA INDONESIA
(021) 32195353

E-MAIL:
sales@tokohindonesia.com

BERINDO

MAJALAH BERITA INDONESIA®

EDISI 85 TAHUN VII ★ DESEMBER 2012

Rp.16.000,-

Polri, Tegakkan Kepala!

PERKUAT DAN AWASI KPK

WAWANCARA PANGLIMA TNI LAKSAMANA AGUS SUHARTONO

7 SYARAT PEMIMPIN NASIONAL

KISAH MANUSIA KHALIFAH TUHAN

LENTERA DEMOKRASI, TOLERANSI DAN PERDAMAIAN | ISSN 1907-977X | BERINDO.COM | BERITAINDONESIA.CO.ID